

**ANALISIS WACANA SOLIDARITAS DIGITAL
#FREEPALESTINE PERSPEKTIF MASYARAKAT INDONESIA
DI MEDIA SOSIAL X TERHADAP KONFLIK HAMAS DAN
ISRAEL 2023-2024**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Ahad Faisal Nazim

2106016035

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Ahad Faisal Nazim

NIM : 2106016035

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Wacana Solidaritas Digital *#FreePalestine*: Perspektif Masyarakat Indonesia Di Media Sosial X Terhadap Konflik Hamas dan Israel 2023-2024

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2025

Pembimbing



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS WACANA SOLIDARITAS DIGITAL
#FREEMPALESTINE PERSPEKTIF MASYARAKAT INDONESIA
DI MEDIA SOSIAL X TERHADAP KONFLIK HAMAS DAN
ISRAEL 2023-2024

Di Susun Oleh:

Ahad Faisal Nazim

2106016035

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada Kamis, 12 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



M. Nuqlir Bariklana, M.Si.
NIP. 198505022019031007

Penguji I

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A.
NIP. 196805051995031002

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 198511182016011901

Penguji II

Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 198511182016011901

Pembimbing

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Solidaritas Digital *#FreePalestine*: Perspektif Masyarakat Indonesia Di Media Sosial X Terhadap Konflik Hamas dan Israel 2023-2024” merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 Mei 2025

Ahad Faisal Nazim

NIM: 2106016035

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Wacana Solidaritas Digital *#FreePalestine*: Perspektif Masyarakat Indonesia Di Media Sosial X Terhadap Konflik Hamas dan Israel 2023-2024” tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penelitian skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan. Penelitian skripsi ini merupakan sebuah hasil akhir dari runtutan proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di UIN Walisongo Semarang. Selama penyusunannya, penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak secara moral dan materiil. Sehingga akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terima kasih begitu besar kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi dan menyelesaikan studi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. Imam Yahya, M.Ag telah memberikan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si sekaligus Dosen Pembimbing skripsi penulis, atas ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, saran, kritik dan motivasi untuk penulis mampu menyelesaikan skripsi.
4. Segenap jajaran Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bermacam motivasi sehingga penulis dapat mengimplementasikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi.
5. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu Penulis yang selalu dibanggakan, Bapak Muhammad Nazim, B.Sc dan Ibu Sunarti; Kakak Ir. Fahd Nazim, S.T., M.MT.; Kakak Ipar Imelda Larasati, S.K.M.; serta Keponakan Nazeela Fatma Mauzara Shazifa atas segala dukungan semangat, saran, kritik dan motivasi moral, etika, kepercayaan diri yang tak terhingga untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Seseorang dengan NIM 1006107012 merupakan sosok yang dengan setia senantiasa mendampingi, menemani, memberikan saran, serta membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman Kelas Ilmu Politik A angkatan 2021 telah memberikan kesan yang berarti bagi penulis dalam proses saling mengenal antar individu dari latar belakang daerah yang beragam, sehingga membentuk relasi yang luas
9. Teman terdekat Denis Afri Endriawan, Siti Hotijah, Aura Maliga, Rahmadhanar Mufti Syifa, Annisaturrakhillah Firdaus, senantiasa kebersamaian selama kegiatan perkuliahan, rekan healing, ketawa bersama, nongkrong bersama membuat penulis berkesan menjalani perkuliahan Semarang.
10. Organisasi internal DEMA FISIP 2024 memberikan kesempatan saya untuk berproses bersama belajar tentang berorganisasi yang kelak akan bermanfaat bagi penulis.
11. Paguyuban Walisongo Campus Ambassador telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertumbuh dan berproses bersama menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sangat senang dan bersyukur dapat menjadi bagian dari paguyuban ini, serta berharap semoga kelak dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
12. Teman PPL Siti Hotijah, Alif Maulana Hasyim, dan Zidana Zianida terima kasih sudah bekerjasama untuk memenuhi PPL FISIP selama 45 Hari lamanya. Memberikan kesan baik nama kita ,Universitas, dan Pemerintahan Kota Semarang.
13. Teman KKN Bintang Rifqi A, Zahrotun Rizqiyah, Umi Kultsum, Putri Durrotul , Habibur Rifqi, Annisa Firdaus, Rahmadhanar Mufti, Anisa Zulfa, Alifiya Nur F, Gaiska Meindieta Muharam, Azizah Salsabilla, Galuh Meliana , Dimas Rizki ,Zulvia Arifatun, terima kasih atas tenaga, pikiran, inovasi dan kreatif menyelesaikan KKN 45 Hari, memberikan kesan yang baik untuk Desa Satriyan, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Kelompok kita sendiri kepada Universitas.
14. Kepada pihak pihak yang di belakang layar mendoakan jarak jauh untuk penulis ini adalah hasilnya penulis selesai menulis dengan baik untuk bisa di sidangkan.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas tulisan ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Sekian.

Semarang, 26 Mei 2025
Penulis

Ahad Faisal Nazim
NIM : 2106016035

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Nazim, B.Sc., dan Ibu Sunarti, yang telah membimbing dan mendidik saya hingga dapat menapaki jenjang perguruan tinggi negeri. Doa, kesehatan, kelancaran, serta motivasi tanpa henti dari mereka senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan saya.

MOTTO

A winner is someone who gets up one more time when he is knocked down

Kim Hanbin

(Exs Boyband iKON)

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

“barang siapa bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil”

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi wacana solidaritas digital masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina melalui tagar *#FreePalestine* di media sosial X (sebelumnya Twitter) selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya solidaritas digital dalam konteks konflik global dan bagaimana masyarakat Indonesia merespons isu Palestina. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang mencakup analisis dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial. Data primer diperoleh dari unggahan, komentar, dan interaksi warganet di media sosial X, serta data sekunder dari literatur akademik, arsip digital, dan berita daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X dibentuk melalui penggunaan bahasa emosional dan simbol visual. Istilah seperti "penjajahan" dan "perlawanan" sering muncul, menciptakan pemisahan antara pelaku dan korban. Data menunjukkan bahwa tagar *#FreePalestine* digunakan lebih dari 50 juta kali secara global, dengan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keterlibatan tertinggi. Selain itu, struktur diskursif dalam wacana *#FreePalestine* di media sosial X menciptakan polarisasi opini publik terhadap konflik Hamas-Israel. Narasi pro-Palestina yang kuat sering kali berhadapan dengan narasi yang mendukung Israel, menghasilkan ketegangan di antara pengguna. Data menunjukkan bahwa warganet cenderung mengelompokkan diri ke dalam posisi yang ekstrem, baik sebagai pendukung maupun penentang, yang memperkuat batasan sosial dan politik. Sementara praktik sosial dalam wacana *#FreePalestine* di media sosial X membentuk identitas politik masyarakat Indonesia melalui interaksi kolektif yang kuat. Melalui unggahan, komentar, dan penggunaan tagar, warganet mengekspresikan solidaritas yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga politis. Identitas politik ini terbangun dari kesamaan nilai kemanusiaan dan keagamaan, di mana dukungan terhadap Palestina dipandang sebagai tanggung jawab moral. Temuan ini menunjukkan bahwa solidaritas digital berperan penting dalam memperkuat kesadaran kolektif dan mobilisasi masyarakat Indonesia terhadap isu-isu kemanusiaan global, serta menciptakan tantangan dalam dialog terbuka dan pemahaman yang lebih inklusif mengenai isu-isu kompleks ini.

Kata Kunci: Solidaritas Digital, *#FreePalestine*, Media Sosial X, Analisis Wacana Kritis, Politik, Palestina

ABSTRACT

This study examines the construction of digital solidarity discourse among Indonesian society regarding the Palestinian issue through the hashtag *#FreePalestine* on social media platform X (formerly Twitter) during the period from October 2023 to February 2024. The background of this study focuses on the importance of digital solidarity in the context of global conflicts and how Indonesian society responds to the Palestinian issue. The approach used is descriptive qualitative with Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, which includes analysis of textual dimensions, discursive practices, and social practices. Primary data was obtained from posts, comments, and interactions of netizens on social media X, as well as secondary data from academic literature, digital archives, and online news. The results of the study show that the *#FreePalestine* digital solidarity discourse on social media X is shaped through the use of emotional language and visual symbols. Terms such as 'occupation' and 'resistance' frequently appear, creating a division between perpetrators and victims. Data shows that the *#FreePalestine* hashtag has been used more than 50 million times globally, with Indonesia being one of the countries with the highest engagement. Additionally, the discursive structure within the *#FreePalestine* discourse on social media platform X creates polarisation of public opinion regarding the Hamas-Israel conflict. Strong pro-Palestinian narratives often clash with those supporting Israel, leading to tension among users. Data indicates that netizens tend to align themselves with extreme positions, either as supporters or opponents, reinforcing social and political boundaries. Meanwhile, social practices in the *#FreePalestine* discourse on social media X shape the political identity of Indonesian society through strong collective interactions. Through posts, comments, and the use of hashtags, netizens express solidarity that is not only emotional but also political. This political identity is built on shared humanistic and religious values, where support for Palestine is seen as a moral responsibility. These findings indicate that digital solidarity plays an important role in strengthening collective awareness and mobilising Indonesian society on global humanitarian issues, as well as creating challenges in open dialogue and more inclusive understanding of these complex issues.

Keywords: Digital Solidarity, *#FreePalestine*, Social Media X, Critical Discourse Analysis, Politics, Palestine

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Politik Solidaritas	7
2. Wacana Publik dalam Media Sosial terkait Konflik Hamas dan Israel.....	11
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data	21
BAB II KERANGKA TEORI.....	23
A. Definisi Konseptual.....	23
1. Solidaritas Digital.....	23
2. Wacana.....	32

3. Identitas Politik	38
4. Polarisasi Opini Publik	45
B. Kerangka Teori Norman Fairclough: Analisis Wacana Kritis (AWK).....	49
1. Tiga Dimensi Analisis Wacana Kritis.....	49
2. Relevansi Fairclough dalam Studi Wacana Digital	57
C. Konsep Politik Solidaritas.....	59
1. Solidaritas Politik sebagai Aksi Kolektif.....	59
D. Kerangka Pemikiran.....	61
BAB III POTRET OBJEK PENELITIAN	63
A. Konflik Hamas-Israel 2023-2024	63
B. Masyarakat Indonesia dalam Konteks Isu Palestina	70
C. Media Sosial X sebagai Ruang Wacana Publik	74
D. Hashtag <i>#FreePalestine</i> sebagai Praktik Solidaritas Digital	81
BAB IV WACANA TEKS DAN NARASI <i>#FREEMPALESTINE</i>	86
A. Struktur Narasi Dominan dalam Wacana Solidaritas	86
1. Narasi “Penjajahan” Dan “Perlawanan”	86
2. Narasi Keagamaan Vs Narasi Kemanusiaan.....	91
3. Narasi “Double Standard” Terhadap Dunia Internasional.....	97
B. Pilihan Bahasa, Simbol, dan Framing	103
1. Penggunaan Metafora, Diksi Emosional, dan Bahasa Moral	103
2. Visualisasi Simbol	106
3. Framing Media Sosial.....	114
C. Diskursus Alternatif dan Tantangan Narasi	117
1. Narasi Pro-Israel dan Kontra-Solidaritas.....	117
2. Resistensi Terhadap Polarisasi dan Suara Moderat	123
3. Strategi Debunking dan Fact-Checking Oleh Pengguna (#). 129	
BAB V PRAKTIK SOSIAL DAN IDENTITAS POLITIK DALAM WACANA	136
A. Solidaritas Digital sebagai Praktik Sosial Kolektif.....	136
1. Gerakan Organik VS Gerakan Terorganisir	136
2. Peran Komunitas Digital dan Aktor-Aktor Kunci.....	139

3. Perilaku Partisipatif: Like, Share, dan Kampanye Donasi ...	141
B. Pembentukan Identitas Politik Digital.....	144
1. Identitas Keagamaan, Nasionalisme, dan Kemanusiaan	144
2. Proyeksi Nilai-Nilai Ideologis Dalam Wacana	148
3. Identifikasi Versus Diferensiasi	151
C. Polarisasi dan Fragmentasi Opini Publik	154
1. Kontestasi Wacana	154
2. Dinamika Perdebatan	157
3. Implikasi Sosial dan Politik Dari Polarisasi Digital.....	161
BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP.....	165
A. Kesimpulan.....	165
B. Keterbatasan Penelitian dan Usulan Penelitian Lanjutan.....	166
C. Usulan Penelitian Lanjutan.....	167
DAFTAR PUSTAKA	168
LAMPIRAN	173
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Tiga Dimensi Analisis Wacana Kritis	51
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	61
Gambar 4. 1 Sumber: Akun X @marjinkiri	87
Gambar 4. 2 Sumber: Akun X @MariaAlKaff_	89
Gambar 4. 3 Sumber: Akun X @InsiderWorld	93
Gambar 4. 4 Sumber: Akun X @akuntwiter968	95
Gambar 4. 5 Sumber: Akun X @FreePalestine	98
Gambar 4. 6 Sumber: Akun X @Paihaly_5	101
Gambar 4. 7 Sumber: Akun X @OmJ_ JeNggot.....	104
Gambar 4. 8 Sumber: Akun X @anfarizzat	108
Gambar 4. 9 Sumber: Akun X @kleponklepon.....	110
Gambar 4. 10 Sumber: Akun X @InsiderWorld_1	112
Gambar 4. 11 Sumber: Akun X @ Basheera_Putry	115
Gambar 4. 12 Sumber: Akun X @Muhammad_Saewad	118
Gambar 4. 13 Sumber: Akun X @PPQSI_	120
Gambar 4. 14 Sumber: Akun X @MariaAlkaff_	124
Gambar 4. 15 Sumber: Akun X @Silviamihan	127
Gambar 4. 16 Sumber: Akun X @DebryChrisW	130
Gambar 4. 17 Sumber: Akun X @tech4palestine.....	133
Gambar 4. 18 Sumber: Akun X @IndonesiaGelap.....	137
Gambar 4. 19 Sumber: Akun X @DFighter___	138
Gambar 4. 20 Sumber: Akun X @UusRsd	140
Gambar 4. 21 Sumber: Akun X @numanmazlan	145
Gambar 4. 22 Sumber: Akun X @bonnietriyana.....	146
Gambar 4. 23 Sumber: Akun X @jasukegf5.....	146
Gambar 4. 24 Sumber: Akun X @efranzadfallah2.....	149
Gambar 4. 25 Sumber: Akun X @Hilmi28.....	152
Gambar 4. 26 Sumber: Akun X @neohistoria_id.....	152
Gambar 4. 27 Sumber: Akun X @lilaccountz.....	155
Gambar 4. 28 Sumber: Akun X @ARIBPalestina.....	155
Gambar 4. 29 Sumber: Akun X @Hilmi28.....	156
Gambar 4. 30 Sumber: Akun X @fitriadiiw	156
Gambar 4. 31 Sumber: Akun X @AnggiCartwheel	158
Gambar 4. 32 Sumber: Akun X @jek___	159
Gambar 4. 33 Sumber: Akun X @neohistoria_id.....	161
Gambar 4. 34 Sumber: Akun X @salimafillah.....	162
Gambar 4. 35 Sumber: Akun X @neohistoria_id.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Hamas-Israel merupakan bentuk dari ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Akar konflik ini dapat ditelusuri dari perseteruan historis terkait klaim teritorial, identitas nasional, dan persoalan keamanan yang kompleks antara bangsa Palestina dan Israel (Tessler 2020). Pada Oktober 2023, konflik ini memasuki babak baru dengan serangan Hamas ke wilayah Israel yang kemudian direspon dengan operasi militer berskala besar oleh Israel di Jalur Gaza. Operasi militer tersebut mengakibatkan krisis kemanusiaan yang signifikan, dengan ribuan korban jiwa dari kalangan warga sipil dan kerusakan infrastruktur yang massif (Fink 2023). Konflik ini tidak hanya menjadi persoalan regional tetapi telah berevolusi menjadi isu global yang menarik perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar.

Dinamika konflik Hamas-Israel semakin kompleks dengan adanya dimensi geopolitik dan diplomatik internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional menunjukkan sikap yang beragam terhadap konflik ini, mulai dari dukungan eksplisit terhadap salah satu pihak hingga imbauan untuk gencatan senjata dan penyelesaian konflik secara damai (Hasan 2022). Indonesia, sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, memiliki posisi yang jelas dalam konflik ini, baik di level kebijakan luar negeri maupun sentimen masyarakatnya. Sikap Indonesia ini tercermin dalam aktivitas diplomatiknya di forum internasional seperti PBB dan OKI, serta berbagai bentuk dukungan politik dan kemanusiaan yang diberikan kepada Palestina (Kementrian Luar Negeri RI 2023).

Era digital dan kehadiran media sosial telah mentransformasi cara konflik global seperti Hamas-Israel dipersepsikan, didiskusikan, dan

disebarluaskan. Platform seperti X menjadi arena pertukaran informasi, pembentukan opini, dan mobilisasi dukungan yang signifikan (Siapera 2022). Hashtag atau tagar *#FreePalestine* merupakan salah satu contoh nyata dari gerakan sosial yang memperoleh daya tarik global melalui platform media sosial. Warga Palestina sendiri telah lama menggunakan media sosial sebagai alat aktivisme (Cervi & Divon 2023). Hashtag ini telah menjadi simbol perjuangan dan solidaritas internasional terhadap rakyat Palestina dalam menghadapi konflik berkepanjangan dengan Israel di beberapa wilayahnya. *#FreePalestine* merupakan bentuk dukungan yang muncul dari kepedulian kemanusiaan yang tulus terhadap rakyat di Gaza Palestina (Eugene Alexander Donnini 2024).

Penggunaan tema fantasi dan simbol-simbol dalam ekspresi solidaritas di media sosial juga menjadi fenomena yang menarik. Misalnya, emoji semangka telah digunakan sebagai simbol perlawanan Palestina, menghindari sensor yang diterapkan oleh platform media sosial terhadap konten pro-Palestina (Morgan Sung 2023). Selain itu, emoji hati berwarna hijau dan burung merpati sering digunakan untuk menunjukkan solidaritas dan perdamaian. Penggunaan simbol-simbol ini tidak hanya terbatas pada ekspresi simbolik tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun narasi kolektif dan memobilisasi aksi politik. Dalam konteks ini, penelitian tentang penggunaan emoji dalam komunikasi politik menunjukkan bahwa emoji dapat digunakan untuk menarik perhatian dan mempertahankan penampilan serius sambil menyampaikan pesan yang kuat (Susilawati & Christin 2024). Selain itu, tema fantasi dalam bentuk komentar di platform digital seperti YouTube dapat membentuk persepsi publik dan memperkuat dukungan terhadap gerakan sosial, seperti yg ditemukan dalam penelitian tentang komentar donasi Palestina (Wurst et al 2023).

Tagar *#FreePalestine* merupakan manifestasi nyata dari politik solidaritas di era digital, di mana media sosial menjadi platform utama untuk menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Melalui hashtag seperti *#FreePalestine* masyarakat global termasuk Indonesia dapat

mengekspresikan solidaritas, berbagi informasi, dan membangun narasi kolektif terkait konflik yang sedang berlangsung. Data menunjukkan bahwa dalam pada periode Oktober 2023 hingga Februari 2024, hashtag *#FreePalestine* telah digunakan lebih dari 50 juta kali di platform X secara global, dengan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat engagement tertinggi (Annur 2024). Aktivisme daring ini tidak hanya terbatas pada ekspresi simbolik, tetapi juga mencakup upaya penggalangan dana, petisi online, dan kampanye untuk mempengaruhi opini publik serta kebijakan pemerintah terkait isu Palestina (Sampson et al 2018). Dengan demikian, *#FreePalestine* menjadi contoh bagaimana media sosial memfasilitasi pembentukan kesadaran kolektif dan mobilisasi massa lintas batas negara dalam mendukung isu-isu kemanusiaan dan keadilan global.

Di Indonesia, media sosial X menjadi salah satu platform utama dalam ekspresi solidaritas dan pembentukan wacana terkait konflik Hamas-Israel. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh politik, figur publik, akademisi, aktivis, hingga masyarakat umum, aktif menggunakan platform ini untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap konflik (Nugroho 2021). Wacana yang berkembang sangat beragam, mencerminkan kompleksitas sosial-politik-religius masyarakat Indonesia, meskipun secara umum menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap Palestina. Analisis awal terhadap trending topik di X Indonesia sepanjang periode konflik menunjukkan dominasi hashtag pro-Palestina yang konsisten menduduki posisi teratas, mengindikasikan tingginya perhatian dan solidaritas warganet Indonesia (Kominfo 2023). Namun, perlu dicatat bahwa ekspresi solidaritas di media sosial juga diiringi dengan fenomena polarisasi, disinformasi, dan pembentukan echo chambers yang mempersempit ruang diskusi yang sehat (Pariser 2011). Algoritma platform media sosial yang cenderung menampilkan konten sesuai preferensi pengguna seringkali memperkuat bias yang ada dan memperdalam segregasi opini (Alviani & Gusnita 2018).

Pentingnya wacana dalam konteks konflik politik global seperti Hamas-Israel tidak dapat diabaikan. Wacana tidak hanya merefleksikan realitas

tetapi juga membentuk dan mengkonstruksi realitas tersebut (Fairclough 2010). Melalui penggunaan bahasa, simbol, dan narasi tertentu, wacana memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi publik, membangun identitas kolektif, serta memobilisasi aksi politik. Dalam konflik Hamas-Israel, wacana yang dominan di media sosial turut menentukan bagaimana konflik ini dipahami, direspon, dan dinegosiasikan oleh masyarakat Indonesia. Analisis terhadap wacana yang berkembang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana solidaritas politik dikonstruksi, dipertukarkan, dan diperdebatkan dalam ruang digital, serta bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap sikap politik masyarakat Indonesia baik secara domestik maupun internasional.

Kajian mengenai analisis wacana kritis (AWK) dalam media sosial telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Fairclough (2010) menekankan pentingnya memahami wacana sebagai praktik sosial yang dipengaruhi dan memengaruhi struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks media sosial, Pratiwi et al (2021) menjelaskan bahwa wacana digital memiliki karakteristik unik yang dibentuk oleh interaksi antara teknologi, pengguna, dan konteks sosial-politik. Studi yang dilakukan oleh Khoirun Nisa (2022) menunjukkan bagaimana media sosial telah mengubah dinamika kekuasaan dalam produksi dan konsumsi wacana, memungkinkan suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan untuk mendapatkan platform. Sementara itu, penelitian Michele Zappavigna (2018) berfokus pada bagaimana hashtag di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai pengorganisasi konten tetapi juga sebagai alat pembentuk komunitas dan identitas kolektif.

Di Indonesia, beberapa penelitian telah mengkaji penggunaan analisis wacana kritis dalam mengexaminasi isu-isu sosial dan politik di media sosial. Lim (2017) menganalisis bagaimana media sosial digunakan dalam mobilisasi politik selama Pemilu 2014, sementara Arifin (2019) meneliti konstruksi identitas keislaman dalam wacana digital di Indonesia. Terkait konflik internasional, Nugroho (2021) mengkaji respons warganet Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel, namun belum secara spesifik menggunakan

pendekatan AWK untuk menganalisis wacana solidaritas yang berkembang. Penelitian Siahaan et al (2024) mulai mengintegrasikan AWK dalam analisis media sosial terkait isu global, namun masih terdapat kesenjangan dalam konteks spesifik konflik Hamas-Israel dan gerakan *#FreePalestine* di platform X dalam periode 2023-2024.

Penelitian ini muncul karena masih kurangnya penelitian tentang bagaimana masyarakat Indonesia menunjukkan dukungan solidaritas di media sosial X terkait konflik Hamas-Israel, khususnya pada tahun 2023-2024. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana dukungan terhadap Palestina diungkapkan melalui bahasa, simbol, dan narasi yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana cara penyampaian dukungan tersebut mencerminkan kondisi sosial dan politik di Indonesia. Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis dari Fairclough, penelitian ini bertujuan untuk memahami dukungan digital ini dari sudut pandang politik, ideologi, dan budaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, aktivis, dan akademisi tentang bagaimana solidaritas politik berkembang di Indonesia, serta membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan media sosial dalam menyikapi isu-isu global.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana wacana solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X dikonstruksi oleh masyarakat Indonesia pada periode 2023-2024?
2. Bagaimana struktur diskursif dalam wacana *#FreePalestine* di media sosial X menciptakan polarisasi opini publik terhadap konflik Hamas-Israel?
3. Bagaimana praktik sosial dalam wacana *#FreePalestine* di media sosial X membentuk identitas politik masyarakat Indonesia terkait isu Palestina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana penggunaan bahasa, simbol, dan narasi yang dominan dalam wacana *#FreePalestine* di media sosial X oleh masyarakat Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi bagaimana struktur diskursif dalam wacana *#FreePalestine* berkontribusi terhadap polarisasi opini publik terkait konflik Hamas-Israel.
3. Untuk menjelaskan bagaimana praktik sosial dalam wacana *#FreePalestine* membentuk identitas politik masyarakat Indonesia terkait isu Palestina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang politik solidaritas dalam konteks digital, khususnya di Indonesia. Dengan mengkaji wacana yang berkembang di media sosial, penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai pola komunikasi politik, dinamika diskursif, serta pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik terkait isu global.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai kajian analisis wacana dalam permasalahan konflik Hamas-Israel.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai pemicu bagi peneliti lain untuk bersikap kreatif dan kritis dalam menyikapi suatu perkembangan analisis wacana kritis.
- b. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam isu-isu kemanusiaan dan politik, mendorong individu untuk lebih aktif berkontribusi dalam diskusi dan aksi nyata.

- c. Mendorong pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merujuk kepada keterkaitan suatu penelitian dengan studi-studi terdahulu yang relevan. Tinjauan Pustaka menurut John W. Creswell, terdiri dari kumpulan beberapa jurnal, artikel, buku, dan dokumen lain yang di mana memberikan suatu penjelasan mengenai teori dan informasi masa lalu dan saat ini. Tinjauan Pustaka disusun dengan mempertimbangkan topik dan dokumen yang diperlukan untuk proposal penelitian.

1. Politik Solidaritas

Literatur yang membahas mengenai Politik Solidaritas telah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu yakni Bayertz (2022), Adolph (2016), Sampson et al. (2018), (Esa Perdana 2018), dan Kristianto et al (2021). Hal ini dapat dilihat pada buku *Affect and Social Media: Emotion, Mediation, Anxiety and Contagion* milik Sampson et al (2018) yang menjelaskan bahwasannya politik solidaritas merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana kelompok atau individu membangun kesatuan dan dukungan dalam menghadapi ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi. Solidaritas dalam politik dapat berfungsi sebagai strategi untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan, membangun kesadaran kolektif, serta menciptakan gerakan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam sejarahnya, solidaritas politik sering kali menjadi dasar pergerakan sosial besar, seperti gerakan hak sipil, feminisme, hingga perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dalam konteks digital, politik solidaritas mengalami transformasi dengan adanya media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi dan mobilisasi massa secara lebih cepat dan luas. Platform digital seperti X, Instagram, dan TikTok telah menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan dukungan, berbagi narasi perjuangan, serta menggalang aksi kolektif melalui kampanye daring. Hashtag activism, petisi online, dan penggalangan dana digital merupakan contoh bagaimana politik solidaritas berkembang di era digital. Akan tetapi, politik solidaritas di ruang digital

juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah fenomena clicktivism atau slacktivism, di mana dukungan politik sering kali berhenti pada level simbolik, seperti sekadar membagikan postingan atau mengganti foto profil, tanpa tindakan nyata di dunia offline. Selain itu, polarisasi politik di media sosial sering kali memperumit upaya membangun solidaritas lintas kelompok, karena algoritma platform cenderung memperkuat opini yang sudah ada dalam kelompok tertentu, menciptakan echo chamber yang membatasi dialog yang lebih luas.

Dalam bukunya yang berjudul *solidarity*, Bayertz (2022) menjelaskan bahwa solidaritas dalam politik tidak hanya melibatkan aspek emosional dan moral, tetapi juga memiliki dimensi struktural yang berkaitan dengan kebijakan publik dan tindakan kolektif. Solidaritas politik, dalam pengertian ini lebih dari sekadar perasaan simpati atau empati terhadap kelompok yang mengalami ketidakadilan. Ia juga menyangkut komitmen untuk mendukung kebijakan dan tindakan yang dapat mengubah struktur sosial yang mendasari ketidakadilan tersebut. Oleh karena itu, solidaritas politik tidak hanya terlihat dalam bentuk ekspresi dukungan, tetapi juga dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan, undang-undang, dan struktur kekuasaan yang ada. Ini bisa terlihat, misalnya, dalam gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak pekerja, hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, atau bahkan perjuangan untuk perlindungan lingkungan hidup yang sering kali bertentangan dengan kepentingan ekonomi dominan. Solidaritas dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari dukungan terhadap kelompok yang terpinggirkan, gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah tatanan sosial-politik, hingga aksi protes yang digelar di ruang digital. Gerakan-gerakan ini seringkali berakar dari rasa ketidakpuasan terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat dan berkembang dalam lingkungan yang memiliki kesamaan nilai dan tujuan. Dalam konteks digital, solidaritas politik sering terwujud dalam gerakan viral yang memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan pesan solidaritas dan memperkuat jaringan dukungan, seperti yang terlihat dalam

kampanye-kampanye #MeToo, Black Lives Matter, atau gerakan pro-demokrasi di berbagai belahan dunia.

Dengan menghubungkan solidaritas politik dengan gerakan boikot produk pro-Israel di Indonesia menciptakan fenomena multidimensi yang kompleks. Hal ini dapat dilihat pada studi yang berjudul *“Peran Media Sosial dalam Gerakan Solidaritas Boikot Produk Pro-Israel”* oleh Adolph (2016) boikot ini dapat memperkuat solidaritas nasional dan mendukung produk lokal, namun menghadapi tantangan seperti perbedaan kemampuan ekonomi, ketergantungan pada rantai pasok global, dan tekanan pada bisnis kecil akibat perubahan pola konsumsi. Secara politik, gerakan ini mengubah dinamika hubungan internasional Indonesia, terutama terkait konflik Timur Tengah. Fatwa MUI tentang boikot produk Israel, misalnya, menjadi landasan religius bagi sebagian masyarakat, sekaligus memicu perdebatan antara otoritas keagamaan dan kebijakan ekonomi serta menimbulkan diskusi mengenai penerapan nilai Pancasila. Kontroversi ini pun mengundang evaluasi dampak pada kohesi sosial, mengingat risiko polarisasi dan segregasi yang diperparah oleh peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan disinformasi. Gerakan tersebut telah berkembang dari sekadar aksi ekonomi menjadi identitas budaya dan moral, sehingga dibutuhkan pendekatan holistik memadukan aspek sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang bagi Indonesia.

Media sosial menjadi sarana utama dalam menyuarakan solidaritas, yang bahkan memperoleh resonansi positif dari komunitas internasional hal ini dipaparkan oleh Esa Perdana (2018) dengan kajian yang berjudul *“Sepakbola Sebagai Media Solidaritas Politik Bagi Supporter Indonesia”* yang di mana solidaritas masyarakat Indonesia terhadap isu-isu kemanusiaan global, khususnya terkait konflik yang melibatkan komunitas Muslim, telah termanifestasi secara signifikan dalam berbagai bentuk dukungan, termasuk melalui media sosial dan aksi suporter sepak bola, di mana penelitian menunjukkan bahwa pesan-pesan solidaritas yang

disampaikan oleh suporter Indonesia telah mendapat respon positif dari masyarakat Palestina dan Rohingya, yang dibuktikan melalui berbagai ungkapan terima kasih dalam bentuk visual yang dibagikan kepada negara dan masyarakat Indonesia, mencerminkan efektivitas politik solidaritas digital dalam membangun hubungan dan dukungan antarmanusia lintas batas geografis.

Peran opinion leader sangat penting dalam menyebarkan pesan dan meningkatkan partisipasi publik. Kristianto et al. (2021) dalam bukunya yang berjudul “*Media Sosial dan Connective Action: Studi Kasus Penggunaan Twitter sebagai Ruang Solidaritas selama Pandemi COVID-19*” yang mengkaji bahwa meski aksi solidaritas muncul bersamaan dengan narasi yang mirip, aksi tersebut dilakukan secara individual oleh berbagai pihak seperti individu, organisasi, dan komunitas tanpa hubungan langsung satu sama lain. Tidak semua aksi ini mendapat respon tinggi dari pengguna media sosial. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa opinion leader memegang peranan krusial dalam mendorong dan mempengaruhi aksi solidaritas, yang pengaruhnya ditentukan oleh jumlah pengikut, retweet, dan mention. Temuan ini mengungkap cara kerja solidaritas digital dan peran utama opinion leader dalam mengarahkan gerakan tersebut.

Berdasarkan elaborasi tinjauan literatur yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa politik solidaritas di ruang digital telah mentransformasi ekspresi dukungan masyarakat terhadap isu-isu global, khususnya konflik Palestina-Israel, melalui pemanfaatan media sosial sebagai ruang artikulasi dan mobilisasi. Meski sudah banyak penelitian, masih ada celah besar dalam analisis wacana gerakan *#FreePalestine* di platform X selama konflik Hamas-Israel pada 2023-2024. Penelitian belum mendalami narasi yang dibangun oleh masyarakat Indonesia, peran opinion leader dalam membentuk diskursus, serta hubungan antara clicktivism dan aktivisme nyata. Penting untuk memahami apakah solidaritas digital membawa perubahan nyata atau hanya bersifat simbolik, terutama terkait fatwa MUI tentang boikot produk Israel, penerapan nilai Pancasila dalam

menghadapi konflik global, serta dampak politik-ekonomi gerakan solidaritas digital. Pemahaman ini sangat penting untuk studi komunikasi politik di era digital dan juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri serta strategi diplomasi publik Indonesia.

2. Wacana Publik dalam Media Sosial terkait Konflik Hamas dan Israel

Literatur yang membahas mengenai Wacana Publik dalam Media Sosial terkait Konflik Hamas dan Israel telah dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu yakni Pokhrel (2024), Susilawati & Christin (2024), Azizah et al (2024), Sarah (2024), dan (Ni'am 2024). Kajian milik Pokhrel (2024) yang berjudul "*Bentuk dan isi pesan kampanye solidaritas palestina di instagram (analisis isi pada akun instagram @bdsnationalcommittee)*" menjelaskan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye BDS lebih mengandalkan strategi persuasif untuk mengajak audiens terlibat, bukan hanya sekadar memberikan informasi atau memaksa. Pesan kampanye menitikberatkan pada sanksi (76%), dibandingkan boikot (15%) dan divestasi (9%), artinya fokus utamanya adalah memberikan tekanan melalui sanksi terhadap pihak yang mendukung Israel di bidang ekonomi, politik, dan sosial sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Analisis juga menemukan bahwa kombinasi pesan persuasif dan sanksi adalah strategi yang paling sering digunakan (47%). Dengan pendekatan yang lembut namun menekankan urgensi sanksi, kampanye ini bertujuan membangun kesadaran publik dan mengajak partisipasi aktif tanpa paksaan langsung. Selain itu, kampanye digital melalui akun @bdsnationalcommittee fokus pada pembentukan opini publik dan mendorong tindakan nyata yang diterima oleh audiens luas.

Hal tersebut sejalan dengan kajian milik Susilawati dan Christin (2024) yang berjudul "*Analisis Tema Fantasi Komentar Donasi Palestina Pada Akun Youtube Nusantara Palestina Center*" menunjukkan bahwa analisis jaringan dan tema fantasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana komunikasi dan interaksi yang terjadi di media sosial berperan dalam memperkuat serta memperluas dukungan

terhadap gerakan sosial, khususnya dalam konteks penggalangan donasi untuk Palestina. Penelitian ini mengungkap bagaimana hubungan antaraktor dalam jaringan media sosial membentuk ekosistem komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi, ajakan, serta narasi yang mendukung gerakan solidaritas. Aktor-aktor kunci dalam jaringan ini berperan sebagai penghubung utama yang tidak hanya menyebarkan pesan tetapi juga membangun resonansi emosional melalui tema-tema fantasi yang berkaitan dengan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh para pendukung gerakan. Tema fantasi, dalam konteks ini, berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas kolektif, menyatukan persepsi, serta membangun solidaritas yang semakin kokoh melalui simbol, cerita, atau narasi yang menggugah empati dan rasa keterikatan terhadap perjuangan Palestina.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al (2024) "*Mobilisasi Dukungan dan Simpati Publik Terhadap Palestina pada Akun @Erlanishere di Twitter*" memaparkan mengenai akun instagram @erlanishere berperan penting dalam mengumpulkan dukungan untuk Palestina dengan strategi komunikasi yang berfokus pada emosi. Akun ini menggunakan bahasa yang menyentuh hati, sehingga membuat pengikutnya merasa empati, marah, dan prihatin terhadap penderitaan rakyat Palestina. Selain itu, akun ini menampilkan gambar dan video kekerasan yang menggugah emosi, sehingga meningkatkan kesadaran akan situasi mendesak di Palestina. Tidak hanya itu, @erlanishere juga rutin menyajikan fakta-fakta penting tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan internasional terkait konflik Israel-Palestina, yang membantu menguatkan argumen dan mendidik pengikutnya. Dengan menggabungkan pendekatan emosional, visual, dan data, akun ini berhasil memobilisasi solidaritas global untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Sarah (2024) dalam penelitiannya "*Analisis resepsi khalayak terhadap pesan akun instagram @aresdimahdi dalam aksi #buycut solidaritas palestina*" Dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan pesan dari akun Instagram @aresdimahdi dalam aksi #buycut solidaritas Palestina bervariasi di

kalangan audiens. Tiga informan (Risalah Amar, Azizah Salsa, dan Nabilah Khairiyyah) sepenuhnya setuju dan menilai pesan tersebut sangat bermanfaat, sehingga strategi komunikasi akun ini dianggap efektif. Sementara itu, dua informan lainnya (Annisa dan Arnitia) meskipun menerima pesan positif, memberikan kritik atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun kampanye digital diterima dengan baik, terdapat perbedaan pandangan berdasarkan latar belakang dan pengalaman masing-masing, serta menegaskan bahwa komunikasi digital berperan sebagai ruang dialog aktif di mana audiens menafsirkan dan mengevaluasi pesan yang diterima.

Selain aspek komunikasi dan penerimaan khalayak, kajian milik Ni'am (2024) dengan judul "*Julid fi sabilillah: gerakan virtual solidaritas palestina di indonesia*" yang menunjukkan bahwa gerakan solidaritas digital di media sosial muncul sebagai perlawanan terhadap propaganda Israel (*Hasbara*) dan tumbuh seiring dengan globalisasi yang mempercepat pertukaran informasi. Internet menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mendukung Palestina. Aktivis digital melakukan aksi yang tidak hanya bereaksi, tetapi juga aktif membentuk opini publik melalui kampanye boikot terhadap produk terkait Israel, penyebaran informasi tentang kondisi Palestina, dan serangan terhadap akun yang menyebarkan propaganda pro-Israel. Penelitian juga menunjukkan bahwa faktor agama memainkan peran penting, terutama karena banyak anggota gerakan berasal dari komunitas hijrah dengan pemahaman keislaman yang kuat. Bagi mereka, gerakan ini merupakan bentuk aktivisme politik sekaligus penerapan ajaran Islam tentang persaudaraan dan persatuan umat secara global. Gerakan ini berhasil menggalang dukungan luas, meningkatkan kesadaran internasional mengenai konflik Palestina, dan memperkuat identitas kolektif umat Muslim di era digital, yang menunjukkan dampak nyata solidaritas daring dalam dinamika politik global.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kampanye solidaritas Palestina di media sosial mengandalkan berbagai strategi komunikasi yang beragam, mulai dari penggunaan pesan persuasif sebagai cara utama

membangun keterlibatan audiens, pemanfaatan analisis jaringan untuk memahami pola interaksi dan penyebaran informasi, hingga penggunaan tema fantasi yang membangun identitas kolektif serta memperkuat solidaritas. Selain itu, pendekatan emosional menjadi salah satu strategi yang dominan, dengan penggunaan bahasa yang menggugah perasaan audiens serta visualisasi kekerasan yang memperlihatkan dampak nyata dari konflik, yang bertujuan untuk menciptakan empati dan mendorong aksi nyata seperti donasi atau kampanye boikot. Kampanye digital ini juga menghadirkan dimensi resepsi khalayak yang beragam, di mana audiens dapat menerima pesan secara dominan, melakukan negosiasi, atau bahkan menolak makna yang disampaikan. Di samping itu, solidaritas digital terhadap Palestina juga ditemukan sebagai bagian dari perlawanan terhadap propaganda global yang mendukung narasi tertentu, dengan faktor agama menjadi salah satu pendorong utama keterlibatan aktivis dalam memperjuangkan isu ini sebagai bagian dari persaudaraan dan identitas kolektif.

Meskipun penelitian-penelitian ini telah mengungkap berbagai aspek komunikasi, mobilisasi, dan penerimaan audiens terhadap kampanye solidaritas Palestina di media sosial, masih terdapat celah penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Salah satu aspek yang belum banyak dikaji adalah dinamika perdebatan dan resistensi wacana dalam ruang digital, khususnya bagaimana aktor-aktor yang berseberangan dengan gerakan solidaritas Palestina membentuk kontra-narasi dan strategi komunikasi mereka dalam mempengaruhi opini publik. Selain itu, masih sedikit penelitian yang mendalami bagaimana interaksi antara narasi solidaritas dan kontra-narasi tersebut menciptakan polarisasi di media sosial serta bagaimana algoritma platform digital berperan dalam memperkuat atau menghambat penyebaran wacana tertentu. Aspek lain yang juga belum banyak dibahas adalah efektivitas jangka panjang dari strategi komunikasi yang digunakan dalam kampanye ini, baik dalam memengaruhi kebijakan global, mengubah opini publik secara berkelanjutan, maupun menciptakan dampak nyata yang lebih luas dalam konteks advokasi internasional.

Dengan memahami aspek-aspek ini, penelitian lebih lanjut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana solidaritas digital berkembang dan bagaimana strategi komunikasi dapat lebih dioptimalkan untuk mencapai dampak yang lebih signifikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Wacana Solidaritas Digital *#FreePalestine*: Perspektif Masyarakat Indonesia Di Media Sosial X Terhadap Konflik Hamas Dan Israel 2023-2024" ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang akan dikaji. Penelitian ini menggunakan penyajian data kualitatif yang akan dijabarkan secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan yang diperoleh oleh peneliti, sedangkan analisis wacana kritis merupakan studi bagaimana bahasa merefleksikan dan membentuk kekuasaan serta ideologi melalui analisis teks dan konteks sosialnya. Analisis Wacana Kritis atau *Critical Discourse Analysis* menurut Fairclough (2013) dijelaskan bahwa wacana merupakan praktik sosial yang diproduksi dengan tujuan dan maksud tertentu, serta mencerminkan hubungan kekuasaan dan ideologi dalam konteks sosial.

Fairclough menawarkan empat langkah metode AWK (Fairclough 2010). Pertama, memfokuskan pada suatu 'ketidakberesan sosial', dalam aspek semiotiknya. Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani 'ketidakberesan sosial' itu. Ketiga, mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu 'membutuhkan' ketidakberesan sosial tersebut. Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Berikut ini keempat langkah metode AWK.

Pertama, fokus pada 'ketidakberesan sosial' dalam aspek semiotiknya. Ketidakberesan sosial dipahami sebagai aspek-aspek sistem sosial, bentuk

dan tatanan yang merugikan atau merusak kesejahteraan bersama, yang bisa diperbaiki meski harus melalui perubahan-perubahan radikal dari sistem. Ketidakberesan sosial itu meliputi kemiskinan, ketidaksetaraan, diskriminasi, kurangnya kebebasan atau rasisme. Pemahaman tentang ketidakberesan sosial juga sudah menjadi objek perdebatan, maka AWK memperhitungkannya dalam adu argumen. Dua langkah dalam fokus ketidakberesan sosial ini:

- a. Dalam penelitian ini, topik yang diangkat adalah ketidakberesan sosial yang berkaitan dengan solidaritas digital terhadap isu Palestina, khususnya melalui penggunaan hashtag *#FreePalestine* di media sosial X. Aspek yang didekati mencakup diskriminasi terhadap rakyat Palestina dalam konteks konflik Hamas-Israel, ketidaksetaraan dalam akses informasi dan dukungan internasional, serta rasisme yang muncul dalam narasi pro-Israel di platform digital. Pendekatan lintas ilmu digunakan untuk menganalisis fenomena ini dengan memanfaatkan perspektif semiotika, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi simbol-simbol dan bahasa yang digunakan dalam wacana solidaritas digital, serta mengaitkannya dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika ketidakberesan sosial yang terjadi.
- b. Dalam mengkonstruksi objek penelitian, topik solidaritas digital *#FreePalestine* akan menteoretisasi melalui kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK), yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana wacana ini dibentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek ekonomi global dengan menganalisis bagaimana ketidakberesan sosial, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh rakyat Palestina, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan kebijakan luar negeri negara-negara besar yang mendukung Israel. Selain itu, strategi mikro-ekonomi akan dikaji untuk memahami bagaimana individu dan kelompok di Indonesia

memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk membangun solidaritas dan menggalang dukungan, serta bagaimana tindakan ini berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat Palestina.

Kedua, mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani 'ketidakberesan sosial'. Pada tahap ini, pendekatan terhadap ketidak-beresan sosial ditempuh dengan cara tidak langsung, yaitu dengan menanyakan cara bagaimana kehidupan sosial diorganisir dan distruktur sehingga mencegahnya dari upaya menanganinya. Hal ini butuh analisis tatanan sosial dan satu titik masuk ke analisis menjadi semiotik. Maka perlu menyeleksi dan menganalisis teks-teks yang relevan dan membahas hubungan dialektik antara semiosis dan unsur-unsur sosial lainnya. Ada tiga tahap pada tingkat kedua ini.

Pertama dengan menganalisis hubungan-hubungan dialektik antara semiosis dan unsur-unsur sosial lainnya akan dilakukan dengan mengkaji interaksi antara tatanan wacana dan praktik sosial yang muncul dalam konteks solidaritas digital *#FreePalestine*. Penelitian ini akan meneliti bagaimana teks-teks yang dihasilkan di media sosial X, seperti tweet dan komentar, berfungsi sebagai representasi dari kejadian-kejadian sosial yang lebih luas, termasuk konflik Hamas-Israel dan respons masyarakat Indonesia terhadapnya. Kedua, teks-teks tersebut akan diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian untuk membentuk objek penelitian yang lebih terfokus. Ketiga, melakukan analisis teks, baik analisis interdiskursif maupun analisis linguistik dan semiotik, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana wacana solidaritas digital dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Analisis interdiskursif akan membandingkan genre, wacana, dan gaya yang diartikulasikan dalam teks-teks tersebut, serta mengaitkannya dengan tatanan wacana yang lebih stabil sebagai bagian dari jaringan praktik sosial yang lebih luas (Fairclough 2010).

Ketiga, mengidentifikasi apakah tatanan sosial "membutuhkan" ketidakberesan sosial. Ketidakberesan sosial, seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan yang dialami oleh rakyat Palestina, dapat dianggap melekat pada tatanan sosial yang ada, yang sering kali berfungsi untuk mempertahankan hubungan kekuasaan dan dominasi tertentu. Dalam penelitian ini mengeksplorasi apakah ketidakberesan sosial ini dapat ditangani dalam sistem yang ada atau hanya bisa diatasi melalui perubahan radikal terhadap tatanan sosial tersebut. Dengan menghubungkan antara 'yang faktual' dan 'yang seharusnya', penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa jika tatanan sosial terbukti menghasilkan ketidakberesan sosial yang signifikan, maka hal ini menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan perubahan. Selain itu, dalam analisis wacana konteks solidaritas digital akan mengungkap bagaimana ideologi yang mendasari wacana tersebut berkontribusi pada pembentukan dan pemeliharaan ketidakberesan sosial, serta bagaimana mobilisasi solidaritas dapat menjadi alat untuk menantang struktur kekuasaan yang ada.

Keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan. Analisis ini akan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dalam proses sosial yang ada, seperti mobilisasi masyarakat melalui media sosial, penggalangan dukungan internasional, dan kolaborasi antara berbagai aktor sosial, termasuk aktivis, akademisi, dan pembuat kebijakan. Penelitian ini akan meneliti bagaimana wacana solidaritas digital dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan aksi nyata yang mendukung keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah persepsi publik terhadap isu-isu ketidakberesan sosial, sehingga menciptakan ruang bagi perubahan yang lebih substansial dalam tatanan sosial yang ada.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data dalam sebuah penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Diperoleh melalui pengumpulan unggahan di media sosial X (seperti tweet, thread, komentar, dan respons warganet) yang menggunakan hashtag *#FreePalestine* selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024. Data yang diambil akan disesuaikan dengan temuan peneliti dan akan dikaitkan dengan teori Fairclough yang mencakup tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Dalam hal ini, data akan dikategorikan berdasarkan tema, narasi, dan pola komunikasi yang muncul. Penelitian ini akan fokus pada analisis konten yang relevan dengan diskusi mengenai Palestina, tanpa mengidentifikasi akun-akun tertentu, tetapi tetap mempertimbangkan konteks sosial dan diskursif yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber tidak langsung yang mana berupa dokumentasi dan arsip resmi. Dalam studi ini, penulis menggunakan data sekunder berupa buku, skripsi, thesis, jurnal, dokumen, dan sebagainya. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menunjang hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Non-Partisipatif

Observasi Non-Partisipatif mengamati pola wacana yang berkembang di media sosial X tanpa melakukan interaksi langsung. Observasi ini mencakup analisis berbagai unggahan yang mengandung hashtag *#FreePalestine*, mencatat pola interaksi antar pengguna, serta mengidentifikasi tren yang berkembang di platform X. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami bagaimana pengguna membentuk narasi solidaritas dan bagaimana wacana tersebut berevolusi seiring waktu. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk

mengkaji bagaimana reaksi pengguna terhadap peristiwa penting yang terjadi dalam konflik Hamas-Israel, serta bagaimana diskursus yang berkembang mempengaruhi dinamika sosial dan politik.

Langkah pertama dalam pengumpulan data, yaitu menentukan kriteria data yang dikumpulkan, sudah sesuai dengan tahapan analisis teks. Pada tahap ini, mencari cuitan yang menggunakan *#FreePalestine* pada periode Oktober 2023 hingga Februari 2024 dengan teknik pencarian dan dokumentasi manual melalui *X Advanced Search* yang dikategorikan berdasarkan tema seperti penggunaan bahasa emosional, simbol solidaritas, dan narasi perjuangan. Peneliti mengidentifikasi pola-pola khusus, misalnya penggunaan kata-kata yang menggugah emosi dan simbol-simbol seperti emoji semangka atau bendera Palestina, yang konsisten muncul dalam unggahan dengan hashtag *#FreePalestine*. Dalam kategori ini mencerminkan kecenderungan retorik yang menjadi dasar dalam membangun identitas dan solidaritas digital terhadap isu yang diangkat.

Hasil dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) dari media sosial X yang memuat konten-konten terkait konflik Hamas-Israel tahun 2023–2024, dan menggunakan tagar *#FreePalestine*. Konten-konten yang dipilih merupakan unggahan yang mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia, ditandai dengan jumlah komentar, reaksi (likes), repost, dan keterlibatan pengguna lainnya. Kriteria pemilihan ini bertujuan untuk menangkap representasi wacana solidaritas digital yang paling menonjol dan sering dikomentari oleh warganet Indonesia. Melalui pendekatan ini, data yang dikumpulkan bersifat otentik dan aktual karena langsung diambil dari ruang digital tempat wacana tersebut berkembang. Seluruh tangkapan layar dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola diskursif seperti penggunaan bahasa emosional, simbol solidaritas, dan bentuk partisipasi digital lainnya yang membentuk solidaritas digital dalam konteks konflik tersebut.

Pada analisis hasil selanjutnya diintegrasikan dengan kerangka teori analisis wacana kritis Fairclough. Pada dimensi teks, peneliti menguraikan bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, dan retorika yang digunakan mencerminkan ideologi dan membentuk representasi realitas. Sementara itu, pada dimensi praktik diskursif, fokus diarahkan pada produksi atau cara penyebaran dan interaksi teks di media sosial, serta pada dimensi praktik sosial-budaya, temuan dikaitkan dengan kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi wacana tersebut. Hasil ini mengungkapkan bahwa wacana digital mengenai #FreePalestine di media sosial X menunjukkan kecenderungan kuat dalam menekankan solidaritas melalui bahasa yang penuh emosi, penggunaan simbol visual yang strategis, dan narasi perjuangan yang konsisten. Temuan ini tidak hanya menggambarkan pola-pola linguistik yang ada, tetapi juga menyoroti bagaimana interaksi sosial dan konteks politik turut membentuk wacana tersebut.

b. Dokumentasi

Data dikumpulkan dari arsip digital, berita, dan penelitian relevan untuk memahami perkembangan wacana solidaritas digital di media sosial X. Sumber meliputi publikasi ilmiah, media massa, dan pernyataan resmi organisasi internasional terkait konflik Hamas-Israel. Dokumentasi ini juga membandingkan tren di Indonesia dengan dinamika global untuk memberi perspektif yang lebih luas

4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menganalisis data. Analisis data adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mempelajari lebih lanjut tentang subjek yang diteliti atau menangani topik ilmiah dengan memilih di antara pemahaman yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman. Peneliti menggunakan model analisis wacana kritis Norman Fairclough yang di mana ada 3 dimensi yaitu analisis teks (tekstual), praktik diskursif (*discourse practice*), dan praktik sosial-budaya (*sociocultural practice*).

a. Analisis Teks (*teks*)

Peneliti mengambil data dari media sosial X, seperti unggahan dan komentar *#FreePalestine*, akan dikategorikan berdasarkan bahasa, simbol, dan narasi sebagai strategi retorika. Dalam wacana *#FreePalestine*, bahasa membangun solidaritas dengan membangkitkan emosi, menyalahkan Israel, atau membenarkan perlawanan. Simbol seperti emoji semangka dan bendera Palestina menghindari sensor serta memperkuat identitas kolektif. Narasi dominan menyoroti penderitaan rakyat Palestina, perjuangan melawan penindasan, dan seruan keadilan. Elemen-elemen ini bertujuan memobilisasi dukungan publik dan meningkatkan kesadaran.

b. Praktik Diskursif (*discourse practice*)

Dalam wacana *#FreePalestine*, peneliti melihat interaksi di media sosial X yang menunjukkan pola khas komentar dukungan/kritik, debat, dan penyebaran pesan. Argumen, mulai dari justifikasi tindakan hingga seruan kemanusiaan, disampaikan melalui data, opini, atau emosi. Polarisasi pendapat ini memperkuat solidaritas pendukung Palestina sekaligus memicu konflik yang memengaruhi opini publik Indonesia terkait konflik Hamas-Israel.

c. Praktik Sosial (*sociocultural practice*).

Peneliti melihat bagaimana analisis wacana *#FreePalestine* menunjukkan bahwa respons masyarakat Indonesia terhadap konflik Hamas-Israel dipengaruhi oleh agama, identitas nasional, dan sejarah politik. Hubungan kekuasaan juga mempengaruhi opini publik, serta penelitian ini mengkaji dampak solidaritas tersebut terhadap identitas politik dan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Dengan ini, teori wacana kritis Fairclough memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam membentuk solidaritas politik di ruang digital serta dampaknya terhadap perubahan sosial di Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi Konseptual

1. Solidaritas Digital

1) Pengertian Solidaritas Digital

Solidaritas digital adalah bentuk solidaritas baru yang tumbuh dan berkembang dalam konteks masyarakat jaringan, yaitu masyarakat yang ditandai oleh relasi sosial yang terbentuk, berlangsung, dan dijaga melalui teknologi digital, terutama internet. Dalam bentuk ini, solidaritas tidak lagi hanya bersifat lokal, fisik, atau berbasis kedekatan geografis, tetapi justru melampaui batas-batas tersebut, membuka kemungkinan bagi individu dari berbagai belahan dunia untuk bekerja sama, berbagi informasi, sumber daya, bahkan memperjuangkan tujuan bersama. Menurut Richardson & Wilson (2024) solidaritas digital muncul karena adanya kesadaran kolektif bahwa tantangan-tantangan dunia kontemporer seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis informasi tidak dapat diselesaikan secara individual. Ia memanfaatkan kekuatan jaringan sebagai medium utama untuk mengekspresikan keterhubungan manusia secara aktif, tidak hanya dalam bentuk simbolik, tetapi juga dalam tindakan nyata seperti kontribusi pada proyek open source, kampanye advokasi daring, hingga praktik ekonomi berbasis komunal seperti crowdfunding dan co-production.

Fenomena ini tidak lahir dalam kekosongan, melainkan merupakan respons terhadap krisis legitimasi dan efektivitas lembaga-lembaga sosial konvensional, seperti negara dan pasar. Di saat institusi-institusi ini semakin sulit menjawab kebutuhan masyarakat luas, muncul praktik-praktik partisipatif dan kolaboratif yang lebih terbuka, horizontal, dan egaliter. Nardi (2024) menyampaikan jika solidaritas digital terwujud melalui pembentukan struktur-struktur sosial alternatif yang lebih fleksibel,

seperti commons (sumber daya bersama yang dikelola secara kolektif), assemblies (musyawarah umum non-hierarkis), swarms (aksi spontan terkoordinasi), dan weak networks (jaringan lemah yang mampu menghubungkan banyak individu melalui interaksi kecil namun luas). Masing-masing bentuk ini memperlihatkan bahwa dalam ekosistem digital, solidaritas dapat menjadi kekuatan sosial yang menyatukan individu bukan karena kesamaan identitas, melainkan karena kesamaan tujuan dan nilai bersama yang dijalankan secara sukarela.

Selain sebagai strategi perlawanan terhadap dominasi sistem kapitalisme digital dan penekanan terhadap individualisme ekstrem, solidaritas digital juga mencerminkan perubahan mendasar dalam cara individu membentuk identitas dan memaknai keberadaan sosialnya. Jika dahulu subjektivitas individu lebih ditentukan oleh privasi dan ruang personal (seperti yang dicontohkan oleh praktik membaca dalam budaya cetak), kini identitas personal banyak dibentuk melalui keterlibatan aktif dalam jaringan komunikasi publik (Benu et al. 2024). Partisipasi, ekspresi, dan visibilitas menjadi kunci eksistensi dalam dunia digital. Individu membangun kepercayaan dan kredibilitas tidak melalui isolasi, tetapi melalui keterlibatan terbuka dan rekam jejak interaksi di berbagai platform. Hal ini juga mengindikasikan pergeseran dari individualisme tertutup menuju bentuk baru yang disebut ‘individualisme berjaringan’ (networked individualism), di mana konektivitas justru menjadi sumber utama pembentukan diri.

Tidak bisa diabaikan bahwa solidaritas digital memiliki dimensi struktural yang berkaitan erat dengan perkembangan infrastruktur digital itu sendiri. Infrastruktur ini bukan hanya mencakup teknologi seperti media sosial, platform kolaboratif, dan sistem komunikasi terbuka, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan norma-norma baru yang mendukung kerja sama lintas batas. Berbagai perangkat dan aplikasi baik yang bersifat terbuka seperti

etherpad dan wiki, maupun yang lebih terpusat seperti media sosial arus utama telah memungkinkan munculnya bentuk-bentuk kolaborasi yang sebelumnya sulit dibayangkan (Achmad 2022). Lebih dari itu, solidaritas digital mengandalkan kemampuan untuk saling berbagi informasi, keahlian, dan sumber daya dengan efisien dan merata. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan saling bergantung, keterhubungan menjadi syarat dasar bagi berlangsungnya proses produksi sosial yang tidak lagi bersandar semata-mata pada logika pasar atau birokrasi.

Pada akhirnya, solidaritas digital membuka peluang untuk membangun kembali masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Ia bukanlah utopia, melainkan praktik yang terus diuji dalam berbagai konteks sosial. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan skala mikro dan makro: dari interaksi personal sehari-hari di dunia maya, hingga gerakan global yang menuntut perubahan struktural (Bredthauer, Kuhn, & Buyx 2025). Namun demikian, solidaritas digital juga menyimpan tantangan, seperti persoalan representasi, eksklusi digital, dan dominasi platform komersial yang dapat membatasi kebebasan berekspresi. Meski begitu, potensi transformatifnya tetap besar, terutama jika dikembangkan melalui nilai-nilai keadilan, partisipasi, keterbukaan, dan kesadaran kolektif yang mendalam terhadap pentingnya membangun dunia yang lebih adil dan berkelanjutan secara bersama-sama.

a. Ciri Khas Solidaritas Digital

Berikut merupakan sejumlah ciri khas dari solidaritas digital sebagaimana dijelaskan dalam buku *Digital Solidarity* karya Felix Stalder. Ciri-ciri ini mencerminkan bagaimana solidaritas dalam masyarakat jaringan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi nyata dalam bentuk partisipasi aktif, kolaborasi lintas batas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan ruang baru bagi kerja sama sosial. Setiap karakteristik menunjukkan bagaimana

solidaritas digital membedakan dirinya dari bentuk solidaritas tradisional yang cenderung terikat pada ruang fisik, kedekatan geografis, atau kesamaan identitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Stalder 2023):

a. Cepat dan Spontan

Solidaritas digital memiliki kecepatan respon yang tinggi terhadap peristiwa atau isu sosial yang muncul. Melalui jaringan sosial digital, ajakan bertindak dapat tersebar secara masif hanya dalam hitungan menit, memungkinkan terbentuknya 'swarms' atau gerakan spontan yang terkoordinasi tanpa struktur organisasi formal. Fenomena ini memanfaatkan algoritma, notifikasi real-time, dan kemudahan berbagi konten untuk menciptakan mobilisasi yang cepat, baik dalam bentuk dukungan daring maupun aksi nyata.

b. Luas dan Melampaui Batas Geografis

Salah satu keunggulan utama solidaritas digital adalah jangkauannya yang tidak terbatas oleh wilayah geografis. Melalui internet, solidaritas dapat dibangun antara individu dan komunitas dari berbagai belahan dunia. Hal ini memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas negara, budaya, dan latar belakang sosial. Partisipasi dalam sebuah gerakan atau proyek sosial tidak lagi bergantung pada keberadaan fisik, tetapi pada keterhubungan dan kesamaan nilai atau tujuan.

c. Visual dan Ekspresif

Dalam dunia digital, solidaritas kerap diekspresikan secara visual. Gambar, video, meme, hingga desain grafis menjadi alat utama untuk menyampaikan pesan, membangun identitas kolektif, dan menarik partisipasi. Keberhasilan gerakan digital sering kali diukur melalui seberapa viral kontennya, bukan hanya oleh substansi pesan yang dibawa. Visualisasi menjadi strategi penting untuk menciptakan perhatian, empati, dan keterlibatan publik dalam skala luas.

d. Partisipatif dan Kolaboratif

Solidaritas digital memungkinkan partisipasi yang terbuka dan egaliter. Individu tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor aktif yang dapat menyumbang ide, informasi, atau tenaga secara langsung. Proyek-proyek berbasis commons, seperti Wikipedia dan open source software, menjadi bukti bahwa kerja sama dalam jaringan dapat berlangsung tanpa hierarki kaku. Prinsip kerja kolektif, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan semangat saling berbagi menjadi fondasi utama bentuk solidaritas ini.

e. Terhubung dan Berbasis Jaringan

Solidaritas digital terwujud melalui logika jaringan di mana hubungan antarindividu dibentuk dan dipertahankan melalui media digital. Kekuatan solidaritas ini tidak terletak pada kekompakan fisik, melainkan pada konektivitas, pertukaran informasi, dan kemampuan untuk menciptakan resonansi antarjaringan. Individu menjadi bagian dari berbagai jaringan sekaligus, dan solidaritas muncul sebagai hasil dari interaksi-interaksi yang terus berlangsung dalam ruang digital yang cair dan adaptif.

f. Reflektif terhadap Identitas dan Subjektivitas Baru

Solidaritas digital berkaitan erat dengan bentuk subjektivitas baru yang disebut ‘individualisme berjaringan’. Dalam konteks ini, individu membangun identitasnya bukan dalam ruang privat yang terisolasi, melainkan dalam proses keterlibatan sosial yang aktif di ranah digital. Ekspresi diri, visibilitas, dan kredibilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan membentuk ikatan solidaritas dengan orang lain di jaringan.

g. Terbuka dan Fleksibel terhadap Inovasi Sosial

Karena tidak terikat oleh struktur birokrasi atau lembaga formal, solidaritas digital memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Ini memungkinkan terciptanya inovasi sosial, baik dalam cara berorganisasi, memproduksi, maupun menyampaikan aspirasi.

Bentuk-bentuk baru seperti crowdfunding, open collaboration, dan digital assemblies tumbuh dari ruang ini, memperlihatkan potensi transformatif solidaritas digital dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan partisipatif.

b. Peran Hashtag dalam Menggalang Opini dan Mobilisasi

Hashtag memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggalang opini dan memobilisasi masyarakat terhadap isu-isu sosial maupun politik. Sebagai elemen komunikasi digital, hashtag memungkinkan informasi disusun, dibagikan, dan ditemukan dengan cepat oleh khalayak luas yang memiliki minat serupa. Penggunaan tanda pagar (#) sebelum kata atau frasa menciptakan ruang diskusi tematik yang memudahkan pengguna untuk mengikuti isu tertentu, berkontribusi dalam percakapan, serta mengakses berbagai perspektif yang terkonsolidasi dalam satu titik temu digital (Ulya & Indainanto 2024). Dengan demikian, hashtag tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan topik, tetapi juga sebagai pemicu keterlibatan sosial dalam ruang maya.

Keunggulan utama hashtag terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi penyebaran pesan secara luas dan cepat. Dalam konteks krisis, bencana, atau kampanye advokasi, sebuah hashtag mampu menghubungkan ribuan hingga jutaan pengguna media sosial dalam waktu singkat. Menurut Anisa (2023) melalui struktur yang sederhana namun kuat, hashtag mempercepat proses difusi informasi dan memungkinkan masyarakat berperan aktif, baik dengan menyebarkan ulang pesan, memberikan dukungan, maupun mengambil bagian dalam aksi kolektif. Ruang digital yang terbentuk dari hashtag menjelma menjadi komunitas maya yang bersifat partisipatif dan dinamis, menghubungkan individu-individu yang sebelumnya tidak saling mengenal menjadi satu suara yang solid.

Keterlibatan emosional dan narasi personal turut memperkuat peran hashtag dalam membentuk opini publik. Hashtag memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan

pengalaman pribadi, solidaritas, atau sikap terhadap isu tertentu dengan cara yang ringkas namun kuat. Miqdad (2024) memaparkan jika narasi yang tersebar melalui hashtag memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi kolektif dan menciptakan kesadaran sosial yang luas. Dalam banyak kasus, kekuatan ini berkembang menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi narasi arus utama, dengan menciptakan ruang tandingan tempat berbagai suara marginal dapat memperoleh pengakuan.

Lebih dari sekadar alat komunikasi, hashtag juga menjadi instrumen pengorganisasian gerakan sosial. Dengan konsistensi penggunaan pada berbagai platform seperti X, Instagram, dan Facebook, sebuah kampanye berbasis hashtag dapat meraih momentum global, membangun tekanan terhadap pemangku kebijakan, dan memicu perubahan nyata. Menurut Abimbade, Olayoku, dan Herro (2022) hashtag memudahkan koordinasi antarindividu dan kelompok secara non-hierarkis, memungkinkan terbentuknya jaringan yang fleksibel namun efektif dalam menjalankan aksi-aksi sosial. Bahkan tanpa kehadiran lembaga formal, hashtag mampu mengintegrasikan kekuatan individu menjadi gerakan kolektif yang memiliki dampak signifikan.

Keterbukaan dan inklusivitas juga menjadi daya tarik utama dari penggunaan hashtag. Setiap orang yang memiliki akses internet dapat ikut serta dalam percakapan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Hashtag memungkinkan siapa pun untuk menjadi bagian dari diskursus publik, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan isu yang dianggap penting. Melalui mekanisme ini, demokratisasi komunikasi sosial semakin terbuka lebar, menjadikan hashtag sebagai simbol solidaritas digital yang bukan hanya menyalurkan opini, tetapi juga menggerakkan perubahan sosial secara nyata.

c. Solidaritas Digital Sebagai Bentuk Political Expression bagi Netizen Indonesia

Solidaritas digital telah menjadi salah satu saluran utama ekspresi politik bagi masyarakat dunia maya, termasuk netizen di Indonesia. Di era keterhubungan digital, partisipasi politik tidak lagi terbatas pada institusi formal seperti pemilu atau parlemen, melainkan meluas ke ruang daring yang bersifat terbuka dan partisipatif. Melalui media sosial, individu dapat dengan mudah mengekspresikan sikap politik, menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, atau menyebarkan kesadaran akan isu-isu sosial dan keadilan (Syammas et al. 2025). Fenomena ini menandai pergeseran signifikan dalam lanskap politik, di mana kekuatan wacana tidak hanya dimiliki oleh elit politik, tetapi juga oleh masyarakat umum yang memiliki akses terhadap teknologi informasi.

Dalam praktiknya, solidaritas digital sebagai bentuk ekspresi politik tampak melalui penggunaan hashtag, petisi daring, meme politik, dan konten visual yang menyuarakan keresahan kolektif. Hashtag menjadi alat strategis untuk menyatukan suara dalam menyikapi isu-isu tertentu, memperlihatkan bagaimana identitas politik dibentuk secara kolaboratif dan sering kali bersifat lintas kelompok. Melalui bentuk ini, netizen tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen wacana yang mampu memengaruhi opini publik dan membentuk narasi tandingan terhadap dominasi media arus utama (Hidayat & Khusairi 2024). Ruang digital pun menjadi medan kontestasi ideologis di mana solidaritas tidak dibangun atas dasar kesamaan identitas, tetapi kesamaan tujuan dan aspirasi.

Kecepatan dan daya jangkauan media sosial memungkinkan ekspresi politik berkembang dengan dinamis. Ketika isu-isu politik muncul ke permukaan, reaksi publik dalam bentuk unggahan, komentar, dan pembentukan komunitas maya dapat terjadi seketika, menciptakan tekanan sosial yang nyata terhadap aktor-aktor politik.

Menurut Ayudha (2024) bentuk partisipasi ini seringkali tidak terstruktur secara formal, tetapi justru memiliki kekuatan besar karena sifatnya yang spontan, organik, dan sulit dikendalikan. Dalam konteks ini, solidaritas digital berfungsi sebagai ruang ekspresi emosi kolektif, baik dalam bentuk kemarahan, empati, ataupun dukungan terhadap perubahan.

Sifat partisipatif dari solidaritas digital mencerminkan demokratisasi komunikasi, di mana setiap individu memiliki potensi yang sama untuk menyuarakan opini politik. Rohmah (2023) memaparkan jika tidak ada batasan status sosial atau latar belakang untuk dapat terlibat dalam diskursus publik. Pengalaman personal, observasi terhadap ketidakadilan, atau aspirasi terhadap masa depan yang lebih baik menjadi dasar munculnya ekspresi politik yang bersifat horizontal dan egaliter. Inilah yang menjadikan solidaritas digital sebagai wadah politik yang inklusif, memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan untuk turut menyuarakan aspirasi mereka di hadapan khalayak luas (Dahlan & Wahid 2022).

Meski tidak selalu terlembagakan dalam struktur politik formal, solidaritas digital memiliki pengaruh riil dalam membentuk kebijakan maupun opini publik. Tekanan dari gerakan digital kerap memicu respon dari aktor politik, baik dalam bentuk klarifikasi, penyesuaian kebijakan, maupun bentuk-bentuk dialog lainnya (Angga, Poa, dan Rikardus 2023). Di tengah era informasi yang serba cepat, kekuatan solidaritas digital terletak pada kemampuannya membangun resonansi sosial melalui narasi yang menyentuh dan relevan, yang kemudian diolah menjadi ekspresi politik kolektif oleh netizen yang aktif dan sadar akan peran mereka sebagai warga digital.

2. Wacana

a. Pengertian Wacana

Wacana merupakan konsep sentral dalam ilmu linguistik yang merujuk pada satuan bahasa yang lebih luas dari sekadar kalimat. Ia mencakup rangkaian ujaran atau teks yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan makna. Dalam pendekatan tradisional, wacana dianggap sebagai struktur linier dari bahasa yang digunakan dalam komunikasi, tetapi dalam pendekatan modern, wacana tidak hanya mencakup struktur linguistik, melainkan juga mencakup unsur pragmatik, sosial, dan budaya yang melingkupinya (Hasibuan & Khairani 2021). Artinya, wacana adalah hasil interaksi antara penutur, pendengar, dan konteks sosial tempat bahasa itu digunakan. Wacana dapat berupa tulisan atau lisan, dan bisa ditemukan dalam bentuk artikel, ceramah, percakapan, hingga pidato, yang semuanya memiliki tujuan komunikasi tertentu yang ditentukan oleh konteks situasional.

Pemahaman tentang wacana tidak terlepas dari perkembangan teori linguistik, khususnya dalam kajian analisis wacana. Salah satu tokoh awal, Zellig Harris, melihat wacana sebagai suatu unit struktural yang dapat dianalisis secara analogis dengan kalimat (Hasibuan & Khairani 2021). Pendekatan ini kemudian diperluas oleh Salkie yang menyatakan bahwa jika tata bahasa berfokus pada bagaimana kata-kata membentuk kalimat, maka analisis wacana berfokus pada bagaimana kalimat-kalimat itu membentuk teks. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemahaman wacana tidak cukup hanya dengan memahami struktur kalimat secara individual, melainkan harus mencakup hubungan antar kalimat dan bagaimana konteks mempengaruhi pemaknaan terhadap keseluruhan teks atau ujaran. Hubungan antar kalimat tersebut menciptakan kohesi dan koherensi yang menjadi syarat penting dalam membentuk makna dalam wacana.

Wacana juga dipahami sebagai bentuk nyata dari penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mistoh (2023) perspektif ini menekankan bahwa wacana bukanlah sistem bahasa yang abstrak, melainkan manifestasi konkret dari bahasa yang digunakan dalam praktik sosial. Dalam pandangan ini, wacana mencerminkan praktik komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, mempertahankan kekuasaan, membangun identitas, dan mengatur hubungan sosial. Halliday dan Hasan memperkenalkan konsep "*text as language in use*" yang menunjukkan bahwa teks adalah bentuk wacana yang harus dianalisis berdasarkan fungsinya dalam komunikasi (Mistoh 2023). Analisis semacam ini memungkinkan kita memahami bahwa setiap ujaran atau tulisan yang digunakan dalam masyarakat selalu membawa muatan ideologis, sosial, dan kultural.

Wacana dapat dilihat sebagai perilaku komunikatif yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor linguistik, tetapi juga oleh struktur sosial dan kekuasaan. Dalam kerangka ini, wacana tidak berdiri sendiri sebagai entitas bahasa, melainkan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan struktur kekuasaan yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian Analisis Wacana Kritis, di mana wacana dilihat sebagai alat untuk memahami bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan dominasi, menciptakan ketimpangan sosial, atau memperjuangkan keadilan (Fadhila & Hartono 2022). Misalnya, teks berita, pidato politik, atau iklan dapat dianalisis sebagai sarana yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang dan keyakinan masyarakat terhadap suatu isu.

Akhirnya, wacana juga memiliki dimensi ideologis yang penting. Dalam praktiknya, bahasa yang digunakan dalam wacana sering kali merefleksikan kepentingan tertentu, baik secara individu maupun institusional. Fairclough dan Wodak menyatakan bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang erat kaitannya dengan

ideologi, kekuasaan, dan identitas (Sabban & Naira 2022). Oleh sebab itu, kajian terhadap wacana harus mencakup tidak hanya struktur bahasa, tetapi juga bagaimana teks-tes itu diproduksi, disebarkan, dan diinterpretasikan dalam konteks sosial tertentu. Melalui kajian wacana, kita dapat menggali bagaimana makna dibentuk dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor sosial, serta bagaimana teks dan ujaran mampu mencerminkan maupun membentuk realitas sosial yang ada.

b. Fungsi Bahasa dalam Pembentukan Realitas Sosial

Bahasa memainkan peran sentral dalam pembentukan realitas sosial karena ia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana utama untuk menciptakan makna dan struktur sosial. Dalam perspektif konstruksionisme sosial, bahasa tidak dilihat sekadar sebagai cermin dunia objektif, melainkan sebagai produk sejarah dari interaksi sosial antarmanusia (Olive et al. 2024). Melalui penggunaan bahasa, individu menafsirkan pengalaman mereka, membentuk pemahaman bersama, dan menciptakan dunia sosial yang bisa berbeda antara satu kelompok dan kelompok lain. Bahasa berfungsi sebagai jembatan antara pikiran dan dunia luar, di mana makna tidak melekat secara intrinsik pada objek atau kejadian, melainkan dikonstruksi melalui diskursus dan relasi sosial yang terus berkembang.

Konstruksionisme sosial menegaskan bahwa kenyataan sosial adalah hasil dari proses intersubjektif yakni hasil dari negosiasi dan interaksi antarindividu yang saling memengaruhi. Dalam proses ini, bahasa berfungsi bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk persepsi, membangun norma, dan menegosiasikan nilai (Benabbes & Abdul Haleem Abu Taleb 2024). Setiap kata, metafora, dan narasi yang digunakan dalam percakapan sehari-hari membawa serta muatan ideologis yang dapat memperkuat atau menantang struktur sosial yang ada. Dengan demikian, bahasa memegang peran sebagai

motor penggerak perubahan sosial karena melalui perubahan dalam cara kita berbicara, berpikir, dan mendefinisikan suatu hal, kita turut mengubah struktur realitas sosial itu sendiri.

Realitas sosial tidak statis; ia senantiasa dibentuk ulang melalui cerita, gambaran, dan representasi yang dikomunikasikan dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, diskursus memegang peran krusial karena ia mencerminkan dan sekaligus membentuk dunia yang kita tinggali. Menurut Talukder & Barner-Rasmussen (2024) narasi yang dominan dalam suatu masyarakat bisa memperkuat sistem kekuasaan, struktur organisasi, hingga nilai budaya tertentu. Misalnya, ketika anggota suatu komunitas menggunakan metafora tertentu untuk menggambarkan lingkungan sosial mereka, seperti “organisme hidup” atau “mesin rusak”, metafora itu menjadi sarana interpretatif yang membentuk tindakan, harapan, dan struktur sosial berikutnya. Diskursus tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga menciptakan dan mengarahkannya.

Dalam kerangka ini, bahasa menjadi alat strategis untuk melakukan perubahan sosial. Pendekatan seperti *Appreciative Inquiry* menunjukkan bahwa dengan mengganti narasi negatif menjadi narasi apresiatif, aktor-aktor sosial dapat menciptakan realitas baru yang lebih positif dan produktif (Swetha & Aravind 2025). Proses ini melibatkan pencarian makna yang membangun, menggali potensi, serta memperkuat hal-hal yang dianggap berhasil di masa lalu sebagai inspirasi untuk masa depan. Bahasa apresiatif membuka ruang bagi pergeseran paradigma dalam memandang suatu sistem sosial, bukan melalui penyangkalan masalah, melainkan dengan menekankan kekuatan dan kemungkinan yang belum tergali. Maka dari itu, perubahan realitas sosial seringkali dimulai dari perubahan dalam kata-kata dan cerita yang kita pilih untuk diutarakan.

Akhirnya, peran bahasa dalam membentuk realitas sosial menggarisbawahi bahwa setiap interaksi manusia tidak pernah netral secara makna. Bahkan ketika kita berusaha menggambarkan “kenyataan” secara objektif, kita sebenarnya sedang membangun versi kenyataan yang sudah difilter oleh bahasa dan nilai-nilai yang kita anut. Dengan kata lain, peta yang kita buat tentang dunia ini tidak pernah identik dengan wilayahnya, tetapi selalu merupakan hasil interpretasi yang dipengaruhi oleh perspektif, kepentingan, serta pengalaman kolektif. Maka dari itu, memahami bahasa sebagai alat pembentuk realitas memberi kita kesadaran kritis akan pentingnya refleksi dalam komunikasi dan membuka ruang untuk menciptakan masa depan sosial yang lebih inklusif dan bermakna melalui rekonstruksi makna secara kolektif.

c. Media Sosial sebagai Medan Produksi dan Kontestasi Wacana

Media sosial telah menjelma menjadi arena utama dalam produksi dan kontestasi wacana di era digital. Fungsi platform seperti X, Facebook, Instagram, hingga YouTube telah bergeser dari sekadar medium komunikasi menjadi ruang diskursif di mana makna, ideologi, dan identitas diproduksi serta diperdebatkan secara aktif. Pengguna media sosial tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, melainkan juga aktor-aktor diskursif yang berkontribusi dalam membentuk pemahaman kolektif terhadap realitas sosial (Farid et al. 2025). Dalam konteks ini, wacana tidak lagi terbatas pada narasi institusional atau media arus utama, tetapi dapat muncul dari berbagai lapisan masyarakat dengan kepentingan, agenda, dan perspektif yang beragam. Interaktivitas dan partisipasi yang tinggi menjadikan media sosial sebagai medan yang dinamis dan sering kali penuh konflik antara wacana dominan dan wacana tandingan.

Transformasi digital ini memunculkan struktur mediasi baru yang mendisrupsi pola komunikasi tradisional, sehingga produksi makna tidak hanya berlangsung melalui konten verbal atau teks,

tetapi juga melalui multimodalitas seperti gambar, video, emoji, hingga sistem “like” dan “share.” Struktur ini menciptakan apa yang disebut sebagai dinamika “techno-discursive,” yaitu keterkaitan erat antara teknologi mediasi dan praktik diskursif yang terbentuk di dalamnya. Menurut Mudjiyanto, Launa, dan Yanuar (2024) algoritma dan fitur-fitur teknis media sosial memiliki peran dalam menentukan visibilitas suatu wacana, sehingga siapa yang terlihat, siapa yang didengar, dan siapa yang dibungkam sebagian besar ditentukan oleh logika distribusi digital tersebut. Mekanisme ini memungkinkan wacana tertentu menjadi lebih menonjol dan mendapatkan legitimasi hanya karena banyaknya interaksi digital yang dihasilkannya, bukan karena kekuatan argumentasi atau rasionalitasnya. Dengan demikian, otoritas diskursif berpindah dari institusi-institusi formal ke logika populer berbasis visibilitas dan afeksi.

Media sosial juga membuka kemungkinan terbentuknya gaya komunikasi baru yang lebih berorientasi pada afeksi daripada deliberasi rasional. Keberhasilan suatu pesan atau narasi sering kali ditentukan oleh kemampuannya memicu resonansi emosional pengguna, bukan pada kedalaman substansi atau kebenaran faktual. Gaya komunikasi ini memungkinkan berseminya wacana populisme digital, di mana narasi sederhana, emosional, dan sering kali polaristik menjadi lebih efektif dibandingkan argumen yang kompleks (Sari, Triyoga, dan Budaya 2025). Akibatnya, kontestasi wacana menjadi tidak lagi hanya pertarungan ide, melainkan juga kompetisi dalam menciptakan keterlibatan emosional, simpati, dan loyalitas digital. Hal ini berdampak pada cara masyarakat mengonstruksi identitas, posisi politik, dan makna sosial lainnya, yang makin dikendalikan oleh dinamika afektif dan representasi visual.

Kontestasi wacana di media sosial tidak terlepas dari relasi kuasa yang bersifat terdistribusi secara kompleks. Sementara

platform tampak demokratis karena memberi ruang pada siapa pun untuk berbicara, dalam praktiknya terdapat ketimpangan akses terhadap distribusi makna. Menurut Farid et al. (2025) aktor-aktor dengan sumber daya digital lebih besar seperti buzzer politik, influencer, atau institusi dengan strategi komunikasi canggih lebih mampu mendominasi narasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan penyebaran wacana di media sosial tetap berada dalam logika kekuasaan, di mana siapa yang mampu mengendalikan narasi digital memiliki pengaruh dalam membentuk persepsi sosial. Dalam situasi ini, media sosial menjadi arena pertempuran simbolik yang sangat kompetitif, di mana narasi yang bertahan bukan selalu yang paling benar, tetapi yang paling bisa dipasarkan secara afektif dan algoritmis.

Kemunculan media sosial sebagai medan diskursif juga menuntut adanya pendekatan analisis wacana yang lebih kompleks dan interdisipliner. Kritik diskursus tidak dapat lagi hanya berfokus pada teks atau isi narasi, melainkan harus mempertimbangkan konteks produksi, sirkulasi, dan konsumsi digital. Hal ini mencakup bagaimana algoritma bekerja, bagaimana afeksi memengaruhi interpretasi pesan, serta bagaimana bentuk-bentuk representasi baru seperti meme, hashtag, atau GIF berfungsi dalam menyampaikan makna. Wacana digital adalah hasil dari konfigurasi antara semiotika, teknologi, dan praktik sosial yang terus berkembang. Oleh sebab itu, memahami media sosial sebagai ruang produksi dan kontestasi wacana bukan hanya tentang isi pesan, tetapi tentang bagaimana makna dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dikomodifikasi dalam lanskap digital yang sangat cair dan berlapis-lapis.

3. Identitas Politik

a. Pengertian Identitas Politik

Identitas politik merupakan konsep yang mengacu pada penggabungan antara ciri-ciri sosial individu atau kelompok dengan orientasi politik tertentu. Ini bukan sekadar kesadaran atas

perbedaan sosial seperti ras, gender, agama, atau orientasi seksual, tetapi sebuah kerangka yang membentuk bagaimana seseorang memahami posisinya dalam struktur kekuasaan, serta bagaimana ia memobilisasi diri dalam arena politik. Drozdewski & Matusz (2021) memaparkan bahwa identitas politik menekankan bahwa orientasi politik bukan hanya soal ideologi atau kepentingan ekonomi, melainkan juga cerminan pengalaman hidup, narasi kolektif, dan warisan sejarah yang membentuk cara pandang dan pilihan politik seseorang. Dalam kerangka ini, misalnya, menjadi “perempuan kulit hitam” bukan hanya status demografis, melainkan posisi sosial-politik yang memiliki implikasi terhadap bagaimana dunia memperlakukan individu dan bagaimana individu tersebut merespons dunia.

Dalam banyak diskursus kontemporer, identitas politik sering dianggap sebagai produk dari kondisi sosial dan hubungan kekuasaan yang kompleks, bukan sebagai sesuatu yang terbentuk secara alami atau sebelum keterlibatan dalam politik. Artinya, identitas itu sendiri dikonstruksi dan dibentuk melalui proses sosial dan historis yang melibatkan pertarungan makna, simbol, dan kekuasaan (Mesler et al. 2024). Ketika orang mengorganisasi diri atas dasar identitas tertentu, misalnya dalam gerakan anti-rasisme atau feminisme, yang mereka perjuangkan bukan hanya pengakuan atas eksistensi kelompok mereka, tetapi juga perubahan atas sistem nilai, hukum, dan struktur sosial yang mendiskriminasi mereka. Oleh karena itu, identitas politik tidak bisa dilepaskan dari kritik terhadap dominasi dan ketimpangan yang melekat dalam tatanan sosial yang ada.

Identitas politik juga mengandung potensi ambivalensi. Di satu sisi, ia memberikan dasar kuat bagi solidaritas kolektif dan perjuangan bersama, karena anggota kelompok yang sama dapat merasakan penderitaan yang serupa dan menyusun strategi resistensi yang terpadu. Namun di sisi lain, identitas politik dapat mengarah

pada pembekuan identitas, yang menyederhanakan kompleksitas individu menjadi satu kategori tunggal (Parveen 2021). Ketika perjuangan politik dibangun semata-mata atas dasar identitas, tanpa ruang untuk refleksi kritis, maka gerakan tersebut bisa terjebak dalam dogmatisme dan eksklusivitas. Hal ini mempersempit ruang dialog dan melemahkan potensi koalisi lintas identitas yang sesungguhnya sangat diperlukan dalam perjuangan sosial yang inklusi f.

Penggunaan identitas dalam politik seringkali dipolitisasi sedemikian rupa hingga menjadi bagian dari simbolisme semata, bukan lagi alat untuk membongkar ketidakadilan struktural. Menurut Waring et al. (2023) ada kalanya, posisi politik tertentu diadopsi bukan karena keyakinan atas keadilan isu tersebut, melainkan karena keinginan untuk memperkuat citra diri sebagai bagian dari komunitas politik tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana identitas politik bisa tergelincir menjadi alat pembentukan citra personal dan kolektif, alih-alih menjadi sarana analisis dan transformasi sosial yang kritis. Dalam situasi seperti ini, posisi politik menjadi lebih tentang menunjukkan siapa kita secara simbolik, ketimbang memperjuangkan perubahan nyata dalam struktur sosial.

Konsep identitas politik yang sehat seharusnya tidak berhenti pada afirmasi identitas semata, melainkan terus membuka ruang bagi eksplorasi, pertanyaan kritis, dan pertarungan gagasan yang produktif. Politik tidak perlu menjadi ajang reproduksi keyakinan kolektif yang statis, melainkan bisa menjadi ruang kreatif tempat individu dan kelompok menguji kembali asumsi dasar mereka, memperluas solidaritas, dan mengejar keadilan yang lebih kompleks dan kontekstual. Dalam dunia yang semakin plural dan saling terhubung, pendekatan terhadap identitas politik yang lebih terbuka, reflektif, dan inklusif menjadi sangat penting agar tidak terjebak dalam konflik identitas yang berlarut, melainkan

menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan kolektif untuk perubahan sosial.

b. Peran Simbol dan Narasi dalam Kontruksi Identitas

Simbol dan narasi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas, terutama dalam konteks politik dan budaya. Simbol berfungsi sebagai representasi visual yang sarat makna, yang dapat mengikat kelompok sosial dalam satu kesatuan emosional dan ideologis. Simbol-simbol seperti bendera, pakaian religius, bahasa, bahkan lagu dan slogan, menjadi tanda pembeda sekaligus alat penguatan kohesi sosial dalam komunitas tertentu. Melalui simbol, kelompok menciptakan ruang identitas yang bisa dikenali, dibedakan, dan dirayakan, tidak hanya oleh anggotanya, tetapi juga oleh pihak luar (Pamungkas et al. 2024). Penggunaan simbol menjadi penanda kehadiran, eksistensi, dan posisi kelompok tersebut dalam struktur sosial yang lebih luas.

Narasi juga tidak kalah vital dalam membangun identitas karena melalui narasi, kelompok sosial menyusun sejarah, pengalaman, dan tujuan kolektif mereka dalam alur yang dapat dipahami dan diinternalisasi. Narasi berfungsi sebagai wadah artikulasi nilai, konflik, perjuangan, dan harapan kelompok, sekaligus sebagai alat legitimasi bagi tindakan kolektif yang mereka lakukan. Menurut Rustandi & Hendrawan (2022) narasi yang kuat, sebuah kelompok mampu menciptakan kontinuitas antara masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka, membentuk suatu memori kolektif yang melekat dan sulit dipisahkan dari identitas mereka. Narasi memungkinkan terciptanya makna yang lebih dalam terhadap eksistensi dan orientasi perjuangan suatu komunitas.

Dalam praktiknya, simbol dan narasi saling menguatkan. Simbol memperoleh kekuatannya dari narasi yang melatarinya, sementara narasi memperoleh visibilitas dan daya tahan dari simbol yang digunakan untuk mewakilinya. Kombinasi keduanya menciptakan efek emosional dan kognitif yang dapat memperkuat

ikatan internal antaranggota kelompok serta membentuk persepsi eksternal tentang kelompok tersebut (Indari & Holihah 2025). Ketika narasi dibangun secara konsisten dan simbol dikemas dengan baik, keduanya mampu menggerakkan massa, memobilisasi dukungan, dan memperkuat posisi kelompok dalam persaingan sosial maupun politik. Kekuatan simbol dan narasi ini menjadikannya alat yang sangat strategis dalam konstruksi dan reproduksi identitas kolektif.

Penggunaan simbol dan narasi juga dapat menjadi ruang kontestasi ketika terjadi benturan antara identitas-identitas yang berbeda. Narasi yang dianggap dominan oleh satu kelompok dapat dibaca sebagai bentuk hegemoni oleh kelompok lain, terutama jika simbol-simbol yang digunakan menyiratkan superioritas atau eksklusivitas. Dalam situasi ini, simbol dan narasi tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi arena pertarungan makna dan kekuasaan. Interpretasi terhadap suatu simbol dapat berubah tergantung pada konteks sosial dan politik yang melingkupinya, dan narasi pun bisa direvisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perjuangan dan legitimasi identitas pada waktu tertentu.

Ketika simbol dan narasi diproduksi secara masif dan disebarluaskan melalui media, pendidikan, dan institusi sosial lainnya, konstruksi identitas akan semakin mengakar kuat. Proses ini menjadikan identitas bukan sekadar perasaan personal atau pengakuan individu, melainkan sebuah bangunan sosial yang ditopang oleh struktur simbolik dan naratif yang terus-menerus dipelihara dan dirawat (Auliyafadlilah 2024). Dengan demikian, memahami peran simbol dan narasi dalam konstruksi identitas tidak cukup hanya dari aspek estetika atau semantik, tetapi harus dilihat sebagai proses politik dan kultural yang kompleks, yang memengaruhi bagaimana kelompok-kelompok sosial memosisikan

diri, menjalin hubungan dengan yang lain, serta memperjuangkan keberadaannya dalam masyarakat yang plural dan dinamis.

c. Identitas Sebagai Hasil Relasi Kekuasaan dan Representasi

Identitas dalam konteks sosial dan politik tidak pernah hadir sebagai sesuatu yang netral atau alami, melainkan merupakan hasil dari relasi kekuasaan yang kompleks. Identitas terbentuk melalui proses interaksi sosial yang tidak setara, di mana kelompok-kelompok tertentu memiliki kuasa lebih besar untuk mendefinisikan, mengatur, dan mengontrol makna identitas kelompok lain. Dalam konteks ini, identitas menjadi arena pertarungan makna antara pihak yang mendominasi dan pihak yang didominasi (Drozdewski & Matusz 2021). Relasi ini menciptakan struktur sosial di mana identitas bukan lagi sekadar ekspresi diri, melainkan konstruk yang dibentuk untuk melayani kepentingan tertentu. Kekuasaan mempengaruhi bagaimana identitas diakui, dilegitimasi, atau justru disingkirkan dari ruang publik.

Proses pembentukan identitas sangat berkaitan erat dengan praktik representasi. Representasi bukan hanya tentang bagaimana sesuatu ditampilkan, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk menampilkan dan menafsirkan identitas tertentu. Ketika sebuah identitas direpresentasikan oleh kelompok yang memiliki posisi dominan, maka representasi tersebut sering kali mencerminkan kepentingan dominan itu sendiri (Shahid et al. 2025). Identitas- identitas yang tidak sesuai dengan narasi dominan kerap dimarginalkan atau bahkan disalahartikan. Dalam kondisi ini, identitas menjadi produk dari wacana-wacana hegemonik yang memonopoli penggambaran atas suatu kelompok, dan menyempitkan ruang bagi representasi alternatif yang lebih otentik atau plural.

Dominasi dalam representasi bukan sekadar tindakan eksplisit, melainkan terjadi melalui berbagai mekanisme sosial dan kultural yang tampak wajar atau alamiah. Media massa, sistem

pendidikan, lembaga negara, hingga budaya populer sering berperan dalam membentuk citra-citra tertentu yang melekat pada identitas kelompok. Citra-citra ini bisa memuat stereotip, pelabelan, atau penggambaran yang bias dan reduktif. Dengan cara ini, relasi kekuasaan bekerja secara halus namun efektif dalam mengkonstruksi realitas sosial tentang siapa yang “normal”, siapa yang “lain”, siapa yang berhak bicara, dan siapa yang harus diam. Identitas pun menjadi tidak sekadar soal siapa kita, tetapi juga siapa yang mengatakan kita, dengan cara bagaimana, dan untuk tujuan apa.

Dalam masyarakat yang plural dan kompleks, identitas sering kali bersifat ganda dan tumpang tindih, tetapi relasi kekuasaan berusaha mereduksi keragaman itu menjadi bentuk-bentuk yang lebih mudah dikontrol. Dengan menyederhanakan identitas menjadi kategori yang tetap dan eksklusif, sistem dominan menjaga stabilitas kekuasaannya dengan cara menciptakan batas-batas sosial yang tegas. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang terpinggirkan merespons melalui pembentukan identitas tandingan sebagai bentuk resistensi (Disli & Jalaly 2024). Identitas dalam konteks ini menjadi alat perjuangan untuk mengklaim ruang representasi, memperjuangkan pengakuan, serta menantang narasi dominan yang menindas. Dalam proses ini, kekuasaan dan perlawanan berjalan berdampingan dan saling membentuk.

Pemahaman terhadap identitas sebagai hasil relasi kekuasaan dan representasi membawa implikasi penting dalam melihat dinamika sosial kontemporer. Ia mengingatkan bahwa setiap klaim identitas tidak dapat dipisahkan dari posisi sosial-politik pembuat klaim tersebut. Identitas tidak berdiri di ruang hampa; ia selalu dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertarungkan dalam lanskap kekuasaan yang terus berubah. Representasi menjadi sarana penting dalam pertarungan tersebut, karena melalui representasilah identitas dikenali, dirayakan, atau justru ditindas. Dengan demikian, analisis

identitas harus selalu menyertakan pembacaan terhadap struktur kekuasaan yang melingkupinya dan praktik representasi yang menopangnya.

4. Polarisasi Opini Publik

a. Pengertian Polarisasi Opini Publik

Polarisasi opini publik adalah proses sosial yang menyebabkan masyarakat terbelah dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sangat berbeda secara ekstrem terhadap suatu isu. Polarisasi ini tidak sekadar mencerminkan adanya keberagaman pendapat, melainkan memperlihatkan adanya pengelompokan sikap yang kaku dan kurang fleksibel, di mana anggota masyarakat semakin sulit menerima atau mempertimbangkan perspektif dari pihak lain. Polarisasi biasanya ditandai dengan meningkatnya konsistensi dalam satu kelompok terhadap pandangan tertentu, dan meningkatnya ketidaksepakatan atau konflik terhadap kelompok yang memiliki pandangan berbeda (Mukhroman, Ahmad, dan Gumelar 2024). Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya memiliki opini yang beragam, melainkan juga membentuk identitas sosial berdasarkan opini tersebut, yang memperkuat batas-batas antara kelompok dan mempersulit terjadinya dialog terbuka.

Penyebab utama polarisasi opini publik sering dikaitkan dengan proses sosial seperti pengaruh sosial, disonansi kognitif, dan keterikatan pada pendapat awal (prejudice anchoring). Model dinamika opini, khususnya model Friedkin–Johnsen (FJ), menjelaskan bahwa individu cenderung mempertahankan sebagian dari pendapat awalnya sembari menerima sebagian pengaruh dari pendapat orang lain di sekitarnya. Dalam model ini, jika seseorang sangat terikat pada pendapat awalnya dan kurang terbuka terhadap pendapat lain, maka ia akan berperan sebagai “aktor keras kepala” yang dapat memperkuat polarisasi dalam jaringan sosial. Sebaliknya, individu yang sangat mudah dipengaruhi disebut “naif”

dan cenderung menyerap pendapat dominan dari sekelilingnya (Syah, Fasha, dan Caropeboka 2024). Ketika terdapat ketidakseimbangan antara aktor keras kepala dan naif, dan pengaruh sosial berjalan secara asimetris, maka proses ini dapat memperkuat kecenderungan masyarakat untuk terpecah dalam kelompok ekstrem.

Dalam konteks jaringan sosial modern, algoritma media sosial juga turut memperparah polarisasi dengan memperkuat bias konfirmasi. Platform digital sering kali menyajikan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga pengguna jarang terpapar pada informasi yang menantang pandangan mereka. Situasi ini menciptakan apa yang dikenal sebagai filter bubble dan echo chamber, di mana individu hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, opini yang ekstrem lebih mudah diperkuat dan divalidasi dalam kelompok, sementara pendapat moderat atau berbeda menjadi tersingkir. Keberadaan ruang komunikasi semacam ini bukan hanya membatasi pertukaran informasi yang sehat, tetapi juga meningkatkan persepsi negatif terhadap kelompok yang berbeda pendapat.

Polarisasi opini publik juga dapat diukur dengan menggunakan berbagai metrik matematis, seperti Network Disagreement Index (NDI), Global Disagreement Index (GDI), dan berbagai varian dari ukuran deviasi terhadap rata-rata atau netralitas. Metrik-metrik ini mengukur sejauh mana opini-opini individu menyebar dalam jaringan sosial, baik secara lokal antar tetangga maupun secara global di seluruh sistem. Jika hasil akhir dari proses dinamika opini menunjukkan peningkatan dalam salah satu metrik ini dibandingkan dengan kondisi awal, maka dapat dikatakan telah terjadi polarisasi (Marta 2024). Oleh karena itu, identifikasi dan analisis metrik ini sangat penting dalam memahami tidak hanya apakah polarisasi terjadi, tetapi juga sejauh mana tingkat polarisasi

tersebut berkembang dan pada titik mana intervensi sosial atau kebijakan mungkin diperlukan.

Penting untuk memahami bahwa polarisasi bukanlah kondisi yang bersifat mutlak atau statis, melainkan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara struktur jaringan sosial, kekuatan pengaruh antar individu, dan tingkat keterbukaan atau kekakuan individu terhadap perubahan opini. Bahkan, dalam beberapa kondisi, model seperti Friedkin–Johnsen menunjukkan bahwa polarisasi bisa bersifat lokal atau global tergantung pada susunan hubungan sosial dan konfigurasi nilai awal dari opini masyarakat (Faturahman et al. 2024). Ini berarti bahwa dalam jaringan sosial yang sama, bisa saja terjadi penurunan konflik di tingkat lokal tetapi peningkatan ketegangan di tingkat global, atau sebaliknya. Dengan memahami sifat dinamis ini, peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengembangkan strategi mitigasi polarisasi yang lebih efektif dan kontekstual.

b. Polarisasi sebagai Efek Diskursif dari Konflik Global

Polarisasi sebagai efek diskursif dari konflik global mencerminkan bagaimana dinamika konflik besar di tingkat internasional dapat membentuk dan memperkuat ketegangan di tingkat lokal melalui cara-cara simbolik, emosional, dan wacana sosial yang tersebar di ruang publik. Ketika konflik global misalnya, yang berkaitan dengan isu migrasi, perubahan iklim, atau pertentangan geopolitik mendominasi wacana internasional, maka isu-isu tersebut tidak hanya dilihat sebagai permasalahan luar negeri, melainkan juga menjadi sumber identifikasi politik dan sosial yang sangat kuat di dalam negeri (Mukhroman et al. 2024). Masyarakat yang terhubung dengan jaringan media digital dan globalisasi komunikasi secara tidak langsung menjadi medan tempur simbolik di mana pihak-pihak lokal menafsirkan dan merespons konflik global dalam kerangka pandangan dunia dan identitas mereka sendiri.

Efek diskursif ini menciptakan proses pemihakan yang kuat, di mana individu dan kelompok cenderung mengadopsi narasi atau posisi tertentu yang sesuai dengan identitas sosial, nilai-nilai, atau kepentingan mereka. Dengan demikian, konflik global bukan hanya menciptakan tekanan pada kebijakan atau hubungan diplomatik, tetapi juga memperdalam jurang perbedaan di antara kelompok masyarakat yang berbeda di dalam suatu negara. Posisi-posisi ideologis yang sebelumnya mungkin bersifat marginal bisa mendapatkan daya tarik yang besar karena mendapatkan legitimasi melalui narasi global (Destiana et al. 2024). Dalam konteks ini, media dan jaringan sosial memainkan peran penting sebagai penghubung utama antara wacana global dan interpretasi lokal, menciptakan ruang gema (echo chambers) yang memperkuat posisi ekstrem.

Selain memperluas ruang perbedaan, polarisasi sebagai efek diskursif dari konflik global juga dapat memperkecil kemungkinan dialog. Ketika konflik ditransformasikan menjadi perdebatan simbolik dan moral di ruang publik, pihak-pihak yang berbeda cenderung melihat lawan wacana bukan hanya sebagai orang yang memiliki pendapat berbeda, tetapi sebagai representasi dari ancaman terhadap nilai dan eksistensi kelompok mereka (Palestan et al. 2025). Hal ini menyebabkan hubungan antarkelompok tidak lagi dibangun di atas perbedaan rasional, melainkan pada perasaan curiga, ketakutan, bahkan kebencian. Polarisasi semacam ini tidak hanya menyulitkan kompromi politik, tetapi juga memperlemah kohesi sosial yang menjadi fondasi bagi masyarakat demokratis yang sehat.

Dalam kerangka ini, diskursus global berperan sebagai pengungkit yang memperkuat identifikasi kelompok. Ketika individu merasa bagian dari sebuah komunitas global yang mendukung atau menolak isu tertentu seperti solidaritas dengan korban perang, advokasi terhadap perubahan iklim, atau sikap

terhadap migran maka keterikatan itu memengaruhi cara mereka melihat dunia dan kelompok lain di masyarakatnya sendiri (Syah et al. n.d.). Hal ini mempercepat proses “us versus them” dalam konteks lokal, karena identitas global tersebut terintegrasi ke dalam konflik identitas domestik. Polarisasi yang muncul dari proses ini menjadi semakin kompleks karena bukan hanya menyangkut posisi kebijakan, melainkan nilai-nilai eksistensial dan pandangan dunia yang bersifat absolut.

Pada akhirnya, efek diskursif dari konflik global memperlihatkan bahwa tantangan polarisasi tidak hanya terletak pada konten konflik itu sendiri, tetapi juga pada cara konflik tersebut dimediasi, didiskusikan, dan diresapi oleh masyarakat luas. Penanganan terhadap dinamika ini memerlukan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga reflektif dan transformasional. Dibutuhkan ruang-ruang dialog yang mampu menampung perbedaan tanpa memperkeruh identifikasi permusuhan, serta kebijakan komunikasi publik yang peka terhadap bagaimana narasi global dapat membentuk dinamika sosial lokal. Dengan kata lain, pendekatan non-kekerasan dalam menghadapi polarisasi bukan hanya bertujuan mencegah konflik, melainkan juga membangun kesadaran kritis terhadap bagaimana wacana global bisa mengatur batas-batas keberpihakan dan mempersempit ruang deliberasi publik yang inklusif.

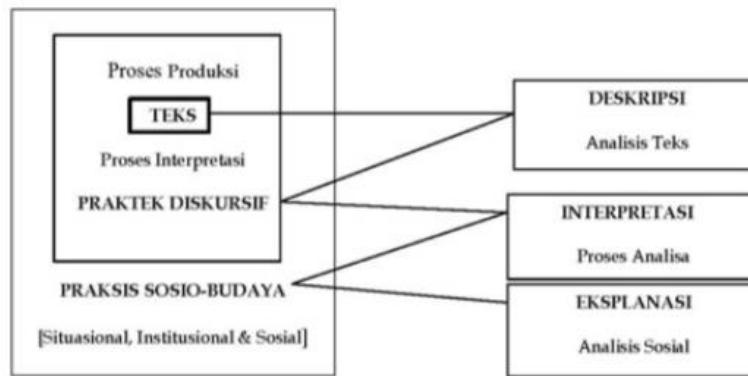
B. Kerangka Teori Norman Fairclough: Analisis Wacana Kritis (AWK)

1. Tiga Dimensi Analisis Wacana Kritis

Wacana merupakan praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, gambar, film, atau musik (Fairclough 2010). Wacana, menurut Haryatmoko (2016) merupakan praksis sosial yang terwujud dalam bentuk interaksi simbolis, yang dapat diekspresikan melalui berbagai media seperti pembicaraan, tulisan, gambar, diagram, film, atau musik. Dalam konteks

Analisa Wacana Kritis (AWK), wacana berfungsi sebagai alat untuk merepresentasikan dunia sosial dan membangun makna. Haryatmoko (2016) menekankan bahwa wacana tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan proses semiotik yang berperan dalam membentuk dan mengatur perilaku sosial, serta mencerminkan hubungan kekuasaan dan ideologi yang ada dalam masyarakat. Analisis Wacana Kritis tertarik pada cara bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial termasuk untuk membangun kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial.

Dalam bukunya Fairclough (1995) yang berjudul *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* terdapat tiga dimensi yang meliputi, Teks (*tekstual*) yang dimana teks mengacu ke wicara, tulisan, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks (khasanah kata, gramatika, *syntax*, struktur metafora, retorika), Praktik diskursif (*discourse practice*) Praktik diskursif merupakan semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Dalam dimensi ini ada proses menghubungkan produksi dan konsumsi teks atau sudah ada interpretasi. Fokusnya diarahkan pada cara pengarang teks mengambil wacana dan genres yang ada dengan memperhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan, Praktik sosial-budaya (*sociocultural practice*) biasanya tertanam dalam tujuan, jaringan dan praksis budaya sosial yang luas. Dalam dimensi ini, sudah masuk pemahaman intertekstual, peristiwa sosial di mana kelihatan bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial. Model tiga dimensi Analisa Wacana Kritis oleh Fairclough digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 2. 1 Model Tiga Dimensi Analisis Wacana Kritis

[Gambar diambil dari N. Fairclough (1995),p.98; dan (2010), p.33]

a. Analisis Teks

Analisis teks dalam kerangka Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough menunjukkan bahwa pilihan kata bukan sekadar elemen linguistik, melainkan sarana ideologis yang digunakan untuk membentuk representasi realitas sosial. Dalam teks yang dianalisis Fairclough, kosakata seperti “knowledge-based economy,” “information society,” dan “global competitiveness” memiliki bobot ideologis tinggi, yang menciptakan kesan objektivitas dan keniscayaan terhadap proses transformasi sosial-ekonomi yang sedang berlangsung (Fairclough 2013). Penggunaan istilah ini bukan hanya menetapkan agenda tertentu, tetapi juga menyingkirkan kemungkinan wacana alternatif dengan cara membingkai diskursus sebagai hal yang teknokratik dan tidak ideologis, padahal sesungguhnya sarat dengan kepentingan strategis dari aktor sosial tertentu.

Struktur kalimat dalam teks yang dianalisis lebih condong pada konstruksi argumentatif yang berlapis. Kalimat-kalimat tersebut cenderung panjang dan kompleks, seringkali memuat klausa-klausa bersyarat dan modalisasi seperti “can,” “must,” dan “should” yang memperlihatkan upaya untuk mengarahkan pembaca kepada logika tertentu, yaitu bahwa strategi transformasi berbasis informasi dan pengetahuan merupakan satu-satunya jalan yang

rasional. Selain itu, struktur argumen yang mengandalkan format “masalah-solusi” dan “tujuan-cara” memperkuat dominasi logika pembangunan institusional yang mengklaim diri sebagai solutif dan universal, tanpa ruang untuk mempertanyakan asumsi dasarnya.

Metafora menjadi instrumen penting dalam penciptaan realitas diskursif. Dalam teks yang dibahas, Fairclough mencatat metafora seperti “digital divide,” “engine for economic growth,” dan “strategic direction” sebagai bentuk retorika yang menyederhanakan realitas kompleks menjadi kerangka berpikir teknis dan terkontrol. Metafora seperti ini berperan ganda: di satu sisi menyederhanakan pemahaman publik terhadap transformasi sosial; di sisi lain, membatasi imajinasi politik untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang menopang wacana dominan (Fairclough 2013). Metafora juga memungkinkan ideologi neoliberalisme beroperasi secara halus dalam menyusupi kebijakan dan strategi tanpa disadari sebagai bentuk dominasi simbolik.

Simbol visual yang digunakan dalam teks kebijakan atau strategi modern sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai pelengkap semiosis multimodal. Fairclough menunjukkan pentingnya memperhatikan visual seperti diagram, logo, atau desain tata letak dalam dokumen resmi, karena elemen-elemen tersebut turut menyampaikan pesan hegemonik tentang kemajuan, modernitas, dan efisiensi. Visualisasi seperti peta strategi, bagan transformasi digital, atau infografik statistik perkembangan ICT bukan hanya berfungsi informatif, melainkan juga persuasif secara ideologis, mengokohkan citra profesionalisme dan kredibilitas narasi utama.

Akhirnya, keseluruhan teks menciptakan suatu medan wacana yang dikonstruksi melalui artikulasi interdiskursif antara berbagai genre, gaya, dan diskursus. Fairclough menekankan pentingnya interdiskursivitas sebagai sarana untuk memahami bagaimana elemen diskursif yang berasal dari ranah ekonomi,

teknologi, dan pemerintahan dirangkai menjadi suatu struktur naratif yang kohesif dan hegemonik. Dalam praktik ini, genre seperti laporan kebijakan, wawancara pejabat, dan presentasi akademik saling berbaaur membentuk satu representasi dunia yang mendukung dominasi wacana tertentu. Struktur ini tidak bersifat netral, melainkan hasil dari proses pemilihan dan pengecualian yang melibatkan relasi kuasa dan strategi ideologis yang kompleks.

b. Praktik Diskursif

Produksi teks dalam perspektif Critical Discourse Analysis yang dikembangkan Fairclough melibatkan lebih dari sekadar aktivitas penulisan atau penyusunan ujaran; ia merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh berbagai institusi, ideologi, dan kepentingan. Teks tidak hadir sebagai entitas netral, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara agen sosial dengan struktur yang membatasi dan mengarahkan tindakan mereka (Fairclough 2013). Dalam konteks ini, produksi teks kerap dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas simbolik dan akses terhadap sumber daya wacana seperti pemerintah, lembaga internasional, atau pakar teknokratis. Proses produksi ini sekaligus mencerminkan posisi dominan dalam struktur sosial yang memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk menentukan arah dan isi dari diskursus yang disebarkan secara luas.

Distribusi teks merupakan tahap penting dalam praktik diskursif karena memungkinkan penyebaran makna yang telah diproduksi kepada khalayak yang lebih luas. Penyebaran tidak hanya dilakukan secara literal melalui media cetak, digital, atau pidato resmi, tetapi juga melalui cara-cara yang lebih simbolik dan terstruktur, seperti konferensi, forum internasional, pelatihan kebijakan, atau penyusunan pedoman teknis (Fairclough 2013). Dalam banyak kasus, distribusi ini melibatkan proses resemantisasi, yaitu ketika teks yang sama diadaptasi atau dikemas ulang untuk konteks atau audiens yang berbeda. Proses ini menunjukkan

bagaimana kekuatan simbolik tidak hanya bersandar pada produksi makna awal, tetapi juga pada kemampuan untuk mengatur sirkulasi dan reartikulasi wacana secara strategis di berbagai ruang sosial.

Penerimaan teks atau bagaimana teks diterima oleh khalayak tidaklah seragam dan selalu terbuka terhadap interpretasi yang beragam. Terdapat kemungkinan pembaca, pendengar, atau penonton memaknai teks dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan maksud pengarang atau penyusunnya. Interpretasi ini bergantung pada posisi sosial, latar belakang ideologis, serta pengalaman diskursif pembaca itu sendiri. Dalam beberapa kasus, audiens mungkin menunjukkan resistensi terhadap pesan yang disampaikan, sementara dalam konteks lain, teks bisa diserap dan direproduksi tanpa kritik sebagai bagian dari wacana dominan. Proses penerimaan yang kompleks ini menjadi medan tarik-menarik antara dominasi dan negosiasi makna yang menegaskan sifat dinamis dari wacana sosial.

Teks-teks yang dihasilkan dalam kerangka tertentu seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rantai intertekstualitas yang menghubungkan satu teks dengan teks lainnya. Dalam praktik diskursif, teks cenderung mengacu, mengutip, atau memodifikasi teks sebelumnya dan dengan demikian terlibat dalam proses yang disebut Fairclough sebagai interdiskursivitas. Hal ini memperlihatkan bagaimana makna dalam sebuah teks bukan hanya dibentuk oleh konteks produksinya, tetapi juga oleh teks-teks yang mendahuluinya dan relasi historis yang membentuknya (Fairclough 2013). Strategi ini memungkinkan pembuat teks untuk memberikan legitimasi, membingkai ulang, atau mengaburkan kepentingan tertentu melalui pengulangan dan adaptasi wacana yang sudah mapan.

Kontrol terhadap praktik diskursif sering kali ditopang oleh mekanisme institusional yang menetapkan siapa yang berwenang memproduksi, menyebarkan, dan menafsirkan teks. Lembaga-

lembaga sosial, baik formal maupun informal, menyediakan kerangka normatif yang memandu bagaimana wacana dibentuk dan bagaimana ia seharusnya diterima. Misalnya, penggunaan jargon teknokratis atau bahasa ilmiah dapat memperkuat kesan objektivitas dan kebenaran, walaupun muatannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ideologis tertentu. Keberhasilan sebuah teks dalam membentuk kesadaran kolektif atau kebijakan publik sangat bergantung pada otoritas institusional yang menyertainya dan pada konsistensi distribusi serta penguatan narasi yang dilakukan secara berulang-ulang dalam berbagai bentuk dan medium.

c. Praktik Sosial

Produksi wacana tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Ia selalu berkelindan dengan struktur sosial yang kompleks, termasuk dinamika ekonomi-politik global, kebijakan negara, dan perubahan dalam relasi kelas serta institusi. Wacana yang tampak teknokratis dan netral seringkali justru lahir dari konteks sosial yang penuh ketimpangan dan ketegangan. Kondisi seperti neoliberalisme global, tekanan institusi internasional, serta tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan tatanan dunia baru menjadi pendorong utama bagi kemunculan diskursus tertentu (Fairclough 2013). Wacana ini tidak hanya merefleksikan dunia, tetapi juga membentuk cara dunia dipahami dan diorganisasi.

Ideologi memainkan peran sentral dalam proses diskursif karena ia bekerja secara tersembunyi melalui bahasa, struktur narasi, dan kerangka berpikir yang dibentuk oleh teks. Dalam banyak kasus, ideologi tidak muncul sebagai doktrin eksplisit, melainkan sebagai asumsi yang dianggap alamiah dan tak perlu dipertanyakan (Fairclough 2013). Melalui normalisasi bahasa-bahasa teknis dan penyederhanaan kompleksitas sosial menjadi strategi-solusi yang seolah netral, teks dapat menyelundupkan kepentingan ideologis tertentu. Strategi ini memperlihatkan bagaimana wacana digunakan untuk mengatur makna, membingkai cara berpikir, serta

mengarahkan tindakan sosial ke dalam jalur-jalur yang dianggap “logis” dan “modern”, padahal sangat sarat dengan nilai dan kepentingan.

Relasi kekuasaan tercermin dalam siapa yang memiliki kapasitas untuk mendefinisikan masalah sosial dan siapa yang dapat menentukan solusi yang sah. Kekuasaan diskursif bukan hanya terletak pada institusi formal seperti pemerintah atau organisasi internasional, tetapi juga tersebar dalam mekanisme representasi yang mengatur siapa yang boleh berbicara, bagaimana sesuatu dikatakan, dan siapa yang didengar. Aktor-aktor yang memiliki akses terhadap media, academia, dan lembaga perumus kebijakan cenderung memonopoli produksi makna dan mendominasi ranah publik. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap arena wacana dan memperkuat struktur hierarkis yang ada di masyarakat.

Proses hegemonik terjadi ketika satu bentuk wacana tertentu berhasil menjadi “akal sehat” yang diterima luas, bahkan tanpa disadari. Hegemoni ini diperkuat melalui pengulangan dan reproduksi terus-menerus di berbagai medium, mulai dari pidato resmi, dokumen kebijakan, hingga media massa. Ketika satu narasi berhasil mengesampingkan alternatif lain dan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya jalan yang masuk akal, maka dominasi ideologis telah bekerja dengan sangat efektif. Kondisi ini mengakibatkan homogenisasi pemahaman masyarakat tentang isu tertentu, membatasi ruang imajinasi politik, dan menekan bentuk-bentuk resistensi yang muncul.

Keterhubungan antara wacana dan praktik sosial menjelaskan bagaimana teks bukan hanya produk reflektif, tetapi juga alat performatif yang mampu mengarahkan realitas sosial ke bentuk tertentu. Diskursus yang diproduksi dalam kerangka ideologis dan relasi kuasa tersebut akan berdampak pada pembentukan identitas kolektif, penataan ulang prioritas kebijakan,

dan restrukturisasi ruang sosial (Fairclough 2013). Ketika wacana menjadi instrumen untuk membingkai masa depan dan menetapkan arah pembangunan, maka ia juga berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap pikiran dan tindakan. Dalam konteks ini, analisis praktik sosial membuka ruang untuk melihat bagaimana realitas tidak sekadar ditafsirkan melalui teks, tetapi dikonstruksi secara aktif demi melanggengkan tatanan sosial tertentu.

2. Relevansi Fairclough dalam Studi Wacana Digital

Kontribusi pemikiran Norman Fairclough menjadi sangat relevan dalam menelaah dinamika wacana digital yang terus berkembang saat ini. Pendekatannya yang menggabungkan analisis linguistik dengan pemahaman terhadap struktur sosial-politik memungkinkan kita untuk melihat bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai instrumen kekuasaan yang aktif membentuk realitas sosial (Fairclough 2013). Dalam ruang digital, bahasa berkembang dalam bentuk yang lebih cair dan multimodal, menjadikan pendekatan analitis yang mempertimbangkan dimensi sosial dan historis semakin penting. Kemampuan untuk membongkar relasi antara struktur kalimat, pilihan leksikal, dan kepentingan ideologis menjadi kunci dalam memahami bagaimana makna diproduksi dan dinegosiasikan di ranah daring.

Ruang digital menyediakan platform yang sangat luas bagi beragam aktor untuk memproduksi dan mendistribusikan wacana. Namun, tidak semua pihak memiliki pengaruh yang setara. Fairclough menekankan pentingnya memetakan relasi kekuasaan dalam setiap praktik diskursif, termasuk bagaimana algoritma, seleksi konten, dan moderasi digital berperan sebagai bentuk baru otoritas simbolik (Nojeng et al. 2024). Siapa yang diizinkan bicara, bagaimana bentuk pembicaraan itu, dan siapa yang didengar menjadi isu sentral dalam memahami dinamika diskursus digital. Dalam konteks ini, analisis terhadap praktik interaksi digital memerlukan pendekatan yang tidak

hanya melihat bentuk ujaran, tetapi juga konteks institusional dan teknologi yang melatarbelakanginya.

Transformasi ideologi di era digital berlangsung dengan sangat cepat melalui mekanisme viralitas, interaktivitas, dan partisipasi pengguna. Fairclough memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami proses ini melalui konsep interdiskursivitas dan resemantisasi. Di media sosial misalnya, wacana populer dapat dengan cepat bergeser makna atau mengalami pembingkai ulang melalui komentar, meme, atau kutipan ulang yang dimodifikasi. Ini memperlihatkan bagaimana ideologi tidak hadir sebagai struktur kaku, tetapi sebagai medan yang terus-menerus dinegosiasikan. Analisis terhadap perubahan ideologi ini menuntut pemahaman terhadap bagaimana teks-teks digital dimaknai secara kolektif dalam praktik sosial yang terus bergerak.

Dominasi dan resistensi merupakan dua sisi dari praktik wacana yang juga tercermin dalam ruang digital. Fairclough membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk menantanginya. Dalam ruang-ruang seperti Twitter, forum daring, dan kanal video, praktik diskursif sering kali memuat upaya hegemoni melalui pembingkai tertentu, disertai munculnya kontra-wacana yang menantang narasi dominan. Analisis terhadap konflik diskursif ini tidak hanya mengungkapkan siapa yang berkuasa, tetapi juga siapa yang berupaya merebut ruang untuk berbicara, dengan bahasa sebagai senjata utama dalam medan kontestasi tersebut.

Kekuatan pendekatan Fairclough terletak pada kemampuannya untuk menjembatani antara analisis mikro pada level teks dengan struktur makro yang membentuk masyarakat (Heathy 2020). Dalam studi wacana digital, sinergi ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap bagaimana bahasa membentuk dan dibentuk oleh konteks sosial yang lebih luas, termasuk kapitalisme digital, budaya populer, dan mekanisme pengawasan daring. Ketika media digital

semakin menjadi arena utama pembentukan opini publik dan identitas kolektif, pendekatan yang mengintegrasikan dimensi linguistik, ideologis, dan struktural menjadi kebutuhan mendesak. Fairclough menyediakan fondasi kritis untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik narasi-narasi digital yang tampak biasa dan tak bermasalah.

C. Konsep Politik Solidaritas

1. Solidaritas Politik sebagai Aksi Kolektif

Solidaritas politik sebagai aksi kolektif bukan sekadar cerminan dari empati sesaat atau simpati pasif, melainkan sebuah bentuk keterlibatan yang menyatukan kesadaran bersama atas ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok yang secara historis mengalami diskriminasi. Dalam konteks ini, solidaritas bukan tentang menyukai satu sama lain, tetapi tentang merasakan keterhubungan ideologis yang mendalam yang mendorong kelompok-kelompok ini untuk bertindak melawan sistem yang menindas mereka (Perdana 2020). Interaksi antara kelompok yang sama-sama termarginalisasi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya semangat perlawanan kolektif karena mereka menemukan bahwa ketidakadilan yang mereka alami bukanlah kasus yang terisolasi, tetapi bagian dari sistem yang lebih luas.

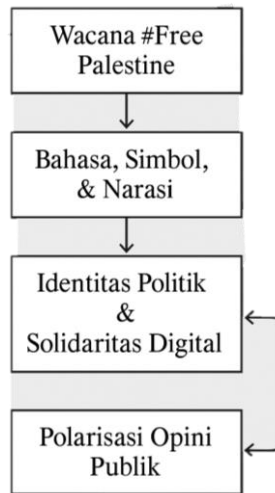
Dimensi afektif dari solidaritas muncul ketika individu tidak hanya mengenali penderitaan kelompok lain, tetapi juga merasa marah dan frustrasi terhadap ketidakadilan tersebut seolah-olah mereka sendiri yang mengalaminya. Emosi seperti kemarahan kolektif dan rasa fraternalistik deprivasi menjadi bahan bakar utama bagi mobilisasi sosial (Kristianto et al. 2021). Proses ini diperkuat melalui interaksi antar-kelompok yang membuka ruang diskusi tentang pengalaman diskriminasi yang serupa. Ketika anggota kelompok melihat bahwa pengalaman mereka bukan pengecualian, melainkan bagian dari pola penindasan yang lebih luas, maka tumbuhlah kebutuhan untuk bersatu dan melawan secara kolektif.

Dari sisi ideologis, solidaritas politik dapat terbentuk ketika individu dari kelompok yang berbeda mulai melihat perjuangan mereka dalam satu kerangka yang sama. Kesadaran bahwa perjuangan satu kelompok adalah perjuangan semua kelompok yang tertindas membentuk identitas bersama yang transformatif. Dalam hal ini, solidaritas tidak menghapus identitas kelompok, melainkan mengintegrasikannya dalam satu proyek politik yang lebih besar. Misalnya, wacana solidaritas umat atau anti-kolonialisme sering kali muncul dari pengalaman sejarah kolektif yang menciptakan narasi bersama tentang perlawanan dan pembebasan.

Kontak antara kelompok-kelompok yang sama-sama tertindas, jika terjadi dalam konteks yang mendukung pengakuan atas ketimpangan struktural, dapat meningkatkan perasaan efikasi kolektif. Kesadaran bahwa kelompok mereka tidak sendirian dalam menghadapi diskriminasi, tetapi merupakan bagian dari koalisi yang lebih besar, menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan sosial mungkin dilakukan (Angga et al. 2023). Keyakinan ini sering kali menjadi titik balik dari kesadaran pasif menuju keterlibatan aktif. Aksi kolektif yang kemudian muncul tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga memperkuat jaringan solidaritas yang berkelanjutan.

Pengalaman interaksi positif antar kelompok yang dimarginalisasi juga bisa menjadi katalis bagi pembentukan struktur solidaritas digital, di mana jejaring media sosial digunakan untuk menyebarkan narasi ketidakadilan dan membangun dukungan lintas batas. Di era digital, dimensi afektif dan ideologis dari solidaritas politik dapat diartikulasikan melalui tagar, petisi daring, atau kampanye visual yang memobilisasi emosi dan memperkuat identitas kolektif. Gerakan semacam ini mencerminkan bahwa solidaritas bukan hanya aksi spontan, tetapi produk dari kerja emosional dan ideologis yang terorganisir, terus tumbuh, dan melintasi batas-batas komunitas tradisional.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Media sosial X berperan penting sebagai ruang produksi dan reproduksi solidaritas digital dalam konteks isu Palestina. Dalam platform ini, wacana *#FreePalestine* berkembang menjadi simbol perlawanan dan ekspresi kepedulian terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Bahasa yang digunakan, seperti kata-kata perlawanan, kemerdekaan, dan penjajahan, disertai dengan simbol-simbol seperti bendera Palestina, gambar anak-anak korban perang, hingga narasi sejarah penjajahan Israel atas wilayah Palestina, berperan sebagai alat untuk menyampaikan dan memperkuat pesan politik. Wacana ini tidak hadir secara netral, melainkan diproduksi dan disebarluaskan secara aktif oleh individu, komunitas, maupun influencer yang memiliki keberpihakan ideologis. Melalui praktik berbagi konten, retweet, dan penggunaan hashtag, masyarakat pengguna media sosial terlibat dalam konstruksi makna bersama yang kemudian melahirkan bentuk solidaritas digital yang terstruktur.

Solidaritas digital yang terbentuk melalui praktik komunikasi tersebut tidak hanya menunjukkan dukungan moral terhadap Palestina, tetapi juga memunculkan bentuk baru identitas politik masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Identitas ini terbentuk dari pengakuan kolektif atas nilai-nilai

kemanusiaan, keadilan global, dan perlawanan terhadap penindasan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ekspresi digital seperti postingan, kampanye daring, hingga petisi online. Namun, di balik penguatan solidaritas tersebut, media sosial juga menjadi lahan subur bagi terjadinya polarisasi opini publik. Narasi yang mendukung Palestina seringkali dibenturkan dengan narasi yang pro-Israel, menciptakan ruang perdebatan tajam yang bersifat emosional, bahkan agresif. Polarisasi ini memperlihatkan bagaimana identitas politik yang terbentuk secara digital mampu memperkuat perpecahan pendapat publik dalam memahami dan menyikapi isu global. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi medium informasi, tetapi juga arena pembentukan identitas dan kontestasi wacana yang berdampak pada dinamika sosial-politik masyarakat global.

BAB III

POTRET OBJEK PENELITIAN

A. Konflik Hamas-Israel 2023-2024

Konflik antara Hamas dan Israel kembali memuncak pada tahun 2023 dengan skala kekerasan yang mencengangkan dunia internasional. Awal mula eskalasi terbaru ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel (Widyrianto 2025). Serangan tersebut bukan sekadar peluncuran roket, tetapi juga mencakup infiltrasi militan bersenjata ke wilayah Israel, menyebabkan pembantaian warga sipil yang disebut sebagai salah satu yang paling berdarah dalam sejarah modern negara itu. Ketika publik internasional masih terpana oleh kejadian tersebut, banyak analis mempertanyakan bagaimana sebuah organisasi seperti Hamas bisa melancarkan serangan yang begitu terorganisir terhadap negara dengan salah satu sistem intelijen dan pertahanan paling canggih di dunia.

Serangan Hamas dilakukan dengan strategi kejutan yang kompleks, memanfaatkan kelemahan dalam sistem pertahanan Israel. Israel, yang selama ini sangat mengandalkan kekuatan teknologi seperti sistem pertahanan udara Iron Dome dan Unit 8200 untuk pengintaian sinyal, tampaknya gagal membaca tanda-tanda pergerakan strategis Hamas (Ardaffa 2024). Ketika Hamas melepaskan lebih dari lima ribu roket dalam waktu bersamaan, sistem pertahanan Israel mengalami titik jenuh dan tidak mampu menahan semua serangan. Ketidaksiapan intelijen internal, persepsi bahwa Hamas tidak lagi berambisi melakukan konfrontasi terbuka, serta penonaktifan operasi penting di perbatasan Gaza turut menjadi penyebab utama kerentanan Israel terhadap serangan tersebut.

Sebagai tanggapan, Israel segera mendeklarasikan perang dan meluncurkan Operasi “Iron Sword” yang dimulai dengan serangkaian serangan udara besar-besaran ke wilayah Gaza. Tahap pertama dari operasi militer ini berfokus pada penghancuran infrastruktur militer Hamas, termasuk markas intelijen, fasilitas produksi senjata. Konflik antara Hamas dan Israel pada 2023 hingga 2024 menandai eskalasi militer terbesar dalam beberapa dekade terakhir

antara kedua pihak yang telah lama berseteru (Ardaffa 2024). Serangan dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas meluncurkan serangan kejutan ke wilayah Israel dengan menembakkan lebih dari lima ribu roket dalam waktu singkat, disertai dengan infiltrasi pasukan bersenjata ke daerah perbatasan Israel dari Gaza. Aksi ini bukan hanya skala kecil, melainkan menciptakan dampak psikologis dan fisik yang besar terhadap Israel. Sejumlah kota dan komunitas di sekitar perbatasan mengalami kerusakan parah dan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Serangan itu juga terjadi pada hari peringatan Yom Kippur, hari suci umat Yahudi, yang mengingatkan publik pada serangan mendadak dalam Perang Yom Kippur 1973 (Widyrianto 2025). Keberhasilan taktis Hamas memanfaatkan elemen kejutan, lemahnya pengawasan intelijen, serta serangan simultan dari darat dan udara menunjukkan pergeseran strategi dan peningkatan kemampuan militer dari kelompok tersebut.

Keberhasilan Hamas dalam melakukan serangan besar-besaran ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap sistem intelijen dan keamanan Israel yang selama ini dianggap salah satu yang terbaik di dunia. Israel memiliki sistem pertahanan yang sangat canggih seperti Iron Dome dan jaringan pengawasan yang kompleks, namun serangan tersebut menunjukkan adanya celah besar dalam kesiapsiagaan dan kemampuan deteksi dini. Beberapa pihak menilai bahwa Israel terlalu bergantung pada teknologi dan kurang memperhatikan indikator ancaman konvensional seperti pelatihan militan di Gaza dan Lebanon serta arus senjata dari Iran. Unit intelijen penting seperti Unit 8200 bahkan tidak aktif di wilayah Gaza saat hari serangan terjadi, yang merupakan kelalaian strategis sangat fatal. Sistem pertahanan Iron Dome juga kewalahan menghadapi volume roket yang sangat besar secara simultan, menunjukkan bahwa keunggulan militer Israel masih bisa dilumpuhkan lewat taktik asimetris yang direncanakan secara matang (Alfriandi and Zuhriah 2024).

Setelah serangan tersebut, Israel secara resmi menyatakan perang terhadap Hamas dan meluncurkan operasi militer besar-besaran bertajuk "*Operation Iron Sword*" (Ervi et al. 2024). Fase pertama dari operasi ini melibatkan pemboman udara yang sangat intensif terhadap sasaran-sasaran

strategis Hamas di wilayah utara Gaza. Target utamanya adalah fasilitas produksi senjata, pusat komando dan intelijen Hamas, serta lokasi peluncuran roket yang tersebar di berbagai titik padat penduduk. Dalam waktu singkat, ribuan serangan udara diluncurkan, menyebabkan kehancuran besar-besaran di Gaza. Israel juga memobilisasi sekitar 300.000 pasukan cadangan dan melakukan blokade total terhadap wilayah Gaza, termasuk penghentian pasokan listrik, air, bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan (Ervi et al. 2024). Tindakan ini memicu krisis kemanusiaan yang semakin memperburuk penderitaan warga sipil Palestina. Di sisi lain, strategi militer ini bertujuan untuk melemahkan struktur militer dan pemerintahan Hamas yang telah mengakar kuat sejak kelompok tersebut mengambil alih kendali Gaza pada 2007.

Fase kedua dari perang ini dimulai pada akhir Oktober 2023, ketika pasukan darat Israel melakukan invasi darat besar-besaran ke wilayah utara Gaza. Serangan ini dilakukan secara bertahap dengan pendekatan hati-hati karena kawasan tersebut sangat padat penduduk dan penuh dengan jaringan terowongan bawah tanah yang dijadikan markas serta jalur logistik oleh Hamas (Widyrianto 2025). Pertempuran berlangsung sengit, terutama di sekitar kota Gaza dan Beit Hanoun. Banyak fasilitas sipil seperti rumah sakit dan sekolah menjadi titik konflik karena dugaan bahwa kelompok Hamas menggunakan bangunan sipil sebagai tempat persembunyian atau peluncuran serangan. Hal ini memicu kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menilai bahwa kedua belah pihak mengabaikan perlindungan terhadap warga sipil.

Di tengah intensitas pertempuran, upaya diplomatik internasional mulai meningkat. Pada bulan November 2023, mediasi yang dilakukan oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat menghasilkan kesepakatan gencatan senjata sementara (Chandra et al. 2024). Kesepakatan ini mencakup pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, di mana ratusan warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel sebagai imbalan atas pembebasan sandera yang ditahan Hamas. Meskipun gencatan senjata ini sempat membawa harapan akan perdamaian, situasi kembali memburuk ketika terjadi serangan di Yerusalem

pada akhir November, yang memicu runtuhnya perjanjian damai dan dimulainya kembali operasi militer oleh Israel pada awal Desember 2023.

Respons dunia internasional terhadap konflik ini sangat beragam dan mencerminkan perpecahan geopolitik global. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, pada awalnya menunjukkan dukungan kuat terhadap hak Israel untuk membela diri. Akan tetapi, seiring meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza, kritik terhadap pendekatan militer Israel mulai bermunculan (Chandra et al. 2024). Seruan untuk gencatan senjata permanen dan pengiriman bantuan kemanusiaan meningkat, terutama dari PBB, Uni Eropa, dan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Di sisi lain, negara-negara seperti Iran, Turki, dan sejumlah anggota Organisasi Kerja Sama Islam menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan militer Israel sebagai bentuk agresi yang tidak proporsional.

Situasi di kawasan juga menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi regional. Serangan dari kelompok bersenjata lain yang berafiliasi dengan Iran seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi Houthi di Yaman menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya berdampak lokal, tetapi berpotensi meluas menjadi konflik kawasan. Aktivitas kelompok bersenjata di wilayah perbatasan utara Israel meningkat dan menyebabkan bentrokan tambahan. Di Laut Merah, serangan terhadap kapal-kapal dagang oleh kelompok pro-Iran menjadi perhatian serius karena berpengaruh terhadap jalur perdagangan global. Kondisi ini menambah tekanan terhadap negara-negara besar untuk mencegah pecahnya perang regional yang lebih luas.

Ditengah dinamika yang kompleks ini, tekanan politik terhadap pemerintahan Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, juga meningkat. Banyak pihak menilai bahwa kegagalan intelijen dan keamanan dalam mencegah serangan 7 Oktober adalah cerminan dari kelemahan dalam kepemimpinan nasional dan perpecahan politik domestik. Kritik datang dari oposisi, masyarakat sipil, dan bahkan sekutu politik sendiri. Tuntutan untuk membentuk komisi penyelidikan independen dan evaluasi ulang kebijakan keamanan mulai mengemuka (Chandra et al. 2024). Sementara itu, Hamas sendiri menghadapi kecaman atas taktik penggunaan warga sipil sebagai

tameng manusia, yang memperburuk krisis kemanusiaan dan mempersempit ruang diplomatik.

Konflik ini juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap hubungan internasional Israel, khususnya dengan sekutu-sekutunya. Ketegangan muncul antara kepentingan keamanan Israel dan tekanan dari dunia internasional untuk menghentikan kekerasan serta menjamin perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Hubungan dengan Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pendukung utama, mulai diuji oleh perbedaan pandangan dalam penanganan konflik ini. Sementara itu, negara-negara Arab mulai memperkuat suara kolektif mereka untuk mendesak solusi dua negara sebagai jalan keluar jangka panjang yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Palestina-Israel.

Dalam situasi yang terus berkembang ini, banyak analis menyebut bahwa konflik Hamas-Israel 2023–2024 akan menjadi titik balik dalam sejarah panjang konflik Palestina-Israel. Keberhasilan atau kegagalan dari masing-masing pihak dalam mencapai tujuan politik dan militer mereka akan menentukan arah masa depan kawasan (Widyrianto 2025). Sementara itu, penderitaan sipil terus menjadi isu utama yang menggugah keprihatinan publik global. Sebuah resolusi jangka panjang tidak hanya memerlukan tekanan diplomatik, tetapi juga keberanian politik dari kedua belah pihak untuk mengubah pendekatan lama dan mencari jalan damai yang lebih manusiawi dan inklusif.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan posisi yang tidak berubah sejak era kemerdekaan, yakni mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi, termasuk yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina. Dukungan ini tidak hanya bersifat simbolik atau retorik, tetapi diwujudkan dalam berbagai forum diplomatik regional maupun internasional. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berulang kali menyatakan bahwa Indonesia mengecam keras serangan militer Israel yang menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Indonesia menyatakan bahwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi

manusia yang dilakukan oleh Israel telah melampaui batas kemanusiaan, serta melanggar norma hukum internasional, khususnya hukum humaniter (Ardaffa 2024). Pemerintah Indonesia menuntut agar dunia internasional segera menghentikan kekerasan dan memulai langkah konkret untuk memulihkan kondisi keamanan serta menjamin hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka.

Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia menjalankan diplomasi aktif untuk menyuarakan isu Palestina di berbagai forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, dan ASEAN. Indonesia mendesak agar dilakukan gencatan senjata segera, menghentikan blokade Gaza, serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan secara merata dan tanpa hambatan (Alfriandi and Zuhriah 2024). Dalam berbagai kesempatan, Menteri Luar Negeri Indonesia menyoroti standar ganda yang digunakan negara-negara besar dalam merespons konflik, di mana tindakan Israel terhadap Palestina sering kali dibiarkan tanpa sanksi. Indonesia dengan tegas menolak sikap pasif komunitas internasional dan mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama mendukung keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia juga menyerukan agar Dewan Keamanan PBB tidak menggunakan hak veto secara sewenang-wenang, terutama jika veto tersebut menghalangi penegakan hukum internasional terhadap kejahatan perang atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Dalam upaya lebih konkret, Indonesia melaksanakan diplomasi multilateral dan bilateral yang intensif dengan berbagai negara, termasuk negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Joko Widodo secara langsung mengangkat isu Palestina dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Jepang, Presiden Turki, hingga Raja Yordania, dengan menekankan pentingnya gencatan senjata segera dan distribusi bantuan kemanusiaan (Nurhasanah and Setiawati 2024). Langkah ini diiringi pula oleh lawatan Menteri Luar Negeri Indonesia ke beberapa negara kunci seperti Tiongkok, Rusia, dan Prancis untuk menggalang dukungan bagi penghentian agresi Israel serta mendesak terbentuknya mekanisme akuntabel yang mampu memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia secara jelas menyampaikan bahwa tanggung jawab global dalam melindungi rakyat Palestina bukan hanya tugas negara Muslim, tetapi kewajiban seluruh negara yang mengedepankan nilai keadilan dan hak asasi manusia universal.

Indonesia juga menunjukkan bentuk dukungan konkret melalui diplomasi kemanusiaan yang melibatkan pengiriman bantuan ke Gaza, pembangunan rumah sakit, dan penggalangan dana publik secara besar-besaran. Pemerintah Indonesia mengirimkan ratusan ton bantuan berupa obat-obatan, makanan, selimut, serta perlengkapan medis melalui berbagai jalur, termasuk melalui Mesir dan Yordania (Manurung and Heriamsal 2024). Tidak hanya itu, rumah sakit Indonesia di Gaza, yang dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, menjadi simbol kuat solidaritas Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Bantuan ini mencerminkan bahwa dukungan Indonesia tidak sebatas pernyataan diplomatik, tetapi juga nyata dalam aksi di lapangan, termasuk pengiriman relawan dan tenaga medis. Pemerintah juga mendukung pelaksanaan penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel, sekaligus mendorong pembentukan Komisi Penyelidikan Independen di bawah PBB (Manurung and Heriamsal 2024).

Lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, khususnya yang mewakili mayoritas Muslim, juga menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan mengutuk keras agresi militer Israel. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, tidak hanya mengeluarkan pernyataan keprihatinan dan kecaman, tetapi juga menginisiasi penggalangan dana secara nasional yang melibatkan masjid, pesantren, lembaga zakat, dan organisasi masyarakat Islam lainnya (Simanjorang et al. 2023). Dana yang terkumpul disalurkan untuk bantuan kemanusiaan di Palestina, termasuk dalam bentuk obat-obatan dan layanan medis. Lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga turut aktif dalam aksi solidaritas, baik dalam bentuk doa bersama, edukasi publik, maupun pengiriman bantuan kemanusiaan. Aksi ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga keagamaan di Indonesia menjadi kekuatan sosial yang mendukung diplomasi resmi negara

dalam isu Palestina, serta memperluas jejaring solidaritas dari tingkat nasional ke tingkat internasional.

Dari keseluruhan langkah dan sikap tersebut, terlihat bahwa posisi Indonesia terhadap konflik Hamas-Israel sangat tegas, konsisten, dan berorientasi pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan anti-kolonialisme. Indonesia berupaya agar penyelesaian konflik Palestina tidak hanya berhenti pada tuntutan penghentian kekerasan, tetapi juga mencakup penyelesaian akar masalah melalui implementasi solusi dua negara berdasarkan garis perbatasan 1967 (Solihin et al. 2023). Indonesia menekankan pentingnya peran diplomasi yang adil dan inklusif dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan, dengan menjamin pengakuan atas hak rakyat Palestina untuk hidup dalam kemerdekaan, kedamaian, dan martabat (Setiawan 2024). Posisi ini bukan hanya representasi kebijakan luar negeri, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai konstitusional dan semangat solidaritas umat manusia yang tertanam dalam jati diri bangsa Indonesia. Dengan terus memperkuat peran di forum-forum internasional, Indonesia berharap bahwa perjuangan diplomasi ini akan mempercepat tercapainya keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.

B. Masyarakat Indonesia dalam Konteks Isu Palestina

Solidaritas Indonesia terhadap Palestina memiliki akar historis yang panjang, terjalin sejak sebelum Indonesia merdeka hingga masa kontemporer. Saat bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya pada 1945, tokoh-tokoh Palestina seperti Syekh Muhammad Amin al-Husaini telah menyuarakan pengakuan dan dukungan terhadap kedaulatan Indonesia melalui diplomasi di Timur Tengah (Al-Munawarah 2025). Momentum tersebut menjadi awal dari hubungan emosional dan ideologis antara kedua bangsa yang sama-sama pernah mengalami penjajahan. Dukungan Palestina terhadap Indonesia di masa lalu dikenang oleh banyak pihak sebagai “utang moral” yang harus dibalas dengan solidaritas yang setara. Narasi historis ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan pentingnya saling membantu antarbangsa tertindas. Maka, ketika Palestina mengalami penindasan oleh Israel, respons emosional masyarakat Indonesia bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga berbasis pada rasa tanggung jawab historis dan

semangat anti-kolonialisme yang telah lama hidup dalam memori kolektif bangsa.

Identitas keagamaan turut memperkuat basis solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia melihat penderitaan Palestina bukan semata isu politik atau kemanusiaan, tetapi juga sebagai isu keagamaan yang menyentuh nilai-nilai spiritual umat. Palestina dianggap sebagai simbol perlawanan umat Islam terhadap ketidakadilan global, khususnya karena keberadaan situs-situs suci seperti Masjid Al-Aqsa yang memiliki makna penting dalam sejarah Islam. Kesamaan keyakinan ini menciptakan keterikatan emosional yang kuat, di mana penderitaan rakyat Palestina dirasakan sebagai penderitaan bersama. Di berbagai pelosok Indonesia, dari kota besar hingga desa kecil, solidaritas terhadap Palestina diungkapkan melalui doa bersama, penggalangan dana di masjid-masjid, serta penyelenggaraan aksi damai yang menggambarkan kesatuan umat (Kaslam 2024). Agama dalam konteks ini berperan sebagai penggerak identitas kolektif yang melampaui batas teritorial dan menjadikan solidaritas terhadap Palestina sebagai bentuk manifestasi keimanan dan kepedulian global.

Media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel. Informasi yang disampaikan secara masif melalui berita, dokumenter, artikel, dan tayangan visual memperkuat empati masyarakat terhadap penderitaan warga Palestina. Representasi visual yang menampilkan anak-anak korban serangan, rumah-rumah yang hancur, dan krisis kemanusiaan di Gaza memberi dampak emosional yang mendalam. Dalam lanskap digital, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menjadi saluran utama penyebaran informasi dan kampanye solidaritas. Konten yang dibuat oleh warga biasa maupun tokoh publik beredar secara luas, menciptakan atmosfer kolektif yang memperkuat narasi keberpihakan terhadap Palestina. Algoritma platform digital memungkinkan penyebaran pesan yang cepat dan luas, menciptakan 'echo chamber' solidaritas yang semakin memperkuat komitmen publik terhadap isu ini. Dengan intensitas konsumsi media yang tinggi di kalangan masyarakat

Indonesia, opini publik pun dibentuk dalam ritme yang sangat cepat dan emosional.

Elite politik dan tokoh keagamaan di Indonesia juga memegang peran signifikan dalam mengarahkan narasi solidaritas nasional. Para pemimpin formal seperti presiden, menteri luar negeri, dan anggota parlemen sering kali menyuarakan kecaman terhadap agresi Israel dan menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam forum-forum nasional dan internasional. Sikap ini memperkuat legitimasi sikap publik serta memberikan ruang legal dan diplomatik untuk menggalang dukungan konkret. Tokoh-tokoh agama, baik dari organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga menerbitkan fatwa dan pernyataan resmi yang menyerukan umat Islam untuk membantu Palestina, baik melalui doa, zakat, infak, maupun boikot produk yang berafiliasi dengan Israel (Fatihah and Rokhim 2024). Keterlibatan elite keagamaan ini menambah bobot moral terhadap gerakan solidaritas, menjadikannya tidak sekadar ekspresi sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Islam.

Dalam dunia digital, solidaritas terhadap Palestina juga dimanifestasikan secara kreatif dan masif melalui kampanye-kampanye daring. Gerakan seperti BDS (*Boycott, Divestment, Sanctions*) diadopsi secara luas oleh komunitas digital Indonesia, dengan berbagai akun media sosial yang secara khusus dibuat untuk mengedukasi, menginformasikan, dan menggerakkan dukungan terhadap Palestina (Akbar et al. 2024). Salah satu bentuk aktivisme digital yang mencolok adalah gerakan “Julid Fīṣabīlillah,” di mana netizen Indonesia dan Malaysia menyerbu akun media sosial milik militer dan tokoh publik Israel dengan komentar bernada satire, kritik, atau sarkasme (Kurniawan 2025). Aksi ini, meski bersifat non-konvensional, dinilai sebagai bentuk psikologis dari perlawanan terhadap dominasi narasi pro-Israel. Hashtag yang mereka gunakan menjadi trending dan menandai bagaimana ekspresi keagamaan, nasionalisme, dan empati kemanusiaan berpadu dalam ruang digital sebagai bentuk perlawanan nonfisik yang tetap memiliki daya pengaruh besar.

Komunitas digital Indonesia, termasuk akun-akun anonim dan influencer, turut memainkan peran penting dalam menggerakkan solidaritas ini. Tidak sedikit akun yang secara sukarela memproduksi konten edukatif, infografis, dan narasi-narasi sejarah mengenai Palestina-Israel untuk memperluas wawasan publik dan menghindari simplifikasi isu. Beberapa akun bahkan merancang kampanye terkoordinasi untuk memboikot produk-produk tertentu, melacak aliran dana perusahaan besar yang mendukung Israel, dan memviralkan hashtag solidaritas (Asyahidda and Amalia 2022). Meskipun tidak berada dalam struktur organisasi formal, kekuatan kolektif ini terbukti mampu membentuk arus opini dominan yang mendesak negara untuk bertindak lebih aktif. Dalam ekosistem digital ini, akun anonim sering kali lebih berani dalam menyuarakan isu-isu sensitif dan berkontribusi dalam membentuk narasi alternatif yang kritis terhadap dominasi wacana global yang mendukung Israel.

Fatwa MUI No. 83 tahun 2023 menjadi titik penting dalam transformasi solidaritas ke ruang digital. Fatwa ini tidak hanya menyerukan dukungan moral, tetapi juga menganjurkan umat Islam untuk menggunakan zakat, infak, dan sedekah untuk perjuangan rakyat Palestina, serta memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel (Sinaga and Putra 2021). Penegasan hukum haram bagi umat Islam yang mendukung Israel secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan kekuatan hukum Islam dalam membentuk kesadaran kolektif. Fatwa ini memicu respon luas di media sosial dengan terbentuknya tagar seperti #BoikotIsrael dan kampanye edukasi digital oleh lembaga dan individu. Fatwa yang didukung otoritas keagamaan resmi memberi landasan legitimasi religius terhadap aksi-aksi digital yang dilakukan masyarakat, menjadikan aktivisme daring sebagai bagian dari ibadah dan perjuangan moral umat Islam (Laila, Mariani, and Fakhriani 2024).

Dalam lanskap ini, solidaritas digital yang dilakukan oleh komunitas muda memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka lebih luwes dalam menggunakan ekspresi visual, narasi meme, dan humor sarkastik untuk menyampaikan pesan politik yang kompleks. Aksi Julid Fīṣabīlillah, misalnya, bukan sekadar aktivitas iseng, melainkan strategi komunikasi yang dirancang untuk menarik perhatian global dan mendestabilisasi narasi hegemonik dari

media pro-Israel. Mereka memanfaatkan potensi viralitas konten untuk menciptakan resonansi psikologis, baik bagi pihak pendukung Palestina maupun bagi pihak lawan. Pendekatan ini menandai munculnya generasi baru aktivis yang melek media, mampu menggabungkan religiositas, nasionalisme, dan kecakapan digital menjadi kekuatan baru dalam perjuangan global.

Keterlibatan akun-akun publik seperti tokoh selebritas, influencer Muslim, hingga akademisi juga turut mengangkat isu Palestina ke panggung utama perbincangan nasional. Dengan audiens yang besar, mereka mampu memperluas jangkauan pesan dan menggugah kesadaran publik yang sebelumnya apatis atau kurang terinformasi (Satria et al. 2024). Mereka tidak hanya memproduksi ulang informasi yang sudah ada, tetapi juga menambahkan interpretasi personal, pengalaman spiritual, serta narasi emosional yang memperdalam keterlibatan audiens. Dalam hal ini, solidaritas digital menjadi ruang dialog antara personalitas publik dan pengikutnya, serta memperkuat relasi emosional kolektif terhadap perjuangan rakyat Palestina. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara dunia elite dan massa dalam memperjuangkan keadilan global.

Fenomena solidaritas digital Indonesia terhadap Palestina juga memperlihatkan pergeseran cara beragama masyarakat di era media baru. Nilai-nilai Islam tidak lagi semata diekspresikan dalam ritual konvensional, tetapi juga dalam bentuk partisipasi aktif di ruang publik digital (Kaslam 2024). Munāṣarah, sebagai doktrin keagamaan yang mengajarkan pentingnya tolong-menolong, kini diwujudkan melalui jari, klik, dan algoritma. Solidaritas bukan lagi monopoli negara atau lembaga formal, tetapi hadir dalam bentuk gerakan rakyat yang tersebar dan tidak terpusat. Dalam konteks ini, solidaritas terhadap Palestina adalah cermin dari perjumpaan antara warisan sejarah, identitas keagamaan, dan teknologi digital yang secara bersama membentuk wajah baru dari perjuangan global umat manusia.

C. Media Sosial X sebagai Ruang Wacana Publik

Media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, telah berevolusi dari sekadar platform microblogging menjadi ruang digital yang sangat signifikan dalam membentuk wacana publik di berbagai belahan dunia,

termasuk Indonesia. Sejarahnya dimulai sebagai medium komunikasi yang mengutamakan kecepatan, singkatnya informasi, serta keterhubungan antar pengguna melalui sistem following dan fitur retweet. Karakteristik ini memungkinkan informasi menyebar secara real-time dan membentuk diskusi kolektif dalam hitungan detik. Dalam konteks Indonesia, media sosial X menjadi semakin relevan sejak memasuki era politik digital, di mana komunikasi politik, kampanye pemilu, hingga respons terhadap isu sosial dan kebijakan publik dibentuk, dikembangkan, bahkan diperdebatkan secara terbuka di platform ini (Heryanto 2020). Tidak hanya oleh elite politik, tetapi juga oleh jurnalis, aktivis, akademisi, dan masyarakat umum. Seiring waktu, X tidak hanya menjadi cermin opini publik, tetapi juga turut mengonstruksi dan mengarahkan alur perdebatan nasional yang berdampak pada proses pengambilan keputusan politik.

Karakteristik utama dari media sosial X yang menjadikannya berbeda dari platform lain adalah kecepatannya dalam menyebarkan informasi dan keterbukaannya dalam mengakses konten diskusi publik. Platform ini tidak membatasi pengguna berdasarkan hubungan pertemanan seperti media sosial lainnya, melainkan memperbolehkan siapa pun untuk mengikuti dan membaca unggahan siapa saja, menjadikan X sebagai media terbuka yang sangat cocok untuk diskusi berskala luas. Dalam situasi tertentu atau krisis nasional, X menjadi ruang di mana berbagai narasi bertarung untuk mendapatkan perhatian publik. Selain sebagai penyebar informasi, X juga menjadi arena validasi sosial, di mana banyaknya retweet, like, atau reply dapat memperkuat kredibilitas sebuah opini atau mengubah persepsi terhadap isu tertentu (Carpenter, Rimmereide, and Turvey 2024). Ini menunjukkan bahwa media sosial X tidak hanya menghubungkan informasi dan manusia, tetapi juga membentuk hierarki simbolik baru dalam wacana digital.

Peran media sosial X dalam mobilisasi opini publik sangat kuat karena mampu menciptakan keterlibatan yang spontan dan luas. Ketika isu tertentu menjadi sorotan, pengguna X dapat secara cepat menggalang perhatian, solidaritas, bahkan aksi nyata hanya dengan mengandalkan kekuatan konten yang tepat dan momentum yang pas. Kampanye sosial, petisi, dan ajakan

demonstrasi sering kali bermula dari thread atau hashtag yang menjadi viral di X. Kekuatan platform ini terletak pada kemampuannya mengubah diskusi personal menjadi gerakan kolektif yang berdampak nyata di dunia offline. Hal ini disebabkan oleh sifat partisipatif media sosial X, di mana tidak hanya elite yang bisa bersuara, melainkan setiap pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan memengaruhi opini publik. Dalam konteks ini, X menjadi penggerak demokrasi digital, meskipun tantangan seperti disinformasi dan polarisasi tetap menjadi isu serius yang harus diantisipasi.

Fitur *trending topic* menjadi salah satu pilar utama yang memperkuat peran media sosial X dalam membentuk wacana publik. Ketika sebuah isu berhasil masuk ke daftar trending, perhatian publik akan terpusat pada topik tersebut, menciptakan efek bola salju yang memicu lebih banyak diskusi, investigasi, dan penyebaran informasi lanjutan. *Trending topic* tidak hanya mencerminkan apa yang dibicarakan masyarakat, tetapi juga mengarahkan perhatian kolektif ke arah tertentu (Murthy 2024). Dalam konteks politik, trending topic dapat menjadi indikator awal dari dinamika opini publik, bahkan dapat menekan elite politik untuk merespons atau mengubah strategi komunikasi mereka. Kekuatan trending topic sebagai fitur wacana publik menjadi sangat strategis dalam mempengaruhi persepsi, memicu solidaritas digital, hingga memobilisasi dukungan terhadap isu-isu yang dianggap penting secara kolektif.

Fitur *reply*, *repost*, dan *quote post* turut memperkuat karakter diskursif media sosial X. Fitur *reply* memungkinkan terjadinya dialog langsung antar pengguna, baik yang bersifat dialogis maupun debat terbuka. Hal ini menciptakan lapisan interaksi yang dinamis, di mana argumen dibantah, pendapat diperluas, atau narasi baru dibentuk berdasarkan respons kolektif. Sementara itu, fitur *repost* dan *quote post* memberikan pengguna kekuatan untuk mengomentari atau memperkuat konten tertentu sambil menambahkan opini personal (Murthy 2024). Mekanisme ini tidak hanya mempercepat penyebaran konten, tetapi juga mendorong diversifikasi perspektif. Interaksi yang terjalin dari fitur-fitur ini menciptakan ekosistem diskusi publik yang

reflektif, meskipun sering kali juga disalahgunakan dalam bentuk penyebaran kebencian atau informasi menyesatkan.

Media sosial X juga menghadirkan fitur *X Spaces*, sebuah forum diskusi audio real-time yang memberikan ruang baru bagi publik untuk berdiskusi secara langsung dalam format yang lebih personal. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga mendengar dan berbicara langsung tentang isu-isu aktual bersama tokoh publik, pakar, atau sesama netizen (Murthy 2024). Diskusi di *X Spaces* sering kali menjadi ajang dialog lintas ideologi, membuka peluang pertukaran informasi yang lebih dalam dan kontekstual. Dalam konteks demokrasi digital, fitur ini memperluas partisipasi politik rakyat secara substansial karena memungkinkan keterlibatan tidak hanya dalam bentuk tulisan tetapi juga suara dan ekspresi lisan yang lebih hidup. Di tengah tantangan ruang publik yang sering didominasi oleh elite, fitur ini menghadirkan peluang untuk menciptakan representasi opini yang lebih setara.

Kekuatan lain dari media sosial X sebagai ruang wacana publik adalah kemampuannya dalam menyediakan data mentah untuk analisis sentimen publik secara cepat dan *real-time*. Setiap interaksi pengguna, dari unggahan, balasan, hingga penggunaan emoji, dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap isu tertentu. Para pengamat politik, lembaga survei, hingga tim kampanye politik sering kali menggunakan data dari X untuk merumuskan strategi atau membaca dinamika elektoral. Dengan mengamati *keyword* tertentu, *trending hashtag*, dan analisis jaringan percakapan, mereka dapat memahami siapa yang berpengaruh, narasi apa yang dominan, serta sejauh mana suatu isu menembus lapisan sosial. Ini menunjukkan bahwa X bukan hanya ruang diskusi, melainkan juga sumber data sosial yang strategis dan bernilai tinggi dalam perumusan kebijakan maupun strategi komunikasi politik.

Meski begitu, media sosial X tidak lepas dari tantangan serius yang membayangi perannya sebagai ruang publik digital. Polarisasi yang tinggi, misinformasi, dan keberadaan akun-akun anonim yang menyebarkan ujaran kebencian menjadi bagian dari wajah gelap dari diskursus di X. Algoritma yang

dirancang untuk meningkatkan keterlibatan justru memperkuat echo chamber, yaitu kondisi di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sesuai dengan ideologi mereka, mempersempit ruang dialog dan kompromi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperlemah fungsi deliberatif dari ruang publik karena lebih banyak konflik simbolik daripada pertukaran rasional (Carpenter et al. 2024). Tantangan ini mendorong perlunya literasi digital yang kuat, termasuk kemampuan verifikasi informasi, mengenali bias, dan menjaga etika komunikasi dalam berinteraksi secara daring.

Media sosial X, yang dahulu dikenal sebagai Twitter, telah berevolusi menjadi salah satu ruang digital paling penting dalam kehidupan publik masyarakat global. Platform ini pertama kali diluncurkan sebagai media komunikasi singkat berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah pesan dalam batasan karakter tertentu (Murthy 2024). Seiring waktu, media sosial X mengalami transformasi fungsi, dari sekadar tempat berbagi kabar pribadi menjadi medium percakapan sosial, diskusi budaya, hingga perdebatan seputar nilai, norma, dan isu-isu kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, platform ini digunakan lintas demografi mulai dari kalangan muda, akademisi, komunitas, jurnalis, hingga tokoh agama sebagai ruang ekspresi dan artikulasi pendapat. Ciri khas dari media sosial X adalah keterbukaannya yang membuat siapa pun dapat menjangkau siapa saja, menciptakan suasana interaktif yang cair dan inklusif.

Salah satu karakteristik utama media sosial X adalah kecepatannya dalam menyebarkan informasi dan kemampuannya membentuk percakapan massal dalam waktu singkat. Ketika sebuah topik menjadi perhatian banyak orang, hanya butuh beberapa menit agar wacana tersebut menyebar ke seluruh penjuru jaringan. Ini disebabkan oleh fitur-fitur seperti *retweet*, *repost*, dan *quote post* yang mendorong penyebaran pesan secara berantai dan melibatkan banyak pengguna dalam satu ruang diskusi kolektif. Penyebaran ini tidak memerlukan waktu panjang karena setiap pengguna dapat terlibat tanpa batasan formalitas. Sifat terbuka dan real-time ini membuat media sosial X sangat efektif sebagai sarana untuk mengamplifikasi suara publik tentang isu-

isu yang memiliki resonansi sosial, mulai dari persoalan lingkungan, budaya populer, literasi digital, hingga hak asasi manusia.

Media sosial X berfungsi sebagai ruang diskursif yang memungkinkan pertukaran gagasan secara terbuka dan instan. Diskusi yang berlangsung tidak lagi terbatas pada institusi atau ruang tertutup seperti seminar atau ruang redaksi media tradisional. Kini, siapa pun yang memiliki akses internet dapat menjadi partisipan aktif dalam percakapan yang sedang berlangsung di masyarakat. Tidak jarang, sebuah utas atau cuitan dari akun anonim sekalipun memantik perdebatan publik berskala nasional, bahkan memengaruhi liputan media arus utama dan mendorong respons dari pejabat publik. Dalam konteks ini, media sosial X tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya opini, tetapi juga bertindak sebagai katalisator perubahan sosial dan politik (Heryanto 2020). Platform ini membuka peluang yang sama rata bagi siapa saja untuk menyampaikan kritik, menyuarakan dukungan, atau menantang dominasi wacana yang selama ini dikendalikan oleh kelompok elite. Ruang diskusi yang terbentuk bersifat horizontal, memungkinkan terciptanya dinamika demokratis di luar struktur formal negara.

Peran media sosial X dalam membentuk opini publik semakin diperkuat dengan fitur trending topic. Fitur ini berperan sebagai kompas perhatian publik digital, menampilkan topik-topik yang paling banyak dibicarakan dalam satu waktu tertentu. Ketika sebuah isu berhasil menjadi trending, ia memperoleh sorotan lebih luas, memancing partisipasi baru, dan sering kali menggiring respons dari pemangku kepentingan (Pratiwi 2024). Dalam masa kampanye politik atau ketika muncul isu nasional, *trending topic* menjadi medan kompetisi wacana, di mana kelompok pendukung dan penentang saling berebut ruang legitimasi. Tak jarang, trending topic juga menjadi senjata strategis bagi tim kampanye politik untuk menguji respons publik terhadap narasi tertentu sebelum menetapkan sebagai pesan resmi.

Fitur *reply* dan *quote post* memperdalam karakter deliberatif dari media sosial X. Melalui *reply*, percakapan dapat terjadi secara langsung, memperlihatkan bagaimana argumen dibangun, ditanggapi, dan diperdebatkan. Sedangkan *quote post* memberi ruang bagi pengguna untuk menambahkan

konteks, opini pribadi, atau kritik terhadap konten yang mereka bagikan ulang. Fitur-fitur ini menciptakan dinamika percakapan yang hidup dan reflektif, di mana argumen publik tidak hanya mengalir satu arah, tetapi berkembang dalam dialog yang berlapis-lapis. Meski sering kali percakapan dapat berubah menjadi konflik atau bahkan serangan personal, fitur-fitur ini juga memperlihatkan keberagaman sudut pandang yang menjadi kekuatan utama dalam ruang wacana publik yang sehat dan demokratis.

Keberadaan media sosial X juga mendorong munculnya budaya aktivisme digital yang kuat, terutama di kalangan anak muda. Hashtag seperti #ReformasiDikorupsi, #TolakOmnibusLaw, atau #BoikotIsrael bukan hanya menjadi simbol perlawanan, melainkan wadah kolektif untuk menyuarakan keresahan sosial yang aktual. Di balik hashtag tersebut terdapat jaringan solidaritas, strategi komunikasi, dan identitas bersama yang dibangun oleh komunitas daring. Penggunaan hashtag memungkinkan terjadinya penyatuan suara dari berbagai latar belakang tanpa harus berada dalam satu organisasi formal. Dengan demikian, media sosial X berperan bukan hanya dalam membentuk opini, tetapi juga dalam menciptakan identitas politik digital dan menyatukan gerakan sosial yang tersebar dalam ruang maya.

Dinamika media sosial X juga mencerminkan bagaimana algoritma memengaruhi arah diskursus publik. Konten yang paling banyak direspons akan lebih sering ditampilkan, membentuk siklus penguatan yang disebut echo chamber. Meski demikian, X tetap menyediakan peluang untuk membongkar dominasi satu narasi melalui keterbukaan akses terhadap akun dan informasi lintas ideologi. Peran pengguna dalam memutus rantai polarisasi ini menjadi kunci bagi keberlangsungan demokrasi digital yang lebih sehat.

Sebagai medium yang sangat cepat dan terbuka, media sosial X juga menjadi tempat pertama di mana berbagai bentuk informasi palsu atau hoaks menyebar. Ketika proses verifikasi lambat dan pengguna tidak memiliki literasi digital yang memadai, disinformasi dapat dengan mudah memengaruhi opini dan keputusan politik masyarakat. Untuk itu, fitur-fitur pelaporan konten, label peringatan, serta peran akun-akun pemeriksa fakta menjadi penting dalam menjaga integritas ruang publik digital. Beberapa inisiatif bahkan melibatkan

kolaborasi antara masyarakat sipil, media independen, dan pengembang platform untuk membangun sistem verifikasi yang partisipatif. Upaya ini mencerminkan bagaimana media sosial X juga menjadi ruang belajar dan penguatan kapasitas kritis masyarakat terhadap informasi.

Media sosial X telah menjelma menjadi arena kontestasi ide dan nilai yang sangat dinamis. Sebagai ruang publik digital, ia tidak hanya mencerminkan dinamika politik dan sosial, tetapi juga turut membentuknya. Interaksi yang terjadi di platform ini tidak bisa lagi dipandang sebagai percakapan semu, melainkan sebagai bagian integral dari proses pembentukan opini publik yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial dan kebijakan negara (Pratiwi 2024). Tantangan seperti polarisasi, disinformasi, dan bias algoritma harus dihadapi dengan strategi edukatif dan partisipatif, agar ruang ini tetap menjadi tempat bertumbuhnya demokrasi yang inklusif, kritis, dan reflektif. Media sosial X, dengan segala fiturnya, telah membuka jalan bagi masyarakat Indonesia untuk berbicara, berdebat, mengawasi, dan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan wacana publik yang lebih berkeadaban.

D. Hashtag *#FreePalestine* sebagai Praktik Solidaritas Digital

Hashtag *#FreePalestine* telah menjelma menjadi simbol perlawanan digital yang kuat dan bertahan lama terhadap dominasi politik dan militer Israel atas Palestina. Sejarah penggunaan tagar ini dapat ditelusuri sejak awal 2010-an, ketika media sosial mulai menjadi ruang baru untuk menyuarakan dukungan terhadap isu-isu global (Anisa 2023). Tagar ini muncul sebagai ekspresi kolektif dari simpati dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina, menyatukan beragam suara dari seluruh dunia dalam satu wacana digital yang terpusat. Meskipun awalnya digunakan oleh komunitas aktivis dan diaspora Palestina, penggunaannya berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari kampanye digital global, terutama saat terjadi eskalasi kekerasan. Dalam kerangka komunikasi budaya, *#FreePalestine* tidak sekadar menjadi ekspresi politik, tetapi juga representasi identitas, nilai moral, dan posisi etis individu maupun kelompok dalam merespons konflik internasional yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Makna simbolik dari *#FreePalestine* semakin kuat ketika digunakan dalam momentum-momentum penting, seperti serangan militer Israel ke Gaza atau penyerangan terhadap tempat suci di Yerusalem. Tagar ini melampaui batas sebagai alat kategorisasi konten, karena ia merepresentasikan nilai-nilai universal seperti kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam setiap gelombang penggunaannya, tagar ini memfasilitasi terjadinya transformasi opini publik global dengan menciptakan ruang dialog yang menyatukan narasi historis, emosional, dan politis. Keberadaannya juga berperan sebagai bentuk partisipasi simbolik, di mana pengguna yang menyertakan tagar tersebut dalam unggahan mereka menyatakan keberpihakan dan solidaritas secara aktif. Kesederhanaan bentuk tagar ini menyembunyikan kompleksitas makna yang dikandungnya, menjadikannya sebagai medium komunikasi kultural yang sangat efektif dan inklusif dalam menyuarakan isu Palestina secara luas.

Selama konflik Hamas-Israel 2023–2024, penggunaan hashtag *#FreePalestine* mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari sisi volume maupun intensitas keterlibatan publik. Dalam periode tersebut, tagar ini tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi juga menjadi kanal mobilisasi opini publik yang luar biasa efektif. Isu-isu terkait kekerasan, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza tersebar dengan cepat melalui unggahan yang menyertakan tagar ini. Perubahan dalam penggunaan juga terlihat dari cara masyarakat merespons narasi resmi pemerintah atau media arus utama dengan menyuguhkan narasi tandingan yang lebih emosional dan berbasis pengalaman korban. Evolusi tagar ini juga menunjukkan pergeseran strategi komunikasi digital: dari sekadar penyebaran informasi menjadi alat kampanye yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat lintas agama, etnis, dan kewarganegaraan dalam perjuangan bersama (Anisa 2023). Dengan cara ini, hashtag *#FreePalestine* menjelma sebagai bentuk ekspresi digital kolektif yang tidak dapat diabaikan oleh aktor politik global.

Interaksi antar pengguna media sosial menjadi elemen penting dalam menghidupkan tagar *#FreePalestine* sebagai praktik solidaritas digital. Retweet, quote post, dan reply menjadi sarana untuk memperluas narasi dan

memperdalam diskusi. Setiap kali sebuah unggahan tentang Palestina dibagikan ulang, ada tambahan makna dan konteks yang memperkaya wacana kolektif. Thread panjang yang berisi kronologi peristiwa, analisis politik, atau kesaksian langsung dari lapangan turut memberikan dimensi edukatif yang mendalam bagi pengguna yang baru mengikuti isu ini. Interaksi ini memperlihatkan bahwa publik tidak lagi sekadar konsumen informasi, tetapi juga menjadi produsen dan distributor narasi yang aktif. Setiap balasan, komentar, atau unggahan ulang membentuk jaringan diskursif yang kompleks dan memperluas jangkauan pesan solidaritas. Dari proses ini, tercipta dinamika digital yang memungkinkan partisipasi publik secara luas tanpa batas geografis, menjadikan ruang digital sebagai arena perjuangan sosial yang aktual dan berdampak.

Salah satu bentuk ekspresi paling khas dalam interaksi solidaritas digital adalah munculnya meme dan karya visual yang menyertai hashtag *#FreePalestine*. Meme-meme ini sering kali memuat sindiran politik, kritik terhadap bias media, atau penggambaran heroik perjuangan rakyat Palestina. Meskipun menggunakan format yang ringan dan menghibur, pesan yang disampaikan justru memiliki daya kritis yang tinggi dan mudah dipahami lintas latar belakang sosial dan pendidikan. Penggunaan humor sebagai senjata dalam komunikasi politik menunjukkan bagaimana kreativitas publik memainkan peran besar dalam membentuk opini. Kreativitas digital ini tidak hanya mengundang perhatian, tetapi juga menjadi alat edukasi yang efektif, terutama bagi generasi muda yang lebih akrab dengan budaya visual (Issanty and Assiddiqi, 2024). Dengan demikian, meme bukan hanya hiburan, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi yang memperluas cakupan dan dampak kampanye solidaritas digital.

Thread informatif dan naratif juga menjadi instrumen penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang konflik Israel-Palestina. Banyak pengguna yang menyusun utas panjang yang menguraikan sejarah konflik, pelanggaran HAM, kutipan resolusi PBB, hingga testimoni korban secara sistematis. Dengan menyertakan hashtag *#FreePalestine*, thread-thread ini menjadi mudah diakses dan dibagikan kembali, memungkinkan pembentukan

pemahaman yang lebih dalam terhadap isu yang kompleks (Anisa 2023). Narasi yang dibangun secara kronologis dan disertai data atau tautan sumber memperkuat kredibilitas pesan dan mendorong pengguna lain untuk menggali lebih jauh. Thread juga memungkinkan narasi yang lebih panjang dan bernuansa daripada sekadar satu unggahan singkat, sehingga menjadi jembatan antara keterlibatan emosional dan pemahaman rasional atas isu yang diangkat. Praktik ini menunjukkan bahwa solidaritas digital bukan hanya sekadar tanda kepedulian, tetapi juga wadah literasi sosial-politik yang masif.

Fitur *trending topic* memainkan peran penting dalam mengangkat tagar *#FreePalestine* ke panggung global. Ketika tagar ini masuk dalam daftar tren dunia, hal tersebut menjadi penanda bahwa solidaritas terhadap Palestina telah menjadi isu global yang tidak bisa diabaikan. *Trending topic* membantu meningkatkan visibilitas tagar dan membuat lebih banyak orang tertarik untuk mengetahui konteks dan latar belakang dari isu tersebut. Banyak media internasional mulai meliput tagar ini ketika melihatnya menduduki posisi teratas dalam tren global, menciptakan efek pantulan dari media sosial ke media konvensional. Proses ini mencerminkan bagaimana kekuatan kolektif digital mampu menciptakan tekanan sosial-politik terhadap institusi, pemerintah, dan organisasi internasional. Dengan masuknya tagar dalam daftar tren, solidaritas digital tidak lagi berada dalam ruang pinggiran, melainkan menjadi bagian dari perdebatan publik yang dominan di berbagai belahan dunia.

Transformasi opini publik yang dihasilkan dari masifnya penggunaan tagar *#FreePalestine* juga membawa implikasi sosial dan politik yang signifikan. Di berbagai negara, tekanan publik yang tercipta melalui kampanye digital telah memaksa pejabat pemerintah, partai politik, hingga lembaga internasional untuk mengeluarkan pernyataan sikap atau mengambil kebijakan tertentu. Gelombang solidaritas ini bahkan mempengaruhi perilaku konsumen, seperti munculnya seruan untuk memboikot produk tertentu yang terafiliasi dengan kepentingan pro-Israel (Issanty et al. 2024). Dampak nyata dari transformasi opini ini menunjukkan bahwa media sosial, dengan kekuatan hashtag seperti *#FreePalestine*, bukan hanya ruang ekspresi simbolik, tetapi

juga alat perubahan sosial yang konkret. Ketika solidaritas digital menyatu dengan tekanan politik dan ekonomi, ia membentuk kekuatan kolektif yang bisa menggeser dinamika kekuasaan dalam isu global.

Akhirnya, hashtag *#FreePalestine* sebagai praktik solidaritas digital merupakan bentuk komunikasi budaya yang sangat kompleks namun efektif dalam membangun opini publik, menciptakan jaringan solidaritas, dan menggerakkan perubahan. Ia mencerminkan bagaimana media sosial telah menjadi ruang publik baru yang mampu menyatukan suara dari berbagai latar belakang dalam satu perjuangan bersama. Hashtag ini bukan hanya menyuarakan dukungan terhadap Palestina, tetapi juga menjadi simbol resistensi terhadap ketidakadilan global, kolonialisme modern, dan sistem dominasi. Praktik solidaritas digital melalui tagar ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial di era digital dapat dimulai dari partisipasi sederhana sebuah unggahan, sebuah komentar, sebuah retweet yang kemudian berkembang menjadi gerakan sosial global dengan dampak nyata. Dalam konteks ini, *#FreePalestine* bukan sekadar tagar, melainkan gerakan kolektif yang mencerminkan kekuatan baru masyarakat sipil digital di abad ke-21.

BAB IV

WACANA TEKS DAN NARASI #FreePalestine

A. Struktur Narasi Dominan dalam Wacana Solidaritas

1. Narasi “Penjajahan” Dan “Perlawanan”

Narasi "penjajahan" dan "perlawanan" dalam wacana digital seputar konflik Palestina-Israel membentuk salah satu kerangka paling dominan yang merepresentasikan posisi ideologis masyarakat digital Indonesia, terutama di platform media sosial seperti X (dulu Twitter). Narasi ini tampak jelas dalam berbagai unggahan yang menggambarkan kondisi Palestina sebagai wilayah yang telah lama hidup dalam cengkeraman kekuasaan zionis yang dianggap tidak sah secara hukum internasional maupun moral kemanusiaan.

Dalam banyak unggahan, warganet secara eksplisit menggunakan istilah-istilah seperti "penjajahan", "agresi", "pendudukan ilegal", dan "kolonialisme modern" untuk menggambarkan tindakan Israel terhadap Palestina. Pilihan diksi ini menciptakan pemisahan tegas antara pelaku dan korban, antara penindas dan yang tertindas. Israel ditempatkan sebagai simbol imperialisme kontemporer, yang tidak hanya menindas secara fisik dan militer, tetapi juga secara ekonomi, budaya, dan eksistensial. Sementara itu, Palestina diposisikan sebagai simbol perlawanan global terhadap ketidakadilan, penindasan, dan hegemoni kekuasaan global yang disokong oleh negara-negara Barat.

Narasi perlawanan pun berkembang secara luas dan berlapis, tidak hanya dalam bentuk dukungan politis tetapi juga dalam dimensi spiritual, moral, dan kemanusiaan. Dukungan moral terhadap rakyat Palestina tidak jarang dilabeli dengan istilah seperti "perlawanan sah", "intifada", bahkan "jihad fi sabilillah", khususnya dalam komunitas warganet Muslim Indonesia yang memandang konflik ini bukan hanya sebagai masalah geopolitik, tetapi juga sebagai medan pembelaan terhadap umat Islam yang dizalimi. Framing ini memperkuat persepsi bahwa perjuangan rakyat

Palestina adalah bentuk sah dari resistensi terhadap kekuasaan kolonial. Dalam narasi ini, segala bentuk dukungan terhadap Palestina mulai dari doa, donasi, hingga boikot produk tertentu, dilihat sebagai bagian dari solidaritas aktif terhadap perjuangan pembebasan dari penjajahan.

Narasi penjajahan dan perlawanan ini juga diartikulasikan dalam simbol-simbol visual dan teks digital, seperti penggunaan bendera Palestina, kutipan tokoh revolusioner, puisi perjuangan, dan penggalan video kekejaman militer Israel, yang semua itu memperkuat imajinasi kolektif tentang Palestina sebagai tanah suci yang harus dibebaskan. Perlawanan tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik di medan tempur, melainkan juga menjadi perjuangan kultural dan informasi (informatifwarfare), di mana publik berlomba-lomba membingkai ulang Palestina sebagai simbol global bagi perjuangan antikolonial.



Gambar 4. 1 Sumber: Akun X @marjinkiri

Unggahan dari akun @marjinkiri yang menampilkan ajakan kepada para penerbit, editor, dan penulis dunia untuk menandatangani surat solidaritas dalam gerakan *Publishers for Palestine* merepresentasikan bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi dan ketidakadilan global yang dialami oleh rakyat Palestina. Dalam konteks media sosial dan diskursus digital yang berkembang luas, postingan ini bukan sekadar seruan moral, melainkan pernyataan politis yang menyematkan identitas perlawanan terhadap struktur dominasi global.

Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah “penjajahan”, pilihan diksi seperti “memperjuangkan keadilan”, “kebebasan berekspresi”, dan “kekuatan kata-kata tertulis” menunjukkan resistensi terhadap represi

yang lebih besar dan menempatkan Palestina dalam posisi sebagai korban penindasan struktural. Ajakan ini juga menyiratkan bahwa bentuk perlawanan tidak hanya dapat dilakukan melalui aksi fisik atau militer, melainkan juga melalui kata-kata, literasi, dan jaringan solidaritas global. Unggahan ini secara simbolik dan ideologis menyuarakan narasi “penjajahan” sebagai konteks konflik dan “perlawanan” sebagai posisi sikap.

Peneliti menganalisis dengan menggunakan pendekatan teori wacana kritis Norman Fairclough, unggahan ini bisa dibaca dalam tiga level analisis utama: tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial-budaya. Pada level tekstual, pilihan bahasa dalam postingan mencerminkan diksi yang sarat dengan nilai-nilai moral dan etika universal. Kalimat-kalimat seperti “memperjuangkan keadilan” dan “solidaritas global” digunakan untuk menciptakan legitimasi terhadap gerakan perlawanan yang diusung, serta menyusun narasi kolektif yang melintasi batas-batas kebangsaan. Secara praktik diskursif, unggahan ini merupakan bagian dari sirkulasi wacana tandingan (counter discourse) yang sengaja diproduksi oleh aktor-aktor alternatif seperti komunitas penerbit progresif untuk melawan narasi dominan yang cenderung bias terhadap Israel.

Marjin Kiri dalam hal ini berperan sebagai agen produksi wacana kritis yang secara sadar memosisikan dirinya dalam medan diskursif sebagai pihak yang menentang ketidakadilan global. Terakhir, dalam praktik sosial-budaya, ajakan ini mencerminkan transformasi politik solidaritas menjadi praktik nyata yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil melalui alat-alat budaya seperti tulisan dan publikasi. Artinya, gerakan ini tidak hanya terbatas pada ruang media sosial, tetapi terhubung langsung dengan kesadaran kolektif dan perjuangan transnasional atas hak-hak yang dirampas.

Dari perspektif teori politik solidaritas, unggahan ini mengartikulasikan bentuk solidaritas lintas batas yang tidak bersifat simbolik semata, melainkan sebagai ekspresi perlawanan aktif terhadap

penjajahan dalam bentuk kolonialisme kontemporer. Solidaritas dalam konteks ini bukan sekadar perasaan empati atau simpati, melainkan sebuah strategi politis yang mengandalkan jaringan global dan kesamaan nilai kemanusiaan. Dengan menjadikan para penulis dan penerbit sebagai bagian dari gerakan perlawanan, unggahan ini menunjukkan bahwa medan perjuangan tidak hanya terjadi di lapangan konflik fisik, tetapi juga dalam medan narasi dan produksi makna.



Gambar 4. 2 Sumber: Akun X @MariaAlKaff_

Unggahan dari akun X (Twitter) atas nama Maria A. Alkaff menampilkan narasi yang sangat kuat dalam mengkonstruksi posisi ideologis terkait konflik Palestina melalui bahasa yang sarat makna historis, nasionalistik, dan moral. Dengan jumlah likes ada 252, jumlah retweet ada 105, dan coment ada 8. Teks ini menegaskan bahwa perjuangan bangsa Palestina dalam mengupayakan kemerdekaan bukanlah tindakan terorisme, melainkan bentuk sah dari perlawanan terhadap penjajahan, sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai universal dan bahkan dalam konstitusi Indonesia sendiri. Kalimat pembuka “Bagi penjajah, seluruh upaya para pejuang yang mengadakan perlawanan, akan disebut teroris,” langsung membingkai

wacana bahwa definisi tentang terorisme bersifat politis dan sangat tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan diskursif.

Unggahan ini lalu mengutip Pembukaan UUD 1945 sebagai fondasi legal-moral bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karenanya, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Dengan demikian, unggahan ini tidak hanya berfungsi sebagai opini pribadi, tetapi juga sebagai artikulasi politis yang memposisikan Indonesia secara ideologis dalam barisan pendukung Palestina berdasarkan prinsip historis dan konstitusional.

Dari sisi teori wacana kritis Norman Fairclough, unggahan ini dianalisis dalam tiga level utama. Pertama, pada level tekstual, kita dapat melihat penggunaan diksi yang sangat kuat seperti “penjajahan,” “perlawanan,” “teroris,” “perikemanusiaan dan perikeadilan,” serta referensi langsung kepada teks konstitusi dan presiden pertama Indonesia, Sukarno. Bahasa dalam unggahan ini sangat normatif dan argumentatif, menunjukkan bahwa si penulis berusaha untuk mengonstruksi makna yang tidak ambigu: bahwa Palestina berhak merdeka dan tindakan mereka tidak bisa direduksi menjadi aksi teroris. Kedua, pada level praktik diskursif, unggahan ini merupakan bagian dari produksi ulang wacana solidaritas yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia pasca eskalasi konflik Hamas-Israel pada 2023–2024.

Penulis bukan sekadar mengemukakan opini, tetapi mereproduksi wacana nasionalisme Indonesia yang sejak lama bersolidaritas terhadap perjuangan bangsa lain melawan penjajahan, seperti Palestina. Ini juga merupakan reaksi terhadap wacana tandingan (counter-discourse) dari media atau elite global yang menstigma perjuangan Palestina sebagai bentuk terorisme. Ketiga, pada level praktik sosial-budaya, unggahan ini memperlihatkan bagaimana identitas kebangsaan Indonesia dikaitkan dengan perjuangan global melalui nilai-nilai universal kemanusiaan.

Temuan tersebut memiliki kaitan dengan konsep politik solidaritas, unggahan ini menunjukkan praktik konkret dari solidaritas digital. Politik

solidaritas di sini dipahami bukan sekadar sebagai bentuk empati, tetapi sebagai tindakan kolektif berbasis nilai-nilai bersama, seperti anti-penjajahan, hak menentukan nasib sendiri, dan kemerdekaan sebagai hak asasi. Dalam unggahan ini, politik solidaritas terwujud dalam tiga bentuk: pertama, artikulasi ideologis yang menempatkan Palestina sebagai subjek yang sah untuk memperjuangkan kemerdekaannya; kedua, delegitimasi terhadap narasi yang menyebut Palestina sebagai teroris; dan ketiga, ajakan implisit kepada masyarakat Indonesia untuk tetap konsisten dengan sejarah dan konstitusi dalam melihat konflik ini.

Unggahan ini merupakan representasi utuh dari narasi penjajahan dan perlawanan dalam konteks konflik Palestina. Dengan memadukan elemen ideologis, historis, moral, dan konstitusional, unggahan ini membentuk wacana tandingan yang kuat terhadap dominasi narasi global pro-Israel. Analisis wacana kritis dan konsep politik solidaritas membantu mengungkap bagaimana teks ini bekerja sebagai alat untuk membentuk opini publik, mempertahankan posisi politik Indonesia yang konsisten, serta memperluas jaringan solidaritas internasional melalui media sosial.

2. Narasi Keagamaan Vs Narasi Kemanusiaan

Narasi keagamaan versus narasi kemanusiaan dalam diskursus digital mengenai konflik Palestina-Israel menampilkan dua corak dominan yang sama-sama kuat dalam membentuk solidaritas publik, khususnya di kalangan netizen Indonesia. Unggahan-unggahan bernuansa religius secara konsisten memperlihatkan keterkaitan erat antara dukungan terhadap Palestina dan identitas keagamaan umat Islam. Dalam konteks ini, konflik tidak hanya dimaknai sebagai pertarungan geopolitik atau konflik wilayah, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan keimanan. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, kutipan doa, serta seruan dari para ulama dan tokoh agama bertebaran dalam bentuk teks, video, maupun gambar.

Narasi-narasi ini menempatkan Palestina, khususnya Masjid Al-Aqsa, sebagai situs suci yang terikat erat dengan sejarah spiritual umat

Islam, sehingga membela Palestina dianggap sebagai wujud nyata dari iman dan solidaritas ukhuwah Islamiyah. Frasa-frasa seperti "jihad fi sabilillah", "umat Islam satu tubuh", atau "membela Palestina adalah kewajiban agama", memperkuat identitas kolektif keagamaan dan membangkitkan emosi solidaritas berbasis iman.

Di sisi lain, wacana solidaritas digital juga ditopang oleh narasi kemanusiaan yang bersifat universal, melampaui batas-batas agama. Dalam narasi ini, penekanan utama diarahkan pada penderitaan rakyat sipil, terutama anak-anak, perempuan, dan lansia yang menjadi korban agresi militer. Visualisasi korban luka, puing-puing bangunan hancur, tangisan anak-anak yang kehilangan keluarga, serta antrean panjang untuk mendapatkan bantuan makanan dan medis menjadi konten yang dominan di media sosial. Narasi kemanusiaan ini menempatkan Palestina sebagai simbol penderitaan global akibat ketidakadilan struktural, di mana konflik bersenjata dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Seruan seperti "Save Gaza", "Stop Killing Children", "This is not war, this is genocide", dan "Human rights for all" memperluas cakupan solidaritas hingga menjangkau audiens lintas agama, etnis, dan negara.

Ketegangan antara narasi keagamaan dan kemanusiaan ini tidak serta-merta menunjukkan kontradiksi, melainkan memperlihatkan kompleksitas identitas digital netizen dalam membentuk solidaritas. Di satu sisi, narasi keagamaan memberikan justifikasi moral dan spiritual yang kuat bagi umat Islam untuk terlibat aktif dalam isu ini. Di sisi lain, narasi kemanusiaan membuka ruang partisipasi yang inklusif bagi publik lintas iman dan latar belakang ideologis untuk menyuarakan kepedulian terhadap tragedi di Palestina. Kedua narasi ini kerap kali saling berdampingan dan bahkan melebur dalam satu unggahan, misalnya adalah video yang menampilkan ayat Al-Qur'an bersamaan dengan visual anak-anak korban bom, atau seruan doa disertai statistik kematian sipil.

Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas digital tidak tunggal, tetapi merupakan arena artikulasi makna yang beragam, tempat nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan saling mengisi untuk menguatkan satu tujuan: membela Palestina dari ketidakadilan yang sistemik. Dalam kerangka ini, politik solidaritas digital tampil bukan sekadar sebagai bentuk empati pasif, tetapi sebagai ekspresi aktif dari resistensi moral dan spiritual terhadap penindasan global.



Gambar 4. 3 Sumber: Akun X @InsiderWorld

*“No more killing in Gaza, just peace.”
#FreePalestine*

Gambar 4.3 menampilkan cuplikan dari platform X yang merepresentasikan dua unggahan dari akun pro-Palestina, dengan fokus utama pada pernyataan singkat namun sarat makna dari akun @InsiderWorld4 yang berbunyi, “No more killing in Gaza, just peace.” Kalimat ini, walaupun ringkas, menjadi representasi kuat dari narasi kemanusiaan yang mendasari banyak unggahan serupa dalam wacana digital mengenai konflik Palestina-Israel. Narasi ini tidak didasarkan pada identitas agama, etnisitas, atau geopolitik, tetapi pada prinsip universal tentang kehidupan, perdamaian, dan hak asasi manusia.

Permintaan untuk mengakhiri pembunuhan di Gaza bukan hanya seruan politis, melainkan ungkapan kemanusiaan yang lahir dari rasa empati

dan keprihatinan terhadap penderitaan rakyat sipil yang menjadi korban konflik bersenjata. Narasi semacam ini dengan sengaja menghindari diksi keagamaan atau ideologis, dan justru menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat global lintas latar belakang. Kata-kata seperti “no more killing” dan “just peace” bersifat netral namun kuat dalam menyentuh nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar.

Kontras dengan itu, wacana digital yang berkembang di kalangan warganet Muslim Indonesia sering kali juga memperlihatkan narasi keagamaan yang kuat, yang memosisikan konflik di Palestina sebagai bagian dari perjuangan umat Islam global. Dalam narasi ini, pembelaan terhadap Palestina tidak hanya dilihat sebagai bentuk solidaritas sosial-politik, tetapi juga sebagai manifestasi dari keimanan dan tanggung jawab spiritual. Ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kutipan-kutipan dari tokoh agama digunakan untuk menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan kewajiban moral yang bersumber dari ajaran agama. Wacana keagamaan ini kerap kali hadir dalam bentuk seruan jihad, ajakan berdoa, hingga narasi tentang akhir zaman yang melibatkan simbolisme religius mengenai Al-Aqsa sebagai tempat suci umat Islam. Narasi ini menciptakan ikatan emosional yang kuat bagi umat Islam, karena penderitaan rakyat Palestina dipandang sebagai penderitaan kolektif umat.

Ketegangan antara narasi kemanusiaan dan narasi keagamaan ini justru memperlihatkan bagaimana solidaritas digital terhadap Palestina terbentuk melalui beragam dimensi wacana. Keduanya sama-sama bertujuan membangun empati dan mobilisasi, namun dengan pendekatan yang berbeda. Narasi kemanusiaan mengedepankan nilai-nilai universal seperti hak hidup, keadilan, dan perdamaian, sementara narasi keagamaan memperkuat identitas kolektif berbasis keimanan. Dalam praktiknya, kedua narasi ini sering kali tidak berjalan terpisah, tetapi saling bersinggungan dan bahkan saling menguatkan. Misalnya, sebuah unggahan bisa saja menyuarakan kepedulian terhadap anak-anak korban perang sambil mengutip doa dalam Islam sebagai bentuk simpati.

Dalam kerangka teori wacana kritis Norman Fairclough, pernyataan “No more killing in Gaza, just peace” bisa dianalisis sebagai bentuk *teks* yang mencerminkan *praktik diskursif* dari produksi narasi damai dan kemanusiaan oleh pengguna media sosial global. Praktik ini tidak terlepas dari *praktik sosial-budaya* yang lebih luas, yakni meningkatnya kesadaran dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Palestina. Sedangkan narasi keagamaan mencerminkan praktik diskursif dari komunitas Muslim yang menggunakan teks agama sebagai alat legitimasi moral dalam membentuk opini publik. Kedua narasi ini merepresentasikan dinamika politik solidaritas digital, yang memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi medan kontestasi makna antara universalitas kemanusiaan dan partikularitas identitas keagamaan dalam membela Palestina.



Gambar 4. 4 Sumber: Akun X @akuntwiter968

"MasyaAllah... Di tengah lukanya akibat agresi penjajah israHell, anak kecil Palestina ini lisannya tak putus melantunkan Asmaul Husna."
#FreePalestine

Gambar 4.4 bersumber dari akun X @akunstiter968 dengan tagar *#FreePalestine*, menampilkan sebuah narasi emosional yang sangat kuat bernuansa keagamaan. Unggahan ini memuat kalimat, “MasyaAllah... Di tengah lukanya akibat agresi penjajah israHell, anak kecil Palestina ini lisannya tak putus melantunkan Asmaul Husna,” yang secara eksplisit menggambarkan bahwa spiritualitas dan keimanan tetap teguh meskipun berada dalam kondisi penderitaan ekstrem. Penggunaan diksi religius seperti “MasyaAllah” dan “Asmaul Husna” membingkai peristiwa

kekerasan di Gaza dalam konteks keteguhan iman Islam. Penyebutan istilah peyoratif terhadap Israel juga menunjukkan adanya upaya untuk mengukuhkan batas simbolik antara "yang tertindas dan saleh" versus "yang menjajah dan kejam."

Unggahan ini sangat menggambarkan narasi keagamaan yang membingkai konflik Palestina-Israel sebagai bukan semata-mata persoalan politik atau kemanusiaan, melainkan sebagai ujian spiritual dan jihad iman. Dalam kerangka ini, solidaritas terhadap Palestina menjadi bagian dari identitas keagamaan umat Islam yang diwujudkan melalui ekspresi digital seperti doa, dzikir, dan pujian terhadap keteguhan umat seiman. Gambar anak yang berdzikir menjadi lambang perjuangan rohani, di mana perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya terjadi melalui senjata atau diplomasi, tetapi juga melalui kesabaran dan keteguhan beribadah. Narasi ini memobilisasi simpati publik melalui bahasa iman yang membangkitkan rasa keterikatan emosional berbasis keagamaan, sehingga menempatkan Palestina bukan hanya sebagai bangsa yang tertindas, tetapi juga sebagai simbol kesucian dan keteladanan dalam menghadapi kezaliman.

Namun, narasi ini juga menimbulkan ketegangan atau bahkan perbedaan fokus dengan narasi kemanusiaan yang lebih universal. Dalam narasi kemanusiaan, penderitaan anak-anak Palestina digambarkan dengan menitikberatkan pada hak asasi manusia, trauma psikologis, dan kebutuhan akan perlindungan sipil, tanpa memandang latar belakang agama. Sebuah anak yang terluka tidak hanya dilihat sebagai "muslim yang sabar," tetapi sebagai manusia yang mengalami ketidakadilan. Dengan demikian, narasi kemanusiaan mengajak masyarakat global untuk melihat isu ini dalam kacamata keadilan dan etika universal, bukan hanya dalam kerangka umat tertentu.

Dalam konteks ini, dualitas antara narasi keagamaan dan narasi kemanusiaan menjadi penting untuk dianalisis sebagai dua strategi artikulasi dalam wacana solidaritas digital. Melalui pendekatan Teori Wacana Norman Fairclough, kita dapat memahami bahwa teks unggahan

tersebut adalah bentuk *teks* (textual) yang mencerminkan *praktik diskursif* dari kelompok keagamaan yang menggunakan media sosial untuk menegaskan nilai-nilai spiritual mereka dalam konteks konflik. Sementara *praktik sosial-budaya* yang mendasarinya adalah realitas bahwa masyarakat Muslim Indonesia sangat responsif terhadap isu Palestina, karena merasa memiliki keterikatan ideologis dan spiritual. Ketegangan ini bukan berarti keduanya saling menegasikan, tetapi justru memperlihatkan bagaimana solidaritas digital terhadap Palestina adalah arena diskursif di mana berbagai nilai dan kepentingan saling berinteraksi. Baik narasi keagamaan maupun kemanusiaan sama-sama membentuk persepsi publik, membingkai siapa yang layak dibela, dan bagaimana dukungan harus diekspresikan entah itu dalam bentuk doa atau seruan universal: hentikan kekerasan.

3. Narasi “Double Standard” Terhadap Dunia Internasional

Narasi "double standard" atau standar ganda dalam respons dunia internasional terhadap konflik Palestina-Israel menjadi salah satu tema dominan dalam diskursus digital yang berkembang di media sosial, khususnya di kalangan warganet Indonesia. Unggahan-unggahan dengan nada kritis banyak menyasar negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan sejumlah negara Uni Eropa yang dianggap menerapkan kebijakan luar negeri yang tidak konsisten. Para netizen menyoroti bagaimana negara-negara tersebut dengan cepat dan vokal memberikan dukungan serta empati saat Ukraina diserang Rusia, namun tampak diam, ambigu, atau bahkan mendukung Israel ketika warga sipil Palestina menjadi korban kekerasan militer.

Dalam unggahan-unggahan tersebut, narasi seperti “kemunafikan Barat”, “kepentingan geopolitik atas nilai kemanusiaan”, dan “hak asasi manusia yang selektif” menjadi retorika yang berulang. Istilah seperti "hypocrisy", "selective outrage", dan "Western bias" banyak digunakan untuk menunjukkan bahwa solidaritas internasional ternyata bersyarat terutama ketika yang menjadi korban adalah komunitas Muslim di negara dunia ketiga seperti Palestina.

Narasi ini membentuk kesadaran kolektif bahwa dunia internasional tidak berdiri di atas prinsip keadilan universal, tetapi lebih pada relasi kuasa dan kepentingan politik-ekonomi global. Warganet kemudian membangun oposisi simbolik yang kuat antara "yang tertindas tapi diabaikan" (Palestina) dan "yang kuat tapi dibela" (Israel), dan menjadikan ketimpangan ini sebagai argumen moral untuk melegitimasi perlawanan Palestina. Narasi semacam ini memperkuat posisi pro-Palestina sebagai gerakan perlawanan terhadap sistem global yang timpang, bukan hanya terhadap pendudukan teritorial semata.

Dalam perspektif *Analisis Wacana Kritis* Norman Fairclough, narasi double standard ini dapat dianalisis melalui tiga dimensi: (1) *teks*, yakni penggunaan diksi emosional seperti “hipokrit”, “diam saat Palestina diserang”, atau “membela penjajah” yang memperlihatkan ketegangan ideologis antara nilai-nilai kemanusiaan dan realitas politik global; (2) *praktik diskursif*, di mana warganet memproduksi ulang wacana ketidakadilan melalui postingan, meme, dan thread yang menyindir atau menyalahkan aktor-aktor global; serta (3) *praktik sosial-budaya*, yaitu adanya kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem internasional yang dianggap bias, kapitalistik, dan tidak berpihak kepada nilai-nilai universal kecuali jika menguntungkan pihak tertentu. Narasi ini pada akhirnya bukan sekadar keluhan moral, tetapi juga bentuk artikulasi *politik solidaritas digital* yang menolak dominasi wacana Barat dalam menentukan siapa korban dan siapa yang berhak mendapatkan simpati global.



Gambar 4. 5 Sumber: Akun X @FreePalestine

“A great wrong has been done to the Red Indians of America, Arabs of Palestine, or the Black people of Australia, by their replacement with a higher grade race.”
– Winston Churchill #FreePalestine

Gambar 4.5 yang menampilkan kutipan dari Winston Churchill menjadi salah satu representasi kuat dari narasi “double standard” atau standar ganda yang banyak digaungkan oleh warganet dalam diskursus digital terkait konflik Palestina-Israel dengan adanya respon retweet warganet sebanyak 22 kali, 24 coment, dan 71 likes. Unggahan dari akun @FreePalestine tersebut menampilkan kutipan yang berbunyi, “A great wrong has been done to the Red Indians of America, Arabs of Palestine, or the Black people of Australia, by their replacement with a higher grade race.” Pernyataan ini bukan hanya memuat muatan sejarah kolonialisme dan penindasan rasial, tetapi juga dijadikan amunisi oleh netizen untuk menunjukkan bahwa praktik penjajahan dan penghapusan identitas suatu bangsa telah lama dilegalkan dan dinormalisasi oleh kekuatan-kekuatan imperialisme Barat.

Dengan menempatkan Palestina sejajar dengan penduduk asli Amerika dan masyarakat kulit hitam Australia, unggahan ini mengkonstruksi narasi historis bahwa apa yang terjadi di Palestina hari ini adalah kelanjutan dari proyek kolonial global yang telah berlangsung selama berabad-abad, dan ironisnya, masih dilanggengkan oleh narasi-narasi modern yang berkedok demokrasi, HAM, dan perdamaian.

Dalam konteks narasi “double standard”, kutipan Churchill ini dipahami bukan sekadar sebagai cerminan masa lalu, melainkan sebagai kritik terhadap hipokrisi dunia internasional, terutama negara-negara Barat, yang kerap membela nilai-nilai universal namun secara diam-diam atau terang-terangan membiarkan, bahkan mendukung tindakan represif dan dehumanisasi terhadap bangsa Palestina. Warganet menggunakan kutipan historis ini untuk membongkar ketidakkonsistenan Barat yang terus memposisikan dirinya sebagai pembela moral dunia, padahal dalam praktiknya sering kali menjadi aktor atau pendukung utama dalam proyek kolonial dan dominasi kekuasaan global.

Secara tekstual, analisis ini sesuai dengan *pendekatan* teori wacana Norman Fairclough, di mana dimensi teks menunjukkan pemilihan diksi

seperti “replacement with a higher grade race” yang sarat muatan rasial dan eugenik. Ini menunjukkan adanya normalisasi ide superioritas ras tertentu atas kelompok-kelompok yang dijajah, termasuk Palestina. Dalam dimensi *praktik diskursif*, unggahan ini menunjukkan bahwa kutipan Churchill tidak hanya diposting ulang sebagai catatan sejarah, melainkan diaktualisasikan ulang sebagai alat perlawanan simbolik dalam konteks konflik kontemporer, memperlihatkan bagaimana warganet membingkai ulang narasi sejarah kolonial untuk memperkuat legitimasi solidaritas terhadap Palestina.

Sementara itu, dalam dimensi *praktik sosial-budaya*, kutipan ini merepresentasikan kritik tajam terhadap hegemoni wacana Barat yang selama ini memonopoli narasi keadilan global, sekaligus memperlihatkan keresahan masyarakat global terhadap sistem internasional yang cenderung membela negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan militer besar, sembari membungkam suara-suara dari bangsa yang terjajah.

Narasi “double standard” dalam unggahan ini juga sangat erat kaitannya dengan konsep *politik solidaritas*, karena menunjukkan bagaimana publik global, termasuk netizen Indonesia, berusaha membangun aliansi simbolik dengan Palestina melalui penyadaran kolektif atas praktik ketidakadilan historis dan kontemporer. Solidaritas digital ini tidak lagi semata-mata berbasis agama atau etnis, tetapi dibangun atas kesadaran bersama bahwa ketidakadilan sistemik harus dilawan secara terbuka.

Dengan mengangkat kutipan seperti ini, warganet tidak hanya sedang membela Palestina, tetapi juga sedang menantang struktur kekuasaan global yang bias, selektif, dan berpihak hanya pada kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dalam kerangka *analisis wacana kritis*, narasi ini menjadi bentuk resistensi terhadap hegemoni ideologis yang selama ini menyamakan penjajahan sebagai proyek kemajuan atau modernitas, dan sekaligus menjadi bentuk artikulasi ulang dari perjuangan keadilan yang melampaui batas-batas nasional, rasial, dan keagamaan.



Gambar 4. 6 Sumber: Akun X @Paihaly_5

Unggahan dari akun Kopi Handale (@Paihaly_5) menampilkan kombinasi antara teks emosional dan gambar visual yang memilukan, memperkuat kritik terhadap apa yang disebut sebagai “standar ganda” dari komunitas internasional dalam merespons penderitaan rakyat Palestina. Secara visual, gambar yang ditampilkan adalah potret penderitaan warga sipil Palestina, termasuk seorang pria dewasa yang menangis memeluk seorang anak, serta gambar anak kecil yang tampak menjadi korban kekerasan atau serangan. Visual ini sengaja dipilih untuk membangkitkan simpati dan emosi pengguna media sosial, serta menunjukkan realitas kemanusiaan yang tidak bisa disangkal.

Narasi dalam teks menyuarakan kemarahan dan keputusan: “🙏🔥 SAMPAI KAPAN DUNIA TUTUP MATA?” menjadi seruan yang menembus batas netralitas politik. Kalimat “Jangan biarkan standar ganda terus terjadi! Palestina butuh keadilan, bukan sekadar kecaman tanpa tindakan!” secara eksplisit menunjukkan tuduhan bahwa dunia internasional terutama negara-negara Barat dan lembaga-lembaga global bersikap tidak adil dan berat sebelah terhadap konflik Palestina-Israel. Dengan tambahan tagar seperti *#FreePalestine*, *#StopGenocide*, dan *#CatchNetanyahu*, unggahan ini semakin menegaskan posisi ideologis dan politis penggunanya, serta mempersonalisasi aktor yang dianggap bertanggung jawab.

Teori wacana kritis Norman Fairclough menganalisis temuan ini menggunakan tiga level utama. Pertama, pada level tekstual, terdapat penggunaan diksi emosional dan imperatif seperti “TUTUP MATA,”

“standar ganda,” “keadilan,” dan “kecaman tanpa tindakan.” Kata-kata ini berfungsi sebagai alat retorik untuk mengekspos kontradiksi antara prinsip universal yang dijunjung dunia (HAM, keadilan global, perlindungan anak) dan kenyataan empiris di Palestina yang justru bertentangan dengannya. Teks ini mengandung muatan protes dan ajakan yang kuat terhadap komunitas internasional.

Kedua, pada level praktik diskursif, unggahan ini merupakan bagian dari produksi dan reproduksi wacana tandingan terhadap dominasi narasi global yang sering kali bersikap netral atau pro-Israel. Dalam konteks ini, media sosial menjadi arena diskursif di mana masyarakat sipil berusaha mengintervensi ruang opini publik global dengan menampilkan bukti visual dan narasi moral, yang selama ini dianggap diabaikan oleh media arus utama dan organisasi internasional.

Ketiga, pada level praktik sosial-budaya, unggahan ini merefleksikan realitas bahwa masyarakat global khususnya dari negara-negara Global South seperti Indonesia mengalami frustrasi terhadap sistem internasional yang dianggap hanya responsif ketika korban adalah bagian dari dunia Barat, tetapi cenderung diam saat penderitaan menimpa komunitas Muslim atau dunia ketiga. Dengan demikian, unggahan ini juga merepresentasikan bentuk resistensi dari masyarakat sipil terhadap hegemoni wacana Barat dalam menentukan siapa korban yang “layak ditolong” dan siapa yang tidak.

Unggahan ini merupakan bentuk konkret dari solidaritas digital yang menolak diam dalam menghadapi ketidakadilan global. Unggahan ini memperlihatkan bagaimana individu atau kelompok non-negara menggunakan platform media sosial sebagai sarana membangun jaringan empati global dan memperkuat posisi perjuangan Palestina di panggung internasional. Politik solidaritas di sini tidak hanya dimaknai sebagai dukungan moral, tetapi juga sebagai strategi komunikasi untuk memobilisasi opini publik, menggerakkan aktor yang dianggap bertanggung

jawab (seperti Netanyahu), serta menuntut tindakan nyata dari komunitas internasional.

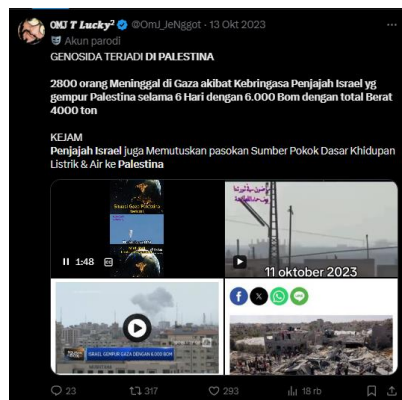
B. Pilihan Bahasa, Simbol, dan Framing

1. Penggunaan Metafora, Diksi Emosional, Dan Bahasa Moral

Dalam dinamika wacana solidaritas digital terkait konflik Palestina-Israel, penggunaan metafora, diksi emosional, dan bahasa moral menjadi perangkat retorik yang sangat dominan dan strategis. Warganet tidak hanya menyampaikan informasi atau pendapat secara rasional, tetapi juga membingkai narasi dengan kosakata yang menggugah rasa, menyalakan empati, dan mempertegas posisi moral kolektif. Metafora seperti "genosida", "apartheid modern", "penjajahan berkepanjangan", dan "penghapusan etnis" menjadi kata-kata kunci yang secara eksplisit merepresentasikan Palestina sebagai korban dari kekerasan sistemik dan terstruktur. Penggunaan istilah ini bukan sekadar deskriptif, tetapi memiliki kekuatan politis karena menyiratkan bahwa apa yang terjadi bukanlah konflik biasa, melainkan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dikecam secara global.

Diksi-diksi emosional seperti “kezaliman”, “penjagal anak-anak”, “serangan brutal”, dan “jeritan rakyat Gaza” disebarluaskan secara masif untuk membangun hubungan batin antara pengguna media sosial dengan penderitaan rakyat Palestina. Bahasa ini mengandung muatan afektif yang kuat, berfungsi membangkitkan simpati sekaligus kemarahan publik terhadap pihak yang dianggap sebagai penindas, dalam hal ini Israel dan sekutunya. Ungkapan seperti “Gaza berdarah”, atau “anak-anak syahid” menjadi semacam simbol retorik yang mengundang keterlibatan emosional, baik dalam bentuk keprihatinan, doa, maupun aksi digital seperti menyebarkan tagar solidaritas. Narasi-narasi ini memperkuat penyatuan identitas kolektif di antara warganet, terutama umat Muslim Indonesia yang merasa memiliki keterkaitan historis, keagamaan, dan moral terhadap isu Palestina.

Bahasa yang digunakan dalam wacana ini pun sering kali memiliki dimensi moral yang tegas, memisahkan dengan jelas siapa yang berada di pihak “kebenaran” dan siapa yang di sisi “kezaliman”. Israel ditampilkan sebagai aktor kejam yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan agama, sedangkan Palestina diposisikan sebagai bangsa tertindas yang mempertahankan harga diri, iman, dan tanah airnya. Dalam konteks ini, bahasa moral seperti “haram membiarkan ketidakadilan”, “perlawanan adalah hak”, atau “membela Palestina adalah kewajiban nurani” muncul sebagai legitimasi kolektif bahwa solidaritas bukanlah pilihan emosional semata, melainkan bentuk tanggung jawab etis dan spiritual. Dengan demikian, penggunaan metafora, diksi emosional, dan bahasa moral dalam wacana solidaritas digital bukan hanya strategi komunikasi, tetapi juga instrumen perjuangan yang memperkuat narasi, membentuk opini publik, dan meneguhkan identitas kolektif yang berpihak kepada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan pembebasan.



Gambar 4. 7 Sumber: Akun X @OmJ_JeNggot

Unggahan dari akun @OmJ_JeNggot, meskipun merupakan akun parodi, memperlihatkan wacana yang sangat serius dan bernuansa emosional dalam menyuarakan penderitaan rakyat Palestina dengan adanya respons warganet sebanyak 23 dalam kolom komentar, 317 retweet, dan 293 likes. Konten teks yang ditampilkan secara eksplisit menyebutkan bahwa “GENOSIDA TERJADI DI PALESTINA,” dan melanjutkan dengan uraian statistik tragis: “2800 orang meninggal... 6000 bom... total berat 4000 ton,” yang seluruhnya membentuk konstruksi naratif tentang brutalitas dan

kehancuran masif. Gaya penyajian data ini bukan hanya berfungsi sebagai informasi faktual, tetapi juga digunakan sebagai alat retorik untuk membangkitkan emosi kolektif dan membangun kredibilitas narasi melalui penggambaran penderitaan yang ekstrem. Narasi ditutup dengan pernyataan bahwa Israel “memutuskan pasokan Sumber Pokok Dasar Kehidupan Listrik & Air,” serta kata “KEJAM” yang ditulis dengan huruf kapital, berfungsi sebagai penegasan moral untuk memperkuat posisi pelaku sebagai entitas yang tidak manusiawi.

Dari aspek penggunaan metafora, diksi emosional, dan bahasa moral, unggahan ini sarat dengan strategi linguistik yang membentuk posisi ideologis pengguna terhadap konflik. Kata “genosida” merupakan metafora politik dan historis yang berat, karena mengandung makna pemusnahan sistematis terhadap kelompok tertentu dalam hal ini, rakyat Palestina. Pilihan diksi seperti “keberingasan,” “penjajah,” dan “kejam” membentuk struktur wacana yang sangat polarisatif, memisahkan pelaku dan korban dengan sangat jelas dan mutlak. Kata-kata tersebut tidak netral, melainkan sarat makna nilai yang digunakan untuk membangun narasi moral bahwa kekejaman Israel tidak hanya salah dalam konteks hukum internasional, tetapi juga salah secara etika kemanusiaan. Lebih dari sekadar menjelaskan peristiwa, unggahan ini membangun konstruksi kebenaran yang tidak memberi ruang ambiguitas: Israel adalah agresor tidak bermoral; Palestina adalah korban tak berdaya. Di sinilah bahasa menjadi alat politis, bukan sekadar sarana komunikasi.

Dalam kerangka teori wacana kritis Norman Fairclough, analisis dapat dimulai dari level teks (tekstual). Di sini, kita melihat penggunaan struktur kalimat pendek, langsung, dan repetitif yang dirancang untuk memperkuat urgensi dan kekejaman situasi. Kalimat seperti “GENOSIDA TERJADI DI PALESTINA” berdiri sendiri sebagai deklarasi, menegaskan posisi politik penulis dan menuntut pembaca untuk mengafirmasi. Dalam praktik diskursif, unggahan ini adalah bagian dari produksi ulang narasi perlawanan di ruang digital, di mana pengguna media sosial memproduksi ulang informasi secara kolektif untuk membentuk opini publik dan

menantang narasi arus utama yang lebih moderat atau pro-Israel. Ini juga menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi medan produksi makna dan perebutan legitimasi informasi.

Sementara pada tingkat praktik sosial-budaya, unggahan ini mencerminkan keresahan sosial yang lebih luas di kalangan masyarakat Indonesia (dan Global South pada umumnya) terhadap ketimpangan global, serta solidaritas terhadap rakyat Palestina sebagai representasi perlawanan terhadap kekuasaan imperial dan kolonial. Melalui wacana ini, masyarakat sipil menyuarakan protes dan membangun narasi tandingan sebagai bentuk resistensi budaya dan moral terhadap kekuatan global yang dianggap diam atau berpihak.

Dari perspektif politik solidaritas, unggahan ini merupakan cermin dari keterlibatan emosional dan politik warga biasa dalam isu-isu global. Meskipun berasal dari akun parodi, isi pesannya sangat serius dan menunjukkan bahwa solidaritas terhadap Palestina tidak lagi terbatas pada aktor negara atau institusi resmi, melainkan meluas hingga individu yang secara spontan mengekspresikan keterlibatan moral melalui platform media sosial. Solidaritas ini terbentuk dari kesamaan nilai, yaitu penolakan terhadap ketidakadilan, penindasan, dan pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, bahasa menjadi alat mobilisasi solidaritas, dan unggahan seperti ini dapat memicu partisipasi emosional dan tindakan politik dari audiens yang lebih luas.

2. Visualisasi Simbol

Dalam lanskap digital solidaritas pro-Palestina, visualisasi simbol memiliki peran sebagai medium komunikasi non-verbal yang sangat kuat dan penuh makna. Simbol-simbol seperti bendera Palestina yang berkibar, anak-anak yang terluka atau menangis, jenazah yang dibungkus kain kafan, reruntuhan bangunan akibat serangan udara, hingga emoji semangka yang menjadi ikon digital perlawanan, bukan sekadar gambar tanpa makna. Setiap elemen visual tersebut membawa muatan pesan yang sangat emosional, politis, dan ideologis. Misalnya, bendera Palestina yang sering

ditampilkan dalam latar hitam-putih atau berdarah menyimbolkan semangat perjuangan yang tidak pernah padam meski berada dalam kondisi tertindas. Begitu pula gambar anak-anak yang menjadi korban kekerasan militer Israel, bukan hanya menggambarkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga menciptakan resonansi moral yang mendalam di benak audiens global, khususnya warganet Indonesia yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu anak dan keluarga.

Visualisasi kehancuran seperti puing-puing rumah sakit, masjid, atau sekolah yang hancur lebur akibat bombardier menjadi representasi konkret dari penderitaan kolektif bangsa Palestina, sekaligus menjadi kritik diam namun tajam terhadap rezim kekuasaan yang melakukan agresi. Gambar-gambar ini tidak membutuhkan penjelasan panjang; daya komunikasinya bersandar pada kekuatan simbolik dan emosional yang langsung menembus batas-batas bahasa dan budaya.

Bahkan, penggunaan emoji semangka yang kini secara luas diasosiasikan dengan Palestina menggambarkan bagaimana simbol sederhana dapat bermetamorfosis menjadi ikon digital perlawanan yang tersebar luas tanpa memerlukan narasi tekstual. Dalam konteks ini, simbol-simbol visual bukan hanya penanda identitas atau solidaritas, tetapi juga menjadi alat artikulasi politis yang efektif dalam menyampaikan resistensi dan penderitaan, sekaligus membangun opini publik yang berpihak pada keadilan.

Melalui visualisasi semacam ini, media sosial menjadi ruang produksi makna baru yang melampaui teks, di mana gambar bukan hanya ilustrasi, melainkan bagian integral dari wacana digital yang membentuk kesadaran kolektif dan memperkuat ikatan emosional lintas negara dan identitas. Ini menunjukkan bahwa dalam era digital, bahasa gambar tidak kalah kuat dari bahasa kata. Bahkan, dalam banyak kasus, gambar lebih ampuh dalam menciptakan guncangan emosional dan mobilisasi solidaritas. Oleh karena itu, visualisasi simbol terutama yang berkaitan dengan anak-anak, kehancuran, dan bendera Palestina berfungsi sebagai bahasa universal

yang mempertegas posisi moral komunitas daring dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengecam segala bentuk kekerasan struktural yang mereka alami.



Gambar 4. 8 Sumber: Akun X @anfarizzat

Unggahan dari akun @anfarizzat dengan 5000 likes, 2000 retweet, dan 44 komentar, memperlihatkan sebuah video TikTok yang memvisualisasikan bendera Palestina berkibar dengan latar belakang kota. Dalam keterangan videonya tertulis kutipan yang kuat secara simbolik dan emosional: *"Dia tidak bisa berkibar di negaranya, tapi dia berkibar di seluruh dunia."* Ungkapan tersebut sarat akan makna simbolik dan politis, memperlihatkan kontras yang menyakitkan antara keterjajahan secara fisik dengan kemerdekaan secara simbolik.

Bendera sebagai objek visual utama dalam unggahan ini bukan hanya selembar kain berwarna, tetapi menjadi simbol identitas kolektif, perlawanan, dan eksistensi Palestina di tengah upaya sistematis untuk menghapus keberadaan mereka dari peta geopolitik. Bendera yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan di tanahnya sendiri justru menjadi simbol perjuangan yang berkibar di luar wilayahnya, dalam hati masyarakat dunia dan ruang-ruang publik internasional.

Dari perspektif visualisasi simbol, bendera di sini mengambil posisi sentral dalam konstruksi naratif digital. Dalam wacana perlawanan dan nasionalisme, bendera memiliki daya magis sebagai perwujudan semangat

kolektif. Ketika bendera Palestina dikatakan "tidak bisa berkibar di negaranya", itu menunjukkan bentuk keterjajahan, represi, dan penindasan struktural terhadap kemerdekaan rakyat Palestina oleh kekuasaan kolonial Israel. Namun, ketika dikatakan bahwa "ia berkibar di seluruh dunia", maka bendera tersebut menjelma menjadi alat simbolik resistensi global.

Ia tidak hanya menjadi simbol geografis atau nasional, tetapi juga ikon solidaritas lintas batas, diterima oleh jutaan orang yang menyuarakan dukungan melalui media sosial, demonstrasi, mural, dan kampanye digital. Hal ini memperlihatkan transformasi simbol: dari sekadar lambang teritorial menjadi bendera ideologis dan moral yang menyatukan komunitas internasional.

Teori wacana kritis Norman Fairclough, maka pada level teks (tekstual), unggahan ini menampilkan struktur kalimat pendek dan ekspresif: "Masya Allah... ternyata Palestina sudah merdeka di seluruh dunia." Ungkapan tersebut menunjukkan perpaduan antara emosi religius dan pernyataan politis. Kalimat ini adalah pernyataan bernuansa spiritual yang memperlihatkan kebanggaan dan haru terhadap solidaritas global yang melampaui batas fisik wilayah. Sementara kutipan dalam video memperkuat pernyataan tersebut dengan gaya metaforis yang dalam, mempersonifikasikan bendera sebagai makhluk hidup yang "tidak bisa berkibar" di tanahnya sendiri.

Pada level praktik diskursif, unggahan ini menunjukkan bagaimana media sosial menjadi saluran produksi ulang simbol perlawanan dan pemaknaan baru terhadap identitas nasional. Pengguna media sosial secara aktif menjadi agen wacana, bukan sekadar konsumen informasi, melainkan produsen solidaritas digital. Video, caption, dan simbol visual digabung untuk memperkuat posisi ideologis dan menentang kekuasaan naratif dominan.

Dalam praktik sosial-budaya, konten ini mewakili kondisi sosial masyarakat global yang terhubung secara emosional dan politik terhadap tragedi Palestina. Keberadaan simbol ini mencerminkan bentuk perlawanan

simbolik terhadap represi kolonial, serta pergeseran identitas bendera Palestina sebagai alat representasi konflik menjadi simbol global perjuangan kemanusiaan.

Unggahan ini memperlihatkan bagaimana simbol menjadi medium utama dalam memperkuat kohesi moral lintas negara. Solidaritas terhadap Palestina bukan hanya dilakukan melalui argumen rasional atau dokumentasi tragedi, tetapi juga melalui penggunaan simbol emosional seperti bendera yang menjadi pemicu keterlibatan politik warga dunia. Ketika masyarakat dari berbagai negara mengibarkan bendera Palestina dalam bentuk fisik maupun digital, mereka sedang menegaskan posisi politik dan etik mereka, yaitu bahwa perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan global.

Simbol ini mengkonsolidasikan simpati, empati, dan aksi kolektif, menjadi ruang baru bagi ekspresi perlawanan tanpa kekerasan. Unggahan ini memperlihatkan bahwa politik solidaritas kini tidak hanya berjalan melalui jalur diplomasi atau NGO, tetapi hadir secara kasatmata di ruang media sosial, digerakkan oleh individu biasa dengan narasi yang sederhana namun kuat.



Gambar 4. 9 Sumber: Akun X @kleponklepon

"Innalilahi wa innalilahi rojiun. 11-month-old Odeh Ahmed from Al-Nuseirat refugee camp, in central Gaza, dies of Israeli-enforced malnutrition, and a lack of medicines."
#FreePalestine #GazaGenocide #IsraelTerroristState #IsraelCrimes

Unggahan dari akun X @kleponklepon sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 4.4 menghadirkan visualisasi simbol yang sarat makna emosional dan politis, dengan narasi yang menggugah simpati serta memperkuat solidaritas digital terhadap Palestina. Fokus utama unggahan ini adalah sosok bayi berusia 11 bulan, Odeh Ahmed, yang meninggal dunia akibat kelaparan dan kekurangan obat-obatan di kamp pengungsian Al-Nuseirat, Gaza Tengah. Dengan menyertakan kalimat "Innalilahi wa innalilahi rojiun," pengguna media sosial tidak hanya menunjukkan ekspresi duka secara religius, tetapi juga mempertegas identitas kolektif sebagai umat Islam yang merasa berkewajiban secara moral dan spiritual untuk berempati terhadap penderitaan sesama Muslim. Visualisasi bayi yang tak berdosa menjadi simbol paling menyayat dari kehancuran dan ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina. Ia bukan sekadar angka statistik korban, melainkan representasi konkret dari krisis kemanusiaan akibat kebijakan blokade dan agresi militer Israel yang sistemik dan berkepanjangan.

Simbolisasi ini semakin diperkuat dengan penggunaan tagar seperti *#FreePalestine*, *#GazaGenocide*, *#IsraelTerroristState*, dan *#IsraelCrimes* yang menunjukkan posisi moral dan politis dari unggahan tersebut. Tagar ini bukan sekadar pengelompokan konten, melainkan alat untuk membangun wacana global yang menempatkan Israel sebagai aktor kejam dan tidak manusiawi, serta menempatkan rakyat Palestina sebagai korban dari penjajahan dan sistem apartheid modern. Visualisasi bayi yang tewas karena malnutrisi bukan hanya menyentuh sisi emosional audiens, tetapi secara implisit menuduh dunia internasional atas ketidakmampuannya dalam menghentikan kekejaman yang terjadi.

Visualisasi simbol dalam unggahan ini dianalisis menggunakan kerangka Norman Fairclough tentang analisis wacana kritis. Pada tingkat tekstual, kita melihat penggunaan diksi yang emosional dan moralistik seperti "malnutrition," "lack of medicines," dan "dies" yang membangkitkan rasa keprihatinan mendalam. Pada tingkat praktik diskursif, unggahan ini berfungsi sebagai bagian dari arus informasi alternatif yang menentang narasi dominan media arus utama Barat yang cenderung bias terhadap

Israel. Sedangkan pada praktik sosial-budaya, unggahan ini mencerminkan solidaritas lintas negara dan agama yang muncul sebagai bentuk respons terhadap ketimpangan kekuasaan global dan kegagalan institusi internasional dalam menjamin keadilan bagi rakyat Palestina.

Dilihat dari perspektif politik solidaritas, unggahan ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa tragedi yang menimpa rakyat Palestina bukan hanya masalah lokal atau regional, tetapi krisis moral global yang menuntut solidaritas aktif dari masyarakat sipil dunia. Simbol bayi yang wafat karena blokade menjadi pemicu mobilisasi emosi dan aksi digital, termasuk donasi, kampanye informasi, hingga tekanan politik.



Gambar 4. 10 Sumber: Akun X @InsiderWorld_1

Gambar 4.10 yang berasal dari akun X @InsiderWorld memperlihatkan potret digital yang sangat kuat secara simbolik, menampilkan sebuah papan protes bertuliskan “Let GAZA Live” yang dipadukan dengan lambang hati berwarna merah, hijau, putih, dan hitam, warna yang merepresentasikan bendera Palestina. Unggahan ini merupakan bentuk visualisasi solidaritas yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan politik dan moral melalui simbol yang sederhana namun sarat makna. Kalimat “Let GAZA Live” merupakan seruan pendek yang mengandung intensitas emosional tinggi. Ia bukan hanya permohonan untuk menghentikan kekerasan, melainkan seruan yang mewakili aspirasi hidup, hak asasi, dan eksistensi rakyat Gaza yang terancam oleh blokade dan agresi

militer Israel. Visual papan protes ini mewakili bentuk perlawanan simbolik dalam ruang digital yang menolak kekerasan struktural terhadap warga Palestina, sekaligus menuntut pengakuan internasional terhadap hak hidup mereka.

Simbol hati yang berwarna bendera Palestina juga memiliki makna mendalam: ia merepresentasikan cinta, empati, dan solidaritas global terhadap perjuangan bangsa yang terus mengalami penindasan. Dalam ranah komunikasi visual, penggunaan simbol seperti hati dan warna-warna nasional adalah strategi retorik yang kuat untuk menyatukan perasaan kolektif dan menciptakan resonansi emosional di antara pengguna media sosial lintas negara dan budaya. Ini membuktikan bahwa narasi perjuangan Palestina tidak hanya dibentuk oleh teks verbal, tetapi juga diperkuat oleh representasi visual yang mampu menggerakkan emosi, membangun kesadaran, serta memicu respons aksi solidaritas secara luas. Gambar ini menjadi contoh konkret bagaimana media sosial telah menjadi arena kontestasi makna, di mana simbol-simbol visual dijadikan senjata politik untuk memperjuangkan narasi tandingan terhadap dominasi arus utama pro-Israel.

Analisis Wacana Kritis dari Norman Fairclough melihat bagaimana frasa “Let GAZA Live” menyederhanakan isu yang kompleks menjadi seruan langsung dan mengena, yang membangkitkan kesadaran moral dan empati. Pada level praktik diskursif, unggahan ini merupakan bagian dari praktik sosial pengguna media digital yang menegosiasikan ulang makna konflik dan posisi ideologis mereka terhadapnya. Sementara pada level praktik sosial-budaya, protes digital ini menunjukkan bagaimana publik global, termasuk masyarakat Indonesia, memanfaatkan ruang media sosial untuk mengekspresikan solidaritas dalam bentuk simbolik yang universal, mudah diterima, dan cepat disebarluaskan.

Dalam kerangka politik solidaritas, unggahan ini merefleksikan pergeseran strategi perlawanan dari bentuk konfrontatif bersenjata menjadi perjuangan wacana dan simbol di ruang digital. Penggunaan visual seperti

gambar ini bertujuan membangun kesadaran kolektif serta memperkuat jaringan solidaritas transnasional, yang melintasi batas etnis, agama, dan kebangsaan. Dalam konteks ini, simbolisasi seperti bendera, anak-anak yang menjadi korban, dan kehancuran kota bukan sekadar dokumentasi visual, tetapi juga bentuk artikulasi politik yang menjadikan tubuh-tubuh yang terekspos kekerasan sebagai bukti nyata bahwa krisis ini bukan sekadar konflik dua pihak, melainkan ketidakadilan struktural yang menuntut suara publik dunia.

3. Framing Media Sosial

Dalam dinamika komunikasi digital di media sosial X, framing narasi tentang konflik Hamas dan Israel secara signifikan membentuk identitas dan posisi sosial para pengguna dalam wacana solidaritas *#FreePalestine*. Pahlawan dalam narasi ini bukan hanya terbatas pada rakyat Palestina yang menjadi korban langsung dari konflik, tetapi juga meluas pada relawan kemanusiaan yang aktif memberikan bantuan serta influencer dan tokoh publik yang secara konsisten menyuarakan dukungan melalui konten digital mereka. Kehadiran para “pahlawan” ini menjadi simbol perjuangan keadilan dan kemanusiaan yang menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia secara daring.

Di sisi lain, framing yang berlawanan secara jelas menempatkan Israel dan pendukungnya sebagai “musuh” yang bertanggung jawab atas kekerasan dan penderitaan di Palestina. Tak hanya itu, kelompok warganet yang mencoba bersikap netral atau bahkan mengkritik gerakan solidaritas juga kerap dianggap sebagai bagian dari “musuh” dalam batas-batas identitas digital yang terbentuk. Pola framing seperti ini menciptakan batas-batas sosial dan politik yang tajam dalam ruang digital, yang secara tidak langsung mengkonstruksi siapa yang dianggap sebagai bagian dari “kami” yang berjuang bersama, dan siapa yang dianggap sebagai “mereka” yang harus dilawan atau diwaspadai. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial bukan sekadar platform komunikasi, tetapi juga arena pertarungan narasi yang mengokohkan solidaritas sekaligus memunculkan

polarisasi dalam persepsi masyarakat Indonesia terhadap konflik yang kompleks ini.



Gambar 4. 11 Sumber: Akun X @ Basheera_Putry

Unggahan video dari akun @Basheera_Putry dengan viewers mencapai 23 ribu yang menampilkan narasi mengenai sosok Dr. Ben Thompson, seorang ahli nefrologi di Kanada, yang secara sukarela pergi ke Tepi Barat Laut Gaza untuk membantu sebagai tenaga medis. Dalam unggahan tersebut, terdapat kutipan yang menyentuh dan sarat makna: *“Kami tidak akan beristirahat sampai Rakyat Palestina Merdeka”*, yang secara eksplisit menunjukkan komitmen moral dan kemanusiaan dari tokoh luar negeri terhadap perjuangan rakyat Palestina. Gambar yang ditampilkan sosok dokter dengan seragam medis berwarna biru muda, lengkap dengan stetoskop semakin memperkuat representasi bahwa Dr. Thompson adalah figur “pahlawan kemanusiaan” dalam narasi digital ini. Visual dan narasi yang disajikan mengonstruksi kerangka wacana bahwa dalam konflik Palestina-Israel, pihak yang membantu Palestina secara aktif diposisikan sebagai pahlawan global yang patut dihormati dan dijadikan teladan.

Dalam konteks framing media sosial, unggahan ini menunjukkan bagaimana narasi digital secara selektif membentuk persepsi publik terhadap aktor-aktor tertentu dalam konflik. Framing ini secara eksplisit memosisikan Dr. Thompson sebagai simbol solidaritas lintas batas nasional, budaya, dan agama, dan secara implisit menciptakan dikotomi antara “pahlawan” dan “musuh.” Sang dokter, dengan latar belakang profesional

dan keberanian moralnya, diframing sebagai *agen kebaikan*, pihak yang tidak hanya menyelamatkan nyawa secara klinis, tetapi juga memberikan dukungan ideologis dan emosional kepada perjuangan Palestina. Ini adalah cara halus namun efektif dalam membangun narasi biner antara kekejaman dan kepahlawanan, tanpa harus merinci detail kekerasan atau agresi. Dalam framing seperti ini, identitas dan peran aktor dalam konflik tidak hanya ditentukan oleh tindakan mereka, tetapi juga oleh bagaimana mereka direpresentasikan oleh narasi media sosial.

Dari perspektif teori wacana kritis Norman Fairclough, analisis dapat dimulai dari level tekstual, di mana pilihan kata seperti *“tidak akan beristirahat sampai Rakyat Palestina Merdeka”* menjadi konstruksi linguistik yang sarat makna perjuangan dan keberpihakan. Kalimat tersebut bukan sekadar ekspresi komitmen, tetapi juga bentuk resistensi terhadap narasi pasif atau netral dalam konflik. Ungkapan *“Masya Allah”* dan *“Tabarakallah”* menambah dimensi religius dan afeksi emosional, yang memperdalam rasa hormat dan kekaguman terhadap figur yang ditampilkan. Pada level praktik diskursif, unggahan ini merupakan bagian dari praktik sirkulasi narasi digital yang membangun tokoh-tokoh baru dalam wacana perlawanan Palestina.

Sosok dokter asing direkrut ke dalam sistem tanda simbolik media sosial untuk memperluas spektrum solidaritas dan membingkai perjuangan Palestina sebagai perjuangan universal, bukan hanya isu regional atau keagamaan. Sedangkan pada level praktik sosial-budaya, unggahan ini mencerminkan bagaimana narasi kemanusiaan lintas negara berkembang melalui media sosial sebagai respons terhadap konflik yang tidak mendapatkan penyelesaian melalui forum politik formal. Simbolisasi dokter asing sebagai pahlawan memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan tidak hanya datang dari mereka yang tertindas, tetapi juga dari mereka yang memiliki privilese dan memilih untuk menggunakannya demi keadilan.

Peneliti menganalisis menggunakan perspektif politik solidaritas, maka unggahan ini merepresentasikan bentuk nyata dari solidaritas transnasional. Dr. Thompson digambarkan tidak hanya sebagai dokter, tetapi sebagai agen moral yang menjembatani perjuangan lokal Palestina dengan dukungan global. Politik solidaritas dalam hal ini tidak terbatas pada deklarasi atau dukungan simbolik, tetapi diperluas menjadi aksi nyata melalui kehadiran fisik dan komitmen pribadi dalam zona konflik. Ini adalah bentuk tertinggi dari solidaritas dalam logika politik moral, di mana individu dari luar kelompok korban turut menjadi bagian dari perjuangan tersebut, dan dalam proses itu, ia mendapatkan legitimasi sebagai pahlawan di mata komunitas internasional yang pro-Palestina. Representasi ini juga secara halus mengajak publik untuk ikut serta dalam gerakan solidaritas global, baik dalam bentuk fisik, finansial, maupun penyebaran narasi digital.

Secara keseluruhan, unggahan ini adalah contoh konkret dari konstruksi narasi digital yang memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi global terhadap konflik Palestina-Israel. Melalui figur Dr. Thompson, narasi solidaritas dibingkai sebagai aksi heroik dan penuh empati. Dalam analisis wacana kritis, unggahan ini memperlihatkan bagaimana bahasa, simbol visual, dan framing sosial bekerja bersamaan untuk membentuk pemahaman kolektif tentang siapa yang layak dijadikan teladan dan siapa yang secara implisit ditempatkan sebagai antagonis. Media sosial dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai medan produksi dan reproduksi ideologis, tempat berbagai aktor membentuk makna, memanipulasi persepsi, dan memobilisasi solidaritas.

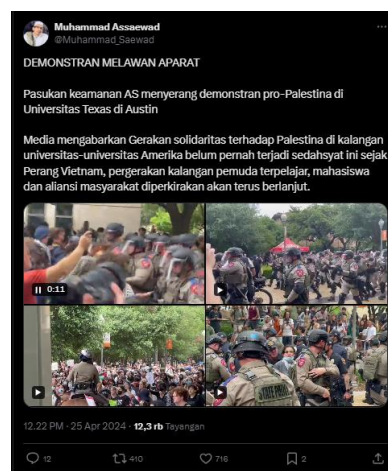
C. Diskursus Alternatif dan Tantangan Narasi

1. Narasi Pro-Israel Dan Kontra-Solidaritas

Meski menjadi suara minoritas dalam jagat media sosial X di Indonesia, terdapat narasi yang secara eksplisit membela Israel atau mengkritik gerakan solidaritas *#FreePalestine* yang tengah menguat. Narasi pro-Israel ini biasanya menyoroiti sisi keamanan dan legitimasi tindakan

militer Israel, termasuk pelabelan terhadap Hamas sebagai kelompok teroris yang dianggap sebagai sumber utama kekerasan. Selain itu, mereka juga menampilkan narasi tentang serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel yang memicu eskalasi konflik, dengan tujuan memberikan konteks yang berbeda dari narasi dominan yang pro-Palestina. Namun, wacana semacam ini sering kali menghadapi perlawanan yang kuat dan respons negatif dari mayoritas warganet Indonesia, yang cenderung bersimpati kepada rakyat Palestina dan menolak pembenaran atas kekerasan yang dialami oleh mereka.

Pola penolakan tersebut tidak hanya menandakan perbedaan pandangan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi medan konflik simbolik, di mana narasi pro-Israel dianggap sebagai ancaman terhadap solidaritas digital yang terbentuk di kalangan masyarakat Indonesia. Situasi ini mengindikasikan bahwa selain memperjuangkan dukungan kemanusiaan, wacana di media sosial juga turut membangun batas-batas sosial dan politik yang membedakan antara “dukungan” dan “pengkhianatan” dalam konteks solidaritas global atas konflik yang sedang berlangsung.



Gambar 4. 12 Sumber: Akun X @Muhammad_Saewad

Gambar yang diambil dari unggahan akun X @Muhammad_Saewad dengan total penayangan konten video mencapai 12,3 ribu yang menuai respon warganet mencapai 410 retweet dan 716 likes yang dimana

menampilkan situasi represif yang terjadi di Universitas Texas di Austin, Amerika Serikat, di mana pasukan keamanan AS tampak menggunakan kekuatan untuk membubarkan aksi demonstrasi pro-Palestina. Visual ini dibagi dalam beberapa frame, masing-masing menunjukkan suasana demonstrasi yang penuh ketegangan: mahasiswa yang berhadapan langsung dengan polisi, petugas keamanan bersenjata lengkap dalam formasi terorganisir, dan kerumunan massa yang membawa semangat kolektif.

Di balik gambaran itu, narasi teks yang menyertainya memperkuat dimensi ideologis dari gambar, dengan menyebut bahwa “gerakan solidaritas terhadap Palestina di kalangan universitas-universitas Amerika belum pernah terjadi sedahsyat ini sejak Perang Vietnam.” Pernyataan ini bukan hanya bentuk dokumentasi sejarah, melainkan juga penegasan posisi bahwa gerakan mahasiswa saat ini tengah membangkitkan kembali semangat perlawanan terhadap struktur kekuasaan hegemonik, mirip seperti yang terjadi dalam era protes anti-perang Vietnam di abad ke-20.

Secara tekstual, narasi unggahan ini menggunakan diksi yang sarat konflik dan perjuangan: “menyerang,” “demonstran,” “gerakan solidaritas,” “pergerakan kalangan pemuda terpelajar.” Kata-kata tersebut memproduksi makna bahwa perjuangan mahasiswa bukanlah sekadar bentuk ekspresi emosional, tetapi bagian dari gerakan politik yang sistematis dan bermakna historis. Dalam pendekatan teori wacana Norman Fairclough, level tekstual ini menyajikan wacana perlawanan dengan gaya bahasa yang mendesak dan heroik. Pada level praktik diskursif, unggahan ini adalah bagian dari praktik penyebaran wacana alternatif yang berupaya melawan narasi dominan, yakni narasi negara dan institusi yang selama ini dianggap pro-Israel. Ketika pasukan keamanan AS ditampilkan secara visual sebagai aktor represif terhadap suara pro-Palestina, maka narasi ini bukan hanya mengkritik tindakan kekerasan, tetapi juga mengungkap keberpihakan institusional terhadap posisi politik tertentu.

Dalam konteks politik solidaritas, visualisasi ini mencerminkan bahwa aksi solidaritas global terhadap Palestina menghadapi perlawanan

dari narasi negara dominan, yang dalam hal ini terwujud melalui tindakan koersif aparat keamanan. Politik solidaritas tidak hanya bicara soal empati atau pernyataan dukungan verbal, tetapi juga menuntut ruang dan pengakuan dalam struktur wacana publik. Ketika mahasiswa AS memperjuangkan Palestina, mereka pada dasarnya sedang menantang hegemoni narasi politik luar negeri Amerika yang selama ini berpihak pada Israel. Framing tersebut bukan hanya menghambat ekspresi pro-Palestina, tetapi juga mencoba mempertahankan dominasi ideologis bahwa posisi pro-Israel adalah norma, sedangkan dukungan terhadap Palestina adalah penyimpangan yang perlu dikontrol, diawasi, bahkan dipadamkan.

Berdasarkan perspektif analisis wacana kritis, jelas bahwa terdapat ketegangan antara produksi wacana dominan (negara dan aparat keamanan) dengan wacana tandingan (gerakan mahasiswa pro-Palestina). Gambar dan narasi dalam unggahan ini berfungsi sebagai bentuk artikulasi diskursus alternatif yang berupaya menantang dominasi simbolik tersebut. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai arena pertempuran wacana, di mana narasi-narasi alternatif seperti yang dibawa oleh mahasiswa Amerika harus berhadapan langsung dengan instrumen kekuasaan negara. Momen ini mengingatkan bahwa solidaritas tidaklah netral, dan keberpihakan terhadap Palestina bukanlah posisi yang tanpa konsekuensi. Justru, di sinilah terlihat bahwa gerakan solidaritas global terhadap Palestina dibentuk, disalurkan, dan sekaligus dihambat oleh struktur kekuasaan simbolik maupun fisik.



Gambar 4. 13 Sumber: Akun X @PPQSI_

Gambar yang ditampilkan dalam unggahan akun X @PPQSI_ ini mencuri perhatian warganet dengan jumlah likes 3 ribu dan 900 retweet yang memperlihatkan suasana malam yang mencekam dengan latar visual berupa kobaran api di sekitar papan merek restoran cepat saji McDonald's yang sangat ikonik dan mudah dikenali. Percikan api tampak menyala liar di sekitar papan tersebut, menciptakan kesan destruktif, disertai pepohonan terbakar yang memperkuat kesan adanya bencana atau kehancuran. Unggahan ini dilengkapi dengan narasi yang secara tegas menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan seperti McDonald's "mengalirkan dana untuk membakar dan melakukan genosida di Gaza, Palestina." Dalam kalimat lanjutannya, narasi menyebut bahwa bencana yang melanda pihak tersebut merupakan bentuk "bala" atau hukuman dari Tuhan, sebagai balasan atas kekejaman mereka. Unggahan ini ditutup dengan tagar #BoycottIsrael, yang secara eksplisit mengarahkan pembaca pada kampanye pemboikotan global terhadap entitas-entitas yang dianggap mendukung Israel.

Secara tekstual, gambar dan caption ini dirancang untuk menyampaikan pesan moral dan religius sekaligus menyasar persepsi ideologis publik. Kalimat "Allah SWT mengirimkan bala" mencerminkan bingkai teologis yang kuat, di mana narasi penderitaan Palestina ditempatkan dalam konteks perlawanan spiritual terhadap ketidakadilan. Penggunaan diksi "genosida" dan "kekejaman" menjadi bagian dari strategi wacana untuk memperkuat legitimasi moral dari ajakan boikot tersebut. Dalam pendekatan teori wacana Norman Fairclough, lapisan tekstual dari unggahan ini menyampaikan pesan dengan pilihan kata emotif, sarkastik, dan religius, yang secara sadar membangun oposisi biner antara "yang dizalimi" (Palestina) dan "yang menzalimi" (entitas pro-Israel seperti korporasi internasional).

Pada tingkat praktik diskursif, unggahan ini merupakan bagian dari praktik produksi ulang wacana boikot terhadap Israel yang sangat populer di media sosial selama eskalasi konflik 2023–2024, terutama melalui visual-visual yang menggambarkan kehancuran sebagai bentuk 'balasan ilahi'. Di

tingkat praktik sosial-budaya, narasi ini lahir dari konteks globalisasi ekonomi yang mempertemukan konsumsi produk Barat dengan kesadaran politik umat Muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, produk komersial seperti McDonald's bukan lagi semata-mata simbol kapitalisme global, tetapi telah di-framing sebagai representasi dari dukungan terhadap kekejaman Israel.

Unggahan ini menunjukkan bagaimana wacana solidaritas terhadap Palestina tidak hanya bersifat politis atau kemanusiaan, tetapi juga berbasis spiritual dan identitas keagamaan. Visualisasi kehancuran logo McDonald's diiringi narasi teologis mengindikasikan pergeseran solidaritas ke dalam bentuk perlawanan simbolik. Boikot dijadikan alat untuk menunjukkan keberpihakan moral, sekaligus menjadi bentuk resistensi terhadap hegemoni kapitalisme global yang dianggap bersekutu dengan kekuatan pro-Israel. Hal ini mempertegas bahwa dalam politik solidaritas kontemporer, tindakan sehari-hari seperti memilih produk atau brand tertentu dapat bermakna politis dan ideologis. Solidaritas tidak lagi terbatas pada bentuk protes atau donasi, tetapi juga mencakup pilihan konsumsi yang dimaknai sebagai sikap ideologis.

Unggahan ini mengungkap bagaimana narasi tandingan dibentuk sebagai perlawanan terhadap dominasi narasi pro-Israel di media arus utama dan jaringan ekonomi global. Perusahaan multinasional seperti McDonald's, yang sering dianggap netral dan apolitis dalam tataran bisnis, dalam diskursus ini diposisikan sebagai aktor yang terlibat aktif dalam kekerasan struktural terhadap rakyat Palestina. Narasi ini menantang keumuman wacana "normal" dalam konsumsi global dan mencoba menggugat ulang relasi antara konsumen, kapitalisme, dan konflik politik. Tagar #BoycottIsrael adalah salah satu bentuk artikulasi diskursus alternatif yang mencoba melawan narasi dominan, bahwa dukungan terhadap Israel adalah sah dan netral.

Melalui pendekatan analisis wacana kritis, dapat disimpulkan bahwa unggahan ini adalah bagian dari konstruksi ideologis yang kompleks, di

mana entitas-entitas global diposisikan sebagai musuh yang berkontribusi dalam penderitaan Palestina. Visual kehancuran digunakan sebagai simbol kejatuhan moral dari institusi-institusi yang dianggap mendukung kekerasan. Dengan demikian, gambar ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa kebakaran, tetapi juga memaknai ulang peristiwa tersebut dalam bingkai moral, spiritual, dan politik.

2. Resistensi Terhadap Polarisasi Dan Suara Moderat

Di tengah arus deras narasi yang kerap mempolarisasi pengguna media sosial X terkait konflik Hamas dan Israel, terdapat kelompok pengguna yang mencoba mengambil posisi moderat sebagai bentuk resistensi terhadap polarisasi yang semakin tajam. Para pengguna ini menyerukan pentingnya perdamaian dan dialog dua negara sebagai solusi damai yang lebih manusiawi, sekaligus berupaya menghindari ujaran kebencian yang dapat memperburuk ketegangan di ranah digital. Mereka mengkritik keras narasi-narasi berlebihan dan simplifikasi yang kerap muncul dalam diskursus solidaritas digital, yang tidak jarang memicu disinformasi maupun memperkuat perpecahan di antara masyarakat.

Suara moderat ini berperan sebagai pengingat bahwa konflik yang kompleks tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hitam-putih, melainkan membutuhkan pemahaman yang mendalam dan sikap empati dari berbagai pihak. Dalam konteks masyarakat Indonesia di media sosial, suara-suara moderat ini meskipun tidak dominan, menunjukkan upaya kritis untuk menyeimbangkan wacana dan menjaga ruang publik agar tetap kondusif, inklusif, dan tidak terjebak pada polarisasi yang destruktif. Dengan demikian, mereka menghadirkan alternatif narasi yang mengajak pengguna untuk berpikir lebih reflektif dan humanis di tengah gelombang solidaritas yang kuat namun terkadang eksklusif.



Gambar 4. 14 Sumber: Akun X @MariaAlkaff_

Gambar unggahan dari akun X @MariaAlkaff dengan total penayangan mencapai 6 ribu. Hal ini merupakan sebuah teks digital yang menampilkan ekspresi kuat terhadap isu kemanusiaan dalam konteks konflik Palestina-Israel. Teks diawali dengan sapaan "Assalaamu'alaikum, X-verse..." yang secara langsung menyapa komunitas digital pengguna platform X (dulu Twitter), kemudian dilanjutkan dengan serangkaian pertanyaan retorik yang menggugah kesadaran nurani kolektif: "Seberapa peduli kita terhadap kemanusiaan?", "Seberapa peduli kita terhadap terjadinya pembantaian warga sipil, anak-anak, bayi dan perempuan?", hingga "Seberapa peduli kita untuk 'menghidupkan hati' kita dan memanusiakan saudara-saudara kita di Palestina?". Kalimat-kalimat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai seruan empatik, tetapi juga sebagai ajakan untuk keluar dari sikap pasif dan apatis.

Pada dasarnya, unggahan ini menjadi wujud resistensi digital terhadap narasi dominan yang seringkali bias, menutupi penderitaan rakyat Palestina, dan menormalisasi kekerasan yang terjadi. Dengan menutup narasi dengan kalimat "Cukup lah jadi manusia untuk saudara2 kita di Palestina. Hasbunallah wani'mal wakil...", pengguna membingkai konflik ini dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas, sekaligus memperkuat solidaritas lintas identitas keagamaan dan nasional.

Teks ini mencerminkan bentuk perlawanan wacana terhadap polarisasi narasi media arus utama global yang kerap menyudutkan Palestina sebagai pihak yang bersalah atau mengabaikan realitas penderitaan rakyat sipil Palestina. Polarisasi ini muncul ketika narasi

dominan mengaburkan realitas penjajahan dan genosida dengan menyamakan konflik sebagai perang dua kubu setara (simetris), padahal terdapat relasi kekuasaan yang timpang antara Israel sebagai negara dengan alat militer canggih dan Palestina sebagai pihak yang dijajah. Dalam konteks ini, unggahan Maria Alkaff berperan sebagai suara moderat yang mencoba menyeimbangkan dan mengoreksi narasi publik, sekaligus menegaskan posisi etis dan moral yang berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Seruan untuk “cukup menjadi manusia” menandai bentuk diskursus alternatif yang menolak kebencian dan ekstremisme, sekaligus membuka ruang empati yang luas bagi khalayak lintas ideologi, agama, dan politik.

Politik solidaritas dalam konteks unggahan ini adalah seruan kemanusiaan universal, yang tidak terbatas pada sentimen keagamaan atau nasionalisme sempit, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak hidup, martabat manusia, dan penolakan terhadap penjajahan. Melalui media sosial X, solidaritas ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi ruang artikulasi kolektif masyarakat Indonesia dalam mendesak narasi alternatif yang lebih adil dan manusiawi atas konflik Hamas-Israel. Maria Alkaff sebagai aktor wacana memainkan peran strategis sebagai penggerak opini publik, di mana pesan-pesan humanisnya menjadi pemantik kesadaran sosial bagi pengguna X lainnya untuk tidak diam atas kekejaman yang terjadi di Palestina.

Dalam kerangka teks (tekstual), unggahan ini menyajikan struktur bahasa yang sangat kuat secara emosional dan persuasif. Pertanyaan retorik yang digunakan tidak ditujukan untuk memperoleh jawaban literal, melainkan untuk menggugah kesadaran batin pembaca. Pilihan diksi seperti “membantaian”, “genosida”, “menghidupkan hati”, hingga “cukup jadi manusia” merupakan bentuk konstruksi wacana yang sengaja dibuat untuk mengimbangi narasi media internasional yang sering menggunakan istilah teknokratik dan netral (misalnya “konflik”, “serangan balik”, atau “operasi militer”). Dalam tingkat praktik diskursif (discourse practice), unggahan ini

beredar dan diproduksi dalam ekosistem media sosial X yang menjadi arena pertarungan narasi digital.

Unggahan ini bersaing dengan berbagai bentuk opini publik, propaganda politik, hingga disinformasi, sehingga kehadirannya sebagai bentuk suara moderat menjadi signifikan dalam menciptakan keseimbangan perspektif. Sementara itu, dalam tingkat praktik sosial-budaya (sociocultural practice), teks ini dibentuk oleh konteks sosial masyarakat Indonesia yang secara historis dan budaya memiliki solidaritas tinggi terhadap Palestina, didasari oleh faktor keagamaan, sejarah anti-kolonial, dan semangat kemanusiaan. Unggahan ini juga mengandung modal sosial berupa nilai-nilai kolektif bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan global dan menolak ketidakadilan struktural, termasuk dalam isu penjajahan dan pelanggaran HAM.

Politik solidaritas hadir sebagai kerangka nilai dan etika dalam menghadirkan posisi etis masyarakat Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel, sementara Analisis Wacana Kritis memberikan perangkat konseptual dan metodologis untuk menelusuri bagaimana wacana tersebut dibentuk, disebarluaskan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik digital. Dalam konteks ini, unggahan Maria Alkaff tidak hanya menjadi ekspresi individual, melainkan juga bagian dari praktik sosial yang lebih besar, yaitu upaya masyarakat Indonesia dalam membangun narasi alternatif yang menolak polarisasi berbahaya, mempromosikan suara moderat, dan memperkuat solidaritas digital *#FreePalestine*. Dengan kata lain, gambar ini menjadi bukti bahwa media sosial bukan hanya arena komunikasi, tetapi juga ruang perjuangan makna dan keadilan.



Gambar 4. 15 Sumber: Akun X @Silviamihan

Gambar dalam unggahan @Silviamihan merupakan potret visual yang sangat kuat secara emosional dan simbolis. Di latar depan tampak ilustrasi seorang anak Palestina yang wajahnya penuh luka dan air mata, memegang selembar kertas bergambar senyum yang menutupi mulutnya. Di belakangnya terbentang latar reruntuhan bangunan yang secara visual langsung terbaca sebagai situasi pasca-pengeboman atau kehancuran akibat agresi militer. Komposisi ini menampilkan kontras yang menyentuh antara kehancuran dan upaya semu untuk “menutupi” rasa sakit, penderitaan, dan trauma anak tersebut. Senyum palsu pada secarik kertas bukanlah lambang harapan, melainkan simbol dari represi, kebungkaman, dan narasi semu yang coba dibangun oleh media dominan dan kekuasaan global. Anak tersebut tidak benar-benar tersenyum, ia menangis, ia hancur, namun ia dipaksa tampil “baik-baik saja” di tengah penderitaan yang membanjir. Gambar ini tidak hanya berbicara tentang Palestina, tetapi tentang mekanisme kekuasaan wacana global yang menutup-nutupi kekerasan struktural dan genosida dengan narasi “damai” yang palsu.

Teks yang menyertai gambar tersebut yaitu “Karena membela Palestina bukan hanya soal agama dan kesukuan, tapi soal membela kemanusiaan dan keadilan” menegaskan posisi wacana penulis sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang menolak polarisasi sektarian dalam menyikapi konflik Palestina-Israel. Kalimat ini merupakan bentuk resistensi terhadap narasi dominan yang kerap mereduksi perjuangan rakyat Palestina sebagai konflik berbasis agama (Islam vs Yahudi), padahal esensi dari

perjuangan ini adalah soal kolonialisme, apartheid, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Unggahan ini memperlihatkan suara moderat yang justru memperkuat keutuhan pesan perjuangan: bahwa membela Palestina bukan berarti berpihak pada satu agama, melainkan berpihak pada nilai universal kemanusiaan. Unggahan ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat sipil menggunakan media sosial untuk melawan polarisasi, tidak dengan ujaran kebencian, tetapi dengan narasi alternatif yang inklusif, empatik, dan berbasis nilai-nilai etis universal. Dalam konteks ini, unggahan @Silviamihan tidak hanya menjadi ekspresi moral, melainkan juga bagian dari gerakan digital yang mengusung wacana tandingan terhadap dominasi narasi Barat. Gambar dan teks ini dipahami dalam kerangka Politik Solidaritas yang mengedepankan pentingnya membangun aliansi lintas identitas dan batas geografis untuk melawan ketidakadilan struktural. Politik Solidaritas tidak mempersoalkan latar belakang agama, ras, atau kebangsaan dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Sebaliknya, ia mengedepankan prinsip bahwa penderitaan manusia dimanapun adalah tanggung jawab kolektif umat manusia.

Dalam unggahan ini, seruan “membela kemanusiaan dan keadilan” menjadi dasar moral sekaligus strategi wacana yang menyatukan berbagai latar belakang individu dalam satu misi: menghapus penjajahan, genosida, dan ketidakadilan global. Unggahan ini dengan demikian melampaui batas aktivisme agama atau etnis dan menjadi bagian dari jaringan solidaritas global yang bersandar pada nilai-nilai etis bersama. Politik Solidaritas ini juga mengandung aspek resistensi: ia menolak dikotomi “kami” versus “mereka” yang digunakan rezim kolonial dan propaganda untuk membenarkan kekerasan. Maka, gambar tersebut menjadi alat artikulasi dari solidaritas itu sendiri yaitu simbol kekuatan moral dari mereka yang tidak bersenjata namun berani bersuara.

Pada tataran teks (tekstual), konstruksi visual yang digunakan menghadirkan kontras semantik antara simbol senyum dan ekspresi tangis,

serta pemilihan kata-kata “agama”, “kesukuan”, “kemanusiaan”, dan “keadilan” yang memiliki bobot moral dan politis yang tinggi. Struktur ini menyampaikan makna bahwa narasi perdamaian sejati tidak bisa dibangun di atas penderitaan yang disangkal. Pada tataran praktik diskursif (discourse practice), unggahan ini beredar di platform X (Twitter), yang dikenal sebagai ruang pertarungan wacana yang dinamis dan terbuka. Dalam arena ini, pengguna seperti @Silviamihan menjadi produsen sekaligus distributor wacana tandingan, yang dengan sengaja memposisikan dirinya dalam ranah perlawanan terhadap hegemoni informasi mainstream yang pro-Israel.

Media sosial menjadi medan kontestasi antara narasi “resmi” dan suara-suara dari akar rumput global yang mencoba mendobrak monopoli makna. Sementara itu, dalam dimensi praktik sosial-budaya (sociocultural practice), unggahan ini dibentuk oleh latar belakang budaya bangsa Indonesia yang historis memiliki hubungan solidaritas yang kuat dengan Palestina. Solidaritas ini bukan hanya berbasis keagamaan, tetapi juga pada warisan sejarah bangsa Indonesia yang menolak kolonialisme dalam bentuk apapun. Unggahan ini mencerminkan sikap kolektif masyarakat Indonesia yang tidak tinggal diam dalam melihat ketidakadilan global, dan memilih untuk terlibat secara moral dan digital dalam perjuangan kemanusiaan.

3. Strategi Debunking Dan Fact-Checking Oleh Pengguna (#)

Dalam pusaran intensitas wacana digital seputar konflik Hamas dan Israel di media sosial X, muncul peran penting dari sejumlah akun pengguna yang secara aktif menjalankan fungsi verifikasi fakta dan debunking terhadap berbagai narasi hoaks maupun disinformasi yang beredar. Para pengguna ini tidak hanya sekadar membantah informasi keliru, tetapi juga berinisiatif mengedukasi publik melalui unggahan thread yang sistematis dan berbasis data, dengan tujuan memperjelas konteks serta meminimalisir dampak negatif dari berita palsu. Strategi fact-checking ini menjadi bentuk rasionalisasi yang krusial di tengah arus emosional dan polarisasi yang kerap memanasi di ruang digital. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa di antara gelombang solidaritas yang penuh semangat, terdapat upaya literasi digital yang mendalam, yang berfungsi untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya verifikasi informasi dan penggunaan sumber yang kredibel. Dengan demikian, proses debunking ini bukan hanya memperkuat kualitas diskursus publik, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap manipulasi informasi yang dapat memecah belah solidaritas dan memperkeruh pemahaman tentang konflik yang kompleks ini.



Gambar 4. 16 Sumber: Akun X @DebryChrisW

Gambar unggahan dari akun X (Twitter) milik Chris Williamson menyampaikan satu bentuk intervensi diskursif yang tajam, jelas, dan penuh keberanian terhadap dominasi narasi global mengenai tragedi 7 Oktober dalam konflik Israel-Palestina. Dalam unggahan tersebut, Chris menyatakan bahwa “propaganda kekejaman Israel secara menyeluruh dibantah dalam sebuah dokumenter baru,” sambil menyertakan tautan ke artikel dari electronicintifada.net yang merujuk pada laporan investigatif Al Jazeera yang mengungkap fakta bahwa sebagian besar klaim kekejaman oleh warga Palestina ternyata tidak benar, dan bahkan dalam beberapa kasus, justru pasukan Israel sendiri yang secara tidak sengaja menewaskan warga sipil Israel dalam baku tembak pada 7 Oktober.

Penyebutan “Israeli atrocity propaganda” merupakan bentuk perlawanan langsung terhadap narasi dominan yang disebarluaskan oleh media arus utama internasional, terutama di Barat, yang selama ini

cenderung menggambarkan pihak Palestina sebagai pelaku kekejaman tanpa menyertakan bukti yang kuat atau dengan menyensor informasi yang tidak mendukung kepentingan geopolitik negara-negara besar. Dengan menyertakan tagar *#FreePalestine*, Chris juga secara terbuka memosisikan dirinya dalam solidaritas global bersama perjuangan rakyat Palestina, sekaligus menyuarakan keperluan untuk membongkar kebohongan dan distorsi informasi yang telah membentuk opini publik secara tidak adil.

Unggahan ini merepresentasikan strategi debunking yang semakin jamak digunakan oleh pengguna media sosial di era pasca-kebenaran (post-truth), yaitu ketika kebenaran tidak lagi diproduksi oleh lembaga-lembaga formal seperti pemerintah atau media arus utama, tetapi justru oleh warga sipil yang memanfaatkan teknologi digital untuk membongkar, menantang, dan menyodorkan narasi tandingan. Dalam konteks ini, Chris Williamson, sebagai figur publik, memanfaatkan kekuatan mikroblogging untuk melakukan counter-narrative atau wacana penyeimbang terhadap dominasi narasi negara dan media pro-Israel. Strategi debunking ini tidak dilakukan dengan sembarang klaim atau opini, melainkan merujuk pada hasil investigasi jurnalistik dari Al Jazeera yang memiliki kredibilitas tinggi di ranah global.

Dengan demikian, unggahan ini mencerminkan bahwa fact-checking di ranah media sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga seperti Snopes atau MAFINDO, melainkan juga oleh individu yang aktif menyebarluaskan hasil temuan jurnalistik independen. Proses ini memperlihatkan bahwa media sosial bukan sekadar ruang ekspresi bebas, tetapi juga arena epistemik baru di mana kebenaran dan keadilan bisa diperjuangkan oleh rakyat biasa melalui literasi digital dan kesadaran politis.

Dari sisi tekstual, struktur kalimat “Israeli atrocity propaganda is comprehensively debunked in a new documentary” menunjukkan penggunaan diksi kuat dan konklusif (“comprehensively debunked”) yang secara semantik menggugurkan validitas narasi lama dan memperkuat

kredibilitas narasi tandingan. Ini adalah bentuk strategi retorik yang efektif dalam membangun otoritas wacana baru. Dari segi praktik diskursif, unggahan ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari praktik distribusi pengetahuan dan informasi di ekosistem digital yang sedang mengalami perubahan besar. Platform seperti X menjadi medium di mana berita alternatif dapat bersaing secara langsung dengan narasi media korporat dan negara, sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran otoritas dalam produksi pengetahuan.

Chris Williamson, dalam hal ini, berfungsi sebagai aktor diskursif yang memediasi informasi dari media independen ke publik digital global, dan sekaligus memperluas jangkauan dampak diskursif dokumenter tersebut. Sedangkan dari perspektif praktik sosial-budaya, unggahan ini mencerminkan respons kultural terhadap situasi di mana masyarakat semakin menyadari manipulasi media dan politik informasi global. Munculnya kesadaran kolektif tentang bagaimana wacana “teroris Palestina” dibentuk untuk membenarkan tindakan brutal Israel telah mendorong masyarakat sipil di berbagai negara untuk membongkar kebohongan ini melalui dokumentasi ulang, penyelidikan independen, dan penyebaran hasil-hasil tersebut melalui media sosial.

Dalam konteks Politik Solidaritas, unggahan ini tidak hanya bermakna sebagai tindakan informatif, tetapi juga simbolik dan politis. Chris Williamson bukan warga Palestina, namun ia menunjukkan bahwa solidaritas lintas batas geografis dan identitas adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan kontemporer melawan ketidakadilan global. Dengan membagikan hasil investigasi Al Jazeera, ia menolak diam terhadap narasi palsu dan memilih berpihak pada kebenaran yang disuarakan oleh mereka yang tidak punya kuasa media. Politik Solidaritas dalam hal ini berfungsi sebagai fondasi moral yang melampaui sekat-sekat identitas agama, bangsa, dan etnis. Ia menjembatani perjuangan kemanusiaan dalam era digital, di mana keterlibatan seseorang tidak lagi ditentukan oleh letak geografisnya, tetapi oleh keberanian dan kepeduliannya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Unggahan ini menolak logika polarisasi yang memisahkan

“kita” dan “mereka”, dan sebaliknya, membangun kesadaran kolektif bahwa penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina adalah luka kemanusiaan global yang harus direspons bersama.

Dengan demikian, relevansi antara Teori Wacana Fairclough dan Politik Solidaritas menjadi nyata dalam praktik unggahan ini. Di satu sisi, kita melihat bagaimana wacana dibentuk, diedarkan, dan dikontestasikan melalui platform digital (sebagaimana dijelaskan Fairclough). Di sisi lain, kita menyaksikan bagaimana wacana tersebut tidak hanya menyangkut aspek bahasa, tetapi juga menyentuh isu-isu moral, keadilan sosial, dan komitmen global terhadap hak asasi manusia (sebagaimana digagas dalam Politik Solidaritas). Keduanya berpadu untuk menunjukkan bahwa strategi debunking dan fact-checking oleh pengguna tidak bisa dipandang sebagai praktik netral atau teknis belaka, tetapi merupakan bagian dari perjuangan ideologis dan moral melawan dominasi narasi hegemonik. Unggahan ini menjadi bukti bahwa di era media sosial, warga sipil bisa menjadi pelaku perubahan diskursif, membangun jembatan solidaritas global, dan mengubah cara dunia memahami konflik dan penderitaan. Maka, gambar ini tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi juga instrumen perlawanan, ekspresi solidaritas, dan penguatan demokrasi digital global.



Gambar 4. 17 Sumber: Akun X @tech4palestine

Unggahan dari akun X (Twitter) Tech For Palestine bertanggal 13 Januari 2024 dengan jumlah tayangan mencapai 223 ribu ini merupakan representasi diskursif yang sangat kuat dari praktik perlawanan terhadap hegemoni narasi dominan terkait tragedi 7 Oktober 2023 dalam konflik Israel-Palestina. Gambar tersebut berisi pernyataan yang secara eksplisit menyatakan bahwa “tidak ada pembenaran untuk genosida. Tetapi Israel berbohong tentang 40 bayi yang dipenggal untuk meyakinkan dunia bahwa

genosida itu bisa dibenarkan.” Kalimat ini bukan hanya merupakan tuduhan, tetapi juga bentuk dekonstruksi terhadap narasi horor yang telah menyebar luas melalui media arus utama yakni cerita mengenai bayi-bayi yang dipenggal oleh pejuang Palestina, yang kemudian digunakan secara luas sebagai pembenaran atas agresi militer Israel ke Jalur Gaza.

Dalam konteks ini, unggahan ini tidak berdiri sebagai opini semata, melainkan sebagai deklarasi diskursif yang secara sadar dirancang untuk mengintervensi konstruksi narasi global, sekaligus memposisikan ulang opini publik internasional terhadap siapa yang sebenarnya menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku kekejaman. Pernyataan tersebut dilengkapi dengan peluncuran proyek *Oct7FactCheck*, yang disebut sebagai upaya pengecekan fakta menyeluruh dan berbasis riset mendalam terhadap klaim-klaim seputar kejadian 7 Oktober.

Melalui konten ini, Tech For Palestine menjalankan strategi debunking dan fact-checking dengan menggabungkan dua elemen penting: (1) penolakan narasi dominan yang membenarkan kekerasan dengan dalih moral, dan (2) penguatan validitas melalui penyelidikan sistematis yang ditawarkan lewat peluncuran situs pengecekan fakta. Unggahan ini juga memosisikan pengguna sebagai agen diskursif yang aktif, bukan sekadar konsumen informasi. Mereka tidak hanya membantah narasi resmi yang menyudutkan Palestina, tetapi juga memproduksi narasi tandingan berbasis data, riset, dan dokumentasi yang dapat diverifikasi. Strategi ini mencerminkan pergeseran otoritas pengetahuan dari lembaga-lembaga formal ke entitas sipil dan kolektif digital. Di sinilah letak kekuatan politik solidaritas yang dijalankan secara strategis: solidaritas yang tidak hanya emosional atau simbolik, melainkan juga epistemologis dan aksiologis, yaitu dengan berpartisipasi dalam proses produksi kebenaran. Pengguna media sosial seperti Tech For Palestine merebut kembali ruang wacana publik dari monopoli media korporasi dan negara, dan menghadirkannya sebagai ruang perjuangan yang sah untuk menentang ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran alternatif.

Dalam kerangka Politik Solidaritas, unggahan ini menegaskan bahwa solidaritas hari ini tidak cukup diwujudkan dengan sekadar menyuarakan dukungan atau membagikan gambar-gambar menyedihkan. Solidaritas yang ditunjukkan di sini adalah solidaritas aktif dan terinformasi, yaitu tindakan konkret untuk membongkar kebohongan sistemik dan membuka jalan bagi pemulihan kebenaran. Penggunaan teknologi informasi dan riset digital seperti yang dilakukan melalui *Oct7FactCheck* menjadi alat perjuangan baru yang menyatukan kekuatan global lintas identitas, bangsa, dan latar belakang, untuk menyatakan bahwa penderitaan rakyat Palestina bukan narasi pasif yang harus ditonton, melainkan realitas yang harus dibongkar dan dilawan. Solidaritas ini membentuk jaringan global kesadaran politik yang menolak tunduk pada narasi besar yang sering kali bias kepentingan dan kekuasaan. Ketika warga sipil, peneliti, aktivis, dan pembuat konten bersatu dalam produksi kebenaran, mereka bukan hanya menyuarakan solidaritas, melainkan juga mengambil bagian dalam perjuangan melawan kolonialisme informasi.

BAB V

PRAKTIK SOSIAL DAN IDENTITAS POLITIK DALAM WACANA

A. Solidaritas Digital sebagai Praktik Sosial Kolektif

1. Gerakan Organik VS Gerakan Terorganisir

Wacana solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X muncul sebagai praktik sosial kolektif yang berkembang melalui dua dinamika utama, yaitu gerakan organik yang tumbuh secara spontan dari masyarakat biasa, serta gerakan terorganisir yang didorong oleh aktor-aktor yang memiliki agenda dan struktur tertentu. Gerakan organik ini terlihat dari banyaknya cuitan, unggahan, dan tagar yang viral yang berasal dari individu pengguna biasa tanpa keterkaitan formal dengan organisasi manapun, yang mengekspresikan empati dan dukungan secara alami berdasarkan kesadaran dan kepekaan sosial mereka terhadap penderitaan rakyat Palestina. Di sisi lain, terdapat pula pengaruh signifikan dari aktor-aktor terorganisir seperti lembaga swadaya masyarakat (NGO), influencer dengan jangkauan luas, serta lembaga dakwah yang memiliki strategi komunikasi terencana dan sumber daya untuk memobilisasi solidaritas yang lebih sistematis. Kombinasi kedua pola ini menciptakan sebuah ekosistem solidaritas digital yang kompleks dan dinamis, di mana gerakan organik memberikan warna autentik dan spontan, sementara gerakan terorganisir menambah intensitas serta konsistensi penyebaran pesan solidaritas. Fenomena ini menggarisbawahi bagaimana media sosial X tidak hanya menjadi ruang ekspresi individual, tetapi juga arena kolaborasi dan negosiasi antara berbagai aktor sosial yang berkontribusi membentuk narasi solidaritas yang masif dan berdampak dalam konteks konflik internasional yang sedang berlangsung.



Gambar 4. 18 Sumber: Akun X @IndonesiaGelap

Gambar 4.18 yang diambil dari akun X @IndonesiaGelap merekam secara visual salah satu momen penting dalam praktik solidaritas digital yang juga bertransformasi menjadi aksi nyata di ruang publik. Dalam gambar tersebut, sebuah demonstrasi berlangsung di lokasi strategis sebuah kota besar dengan latar belakang menara monumental yang mendominasi bingkai, memberi kesan simbolis kuat tentang skala dan makna peristiwa. Di atas panggung darurat, dua tokoh pria tampak berbicara sambil memegang mikrofon, dikelilingi oleh bendera Palestina dan Indonesia yang berkibar berdampingan, memperlihatkan perpaduan identitas nasional dan solidaritas internasional yang kuat. Massa pendukung yang hadir mengenakan atribut khas kampanye solidaritas seperti syal keffiyeh dan kaus putih, sambil membawa bendera serta poster-poster bertuliskan slogan perjuangan. Spanduk besar bertuliskan “Alun-Alun Palestina” mengukuhkan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari gerakan solidaritas yang memiliki karakter kolektif dan kesadaran bersama terhadap isu Palestina.

Momen ini menggambarkan bagaimana solidaritas digital *#FreePalestine* tidak hanya terbatas pada ruang virtual di media sosial X, melainkan juga memicu aksi nyata yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Gerakan ini lahir dari kombinasi dua bentuk mobilisasi sosial: gerakan organik yang tumbuh spontan dari kesadaran individu dan

komunitas biasa, serta gerakan terorganisir yang melibatkan aktor-aktor dengan kapasitas lebih besar seperti NGO, influencer, dan lembaga dakwah yang mampu mengkoordinasi aksi secara sistematis. Gerakan organik muncul sebagai respons spontan terhadap peristiwa konflik yang menyentuh nilai kemanusiaan, sementara gerakan terorganisir memberikan struktur dan strategi komunikasi yang memperkuat daya jangkauan serta dampak solidaritas tersebut. Interaksi antara gerakan organik dan terorganisir ini menciptakan sinergi yang memperkuat narasi solidaritas digital sekaligus memperluas jangkauan aksi sosial di dunia nyata, menunjukkan bagaimana praktik solidaritas di era digital menjadi fenomena sosial kolektif yang kompleks dan multifaset.



Gambar 4. 19 Sumber: Akun X @DFighter_

"Dampak Protes Mahasiswa, Universitas di Spanyol Memutus Hubungan Mereka dengan Israel" *#FreePalestine*

Gambar 4.19 yang diunggah oleh akun X @DFighter_ memperlihatkan sebuah potongan video yang sangat menggugah, menampilkan dua individu yang tengah berpelukan erat dalam suasana penuh emosi, dengan latar belakang yang tampak seperti area kampus atau ruang publik. Teks overlay berwarna kuning yang menyertai gambar tersebut menyampaikan sebuah pesan penting mengenai dampak nyata dari solidaritas digital di ranah akademik, yakni keputusan sejumlah universitas

di Spanyol untuk memutus hubungan akademik dan institusional mereka dengan Israel sebagai respons langsung terhadap protes mahasiswa yang menggema di kampus-kampus tersebut.

Peristiwa ini menggambarkan bagaimana solidaritas digital *#FreePalestine* tidak hanya berdiam di dunia maya, tetapi juga menjadi katalisator bagi gerakan sosial dan politik yang lebih terstruktur dan terorganisir. Gerakan-organik yang dimotori oleh para mahasiswa dan individu secara spontan menyuarakan dukungan dan aksi nyata melalui unjuk rasa dan protes di berbagai kampus, yang kemudian beresonansi hingga menimbulkan tindakan resmi dari institusi pendidikan. Pada saat yang sama, gerakan terorganisir yang melibatkan lembaga-lembaga pendukung, aktivis, serta jaringan sosial yang lebih formal memberikan dukungan strategis dan koordinasi yang memperkuat efek gerakan tersebut, menghubungkan solidaritas digital dengan langkah-langkah kebijakan institusional. Interaksi antara kedua bentuk gerakan ini yang spontan dan yang terstruktur, menunjukkan kompleksitas solidaritas digital sebagai praktik sosial kolektif yang efektif dalam menyuarakan suara kemanusiaan sekaligus menggerakkan perubahan nyata di tingkat global maupun lokal. Fenomena ini menegaskan bahwa media sosial X tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekspresi emosi dan dukungan, tetapi juga sebagai arena politik dan sosial di mana solidaritas dapat diwujudkan dalam tindakan konkret yang berdampak luas.

2. Peran Komunitas Digital Dan Aktor-Aktor Kunci

Dalam dinamika solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X, komunitas-komunitas digital memainkan peran sentral sebagai motor penggerak penyebaran pesan dan mobilisasi dukungan. Berbagai komunitas yang memiliki identitas dan tujuan spesifik, seperti gerakan boikot produk yang terkait dengan Israel, komunitas hijrah yang memiliki basis pengikut yang solid, serta para pengguna dengan jumlah follower yang besar atau influencer, bersama-sama membentuk jejaring solidaritas yang saling memperkuat. Komunitas-komunitas ini tidak hanya berperan sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai wahana dialog dan koordinasi yang

memperkuat narasi kolektif solidaritas, sekaligus menjembatani berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye digital.

Aktor-aktor tersebut memanfaatkan strategi komunikasi yang beragam, mulai dari unggahan informatif, kampanye tagar, hingga aksi offline yang terintegrasi dengan aktivitas online, sehingga pesan solidaritas dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Keberadaan komunitas-komunitas ini memperlihatkan bagaimana solidaritas digital bukan sekadar fenomena individual, melainkan merupakan hasil kolaborasi sosial yang terorganisir dan berkelanjutan. Dengan demikian, jejaring komunitas digital ini membentuk ruang sosial baru yang memungkinkan terbangunnya solidaritas transnasional yang kuat, sekaligus memperlihatkan potensi media sosial X sebagai arena praktik sosial kolektif yang dinamis dalam konteks konflik internasional yang kompleks.



Gambar 4. 20 Sumber: Akun X @UusRsd

Gambar 4.20 yang diunggah oleh akun X @UusRsd menangkap momen aksi massa yang sangat besar di Bandung, Indonesia, dengan latar belakang ikon kota Gedung Sate yang dikenal luas sebagai simbol kebanggaan masyarakat setempat. Ribuan orang berkumpul membawa bendera Palestina dan berbagai spanduk solidaritas, menandai tingginya antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dalam video tersebut, tokoh publik yang dikenal luas, Kang Aher (Ahmad

Heryawan), tampak berorasi di atas panggung, menyampaikan pidato yang membakar semangat massa. Momentum aksi ini merupakan bagian dari gelombang #AksiBelaPalestina yang telah menyebar ke berbagai kota di Indonesia, memperlihatkan bagaimana solidaritas digital yang berkembang di media sosial X bertransformasi menjadi praktik sosial kolektif yang nyata di ruang publik.

Fenomena ini mengilustrasikan peran penting komunitas digital dan aktor-aktor kunci dalam menggerakkan solidaritas, di mana influencer, tokoh publik, dan organisasi masyarakat berperan sebagai motor penggerak sekaligus simbol legitimasi gerakan. Komunitas-komunitas digital, mulai dari kelompok boikot hingga komunitas keagamaan dan aktivis sosial, membangun jejaring yang kuat untuk menyebarluaskan pesan solidaritas melalui kampanye digital yang terkoordinasi.

Peran tokoh seperti Kang Aher tidak hanya sebagai figur publik, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan ruang digital dan fisik, menguatkan ikatan sosial antar peserta aksi dan meningkatkan daya jangkauan gerakan. Interaksi antara komunitas digital dan aktor kunci ini menciptakan sinergi yang memperkuat narasi solidaritas, sekaligus menjadikan media sosial X sebagai ruang strategis untuk praktik sosial kolektif yang dapat menimbulkan dampak nyata di masyarakat. Dengan demikian, solidaritas digital #FreePalestine tidak sekadar menjadi ungkapan dukungan virtual, melainkan sebuah gerakan sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam bentuk aksi kolektif yang berdimensi luas dan berkelanjutan.

3. Perilaku Partisipatif: Like, Share, dan Kampanye Donasi

Dalam praktik solidaritas digital #FreePalestine di media sosial X, perilaku partisipatif pengguna tidak hanya sebatas menyuarakan dukungan melalui narasi atau wacana semata, melainkan diwujudkan dalam berbagai tindakan digital yang nyata dan terukur. Bentuk solidaritas tersebut mencakup aktivitas seperti membagikan link donasi untuk membantu korban konflik, berpartisipasi aktif dalam kampanye-kampanye strategis

seperti #Buycut yang mengajak boikot produk tertentu, serta secara konsisten menyebarluaskan informasi terkini yang relevan dengan situasi di Palestina. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa solidaritas di ranah digital bertransformasi menjadi partisipasi politik digital yang memiliki dampak sosial luas. Melalui like, share, dan retweet, pengguna media sosial berperan sebagai agen penyebaran pesan solidaritas yang efektif, sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai isu kemanusiaan yang tengah berlangsung.

Partisipasi digital ini bukan hanya sekadar bentuk dukungan simbolik, melainkan juga bagian dari upaya kolektif untuk mempengaruhi opini publik, menggalang sumber daya, dan memperkuat tekanan sosial terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Dengan demikian, solidaritas digital menjadi ruang praktik sosial yang dinamis, di mana setiap interaksi digital menjadi bagian dari jaringan aksi sosial yang lebih besar dan bermakna dalam konteks konflik Hamas dan Israel 2023-2024.

Dalam konteks solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X, temuan data menunjukkan bahwa perilaku partisipatif pengguna menjadi salah satu elemen kunci yang merefleksikan bentuk dukungan tidak hanya secara simbolik tetapi juga dalam tindakan nyata yang berdampak sosial. Data yang diperoleh dari pengamatan dan analisis terhadap ribuan cuitan, retweet, serta aktivitas berbagi konten donasi memperlihatkan bahwa pengguna aktif memanfaatkan fitur interaktif di media sosial sebagai sarana partisipasi politik digital yang efektif dan massif.

Aktivitas like dan share menjadi indikator utama keterlibatan pengguna dalam menyebarkan narasi solidaritas. Banyak cuitan yang mengandung tagar *#FreePalestine*, *#AksiBelaPalestina*, dan berbagai kampanye boikot produk Israel mendapatkan respons yang tinggi dalam bentuk like dan share, menandakan adanya resonansi emosional dan kesadaran politik yang kuat di kalangan warganet Indonesia. Misalnya, sebuah postingan dari akun aktivis yang membagikan data korban konflik atau narasi perjuangan rakyat Palestina kerap mendapatkan ribuan like dan

ratusan share dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga aktif memperluas jangkauan pesan solidaritas kepada jaringan sosialnya.

Partisipasi pengguna tidak terbatas pada reaksi digital sederhana, melainkan juga melibatkan tindakan yang lebih konkrit seperti kampanye donasi. Banyak akun yang secara rutin membagikan tautan atau informasi tentang penggalangan dana untuk membantu warga Palestina yang terdampak perang, seperti kebutuhan medis, makanan, atau perlindungan bagi anak-anak dan keluarga korban. Kampanye donasi ini kerap dilengkapi dengan bukti transparansi dan update perkembangan pengumpulan dana, yang membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan lebih banyak pengguna. Dalam beberapa kasus, donasi digital ini bahkan dipicu oleh influencer dan tokoh masyarakat yang menggunakan basis pengikutnya untuk menggalang dana dalam jumlah besar. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana solidaritas digital tidak hanya menjadi ruang ekspresi empati, tetapi juga memunculkan aksi sosial kolektif yang konkret dan berdampak langsung.

Pengguna media sosial juga menginisiasi dan menyebarkan kampanye boikot produk-produk yang terkait dengan Israel melalui tagar seperti #Boycut. Kampanye ini merupakan bentuk aksi politik ekonomi digital yang menggunakan kekuatan konsumen untuk memberi tekanan sosial dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa banyak pengguna membagikan daftar produk atau merek yang dipandang mendukung kebijakan Israel, lengkap dengan alasan dan ajakan untuk tidak membeli produk tersebut. Partisipasi dalam kampanye ini tidak hanya berupa share, tetapi juga testimoni pengguna yang menggambarkan keputusan mereka untuk tidak menggunakan produk tersebut sebagai bentuk solidaritas.

Interaksi antara pengguna individu, influencer, komunitas keagamaan, dan NGO menciptakan ekosistem solidaritas yang dinamis, di mana pesan-pesan kemanusiaan dan politik saling bertautan dalam praktik sosial kolektif. Aktivitas like, share, dan kampanye donasi ini menjadi

manifestasi nyata dari solidaritas digital yang menjembatani ruang virtual dan realitas sosial. Perilaku partisipatif ini juga menunjukkan adanya partisipasi politik digital yang khas di era media sosial, di mana pengguna bukan hanya sekadar memberi dukungan simbolik, tetapi juga mengambil peran sebagai agen perubahan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan dampak solidaritas.

Terdapat tantangan dalam perilaku partisipatif ini, yaitu risiko disinformasi yang tersebar melalui sharing tanpa verifikasi, atau tekanan sosial yang kadang mengarah pada polarisasi di antara pengguna. Meski begitu, mayoritas partisipasi tetap didominasi oleh niat baik dan upaya kolektif yang positif untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan. Hasil temuan ini menegaskan bahwa perilaku partisipatif di media sosial X dalam konteks solidaritas digital *#FreePalestine* merupakan bagian dari praktik sosial kolektif yang kompleks dan bermakna.

B. Pembentukan Identitas Politik Digital

1. Identitas Keagamaan, Nasionalisme, Dan Kemanusiaan

Pembentukan identitas politik digital dalam konteks solidaritas *#FreePalestine* di media sosial X tidak lepas dari konstruksi identitas yang berlapis dan saling terkait, terutama di ranah keagamaan, nasionalisme, dan kemanusiaan. Ketiga dimensi ini menjadi kerangka utama bagi warganet Indonesia dalam mengekspresikan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina, sekaligus menegaskan posisi politik dan moral dalam konflik yang kompleks ini. Identitas keagamaan sering kali menjadi fondasi kuat yang menggerakkan solidaritas, mengingat latar belakang mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim dan afiliasi historis dengan umat Muslim Palestina. Di sisi lain, identitas nasionalisme juga muncul sebagai narasi yang memperkuat solidaritas dengan menegaskan nilai-nilai persatuan dan kedaulatan bangsa yang tidak hanya berfokus pada internal negeri, tetapi juga mendukung rakyat tertindas secara global. Terakhir, identitas kemanusiaan memberikan dimensi universal yang menempatkan penderitaan dan hak asasi manusia sebagai titik fokus solidaritas tanpa

batasan agama atau etnis. Dalam praktiknya, ketiga identitas ini saling melengkapi dan terkadang berinteraksi secara dinamis, membentuk narasi politik digital yang kompleks dan multidimensi.

Analisis data dari ribuan cuitan, komentar, dan konten multimedia di media sosial X selama periode konflik Hamas dan Israel 2023-2024 mengungkap pola konstruksi identitas yang kuat dan beragam. Pertama, identitas keagamaan sangat dominan dalam narasi solidaritas *#FreePalestine*. Banyak pengguna yang menggunakan kutipan tokoh agama sebagai landasan moral dan motivasi berjuang.



Gambar 4. 21 Sumber: Akun X @numanmazlan

“Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia mengeluarkan fatwa menyeru umat islam, baik rakyat mahupun kerajaan, untuk berjihad dengan senjata dan harta menentang penjajag Zionis di Palestina”

Dalam cuitan tersebut menjadi viral dan mendapat ribuan like serta retweet. Penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti kaligrafi Arab atau gambar ulama memakai jubah putih berdiri diatas mimbar juga sering muncul sebagai bagian dari identitas visual digital solidaritas.

Identitas nasionalisme muncul dengan kuat melalui narasi yang menekankan peran Indonesia sebagai negara besar yang harus berdiri teguh memperjuangkan keadilan internasional. Banyak warganet mengutip semangat “Bhinneka Tunggal Ika” dan nilai kemerdekaan Indonesia dalam konteks mendukung kemerdekaan Palestina.



Gambar 4. 22 Sumber: Akun X @bonnietriyana

“...dan untuk Israel, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel” Bung Karno
#FreePalestine

Narasi semacam ini mendapat sambutan hangat dari berbagai lapisan masyarakat, yang menegaskan bahwa solidaritas bukan hanya urusan agama, tapi juga kewajiban nasional. Terdapat juga cuitan yang menyandingkan foto pahlawan kemerdekaan Indonesia dengan bendera Palestina, sebagai simbol penghubung sejarah dan perjuangan.

Dimensi ketiga, identitas kemanusiaan, muncul dalam bentuk narasi yang mengutamakan penderitaan warga sipil yang terdampak konflik, termasuk anak-anak, wanita, dan kelompok rentan. Banyak pengguna membagikan kisah-kisah kemanusiaan disertai ajakan untuk menanggapi dengan aksi nyata, seperti donasi atau kampanye kesadaran.



Gambar 4. 23 Sumber: Akun X @jasukegf5

“Bukan soal agama tapi kemanusiaan. Jangan buta dan tuli jiwa2 tak bersalah telah pergi dan bayi2 suci harus mengalami hal tragis sebelum

bisa merasakan kenikmatan kasih sayang dan melihat dunia ini”
#FreePalestine

Cuitan ini mendapat respons luas dari kalangan yang lebih heterogen dan menjadi jembatan bagi kelompok yang mungkin tidak terikat secara kuat dengan identitas keagamaan atau nasionalisme.

Konsep Identitas Sosial dari Ali (2019), menyatakan bahwa identitas sosial dibentuk berdasarkan afiliasi kelompok yang memberikan individu rasa kebersamaan dan makna. Dalam konteks *#FreePalestine*, pengguna media sosial membentuk identitas kolektif yang terangkai dari nilai keagamaan, rasa kebangsaan, dan kemanusiaan yang memperkuat kohesi kelompok pendukung. Identitas ini sekaligus berfungsi sebagai batas sosial yang membedakan “kami” sebagai pendukung Palestina dari “mereka” yang dianggap oposisi, seperti pendukung Israel atau kelompok yang bersikap netral.

Teori Framing oleh Entman (2002), membantu memahami bagaimana narasi keagamaan, nasionalisme, dan kemanusiaan diolah dan disajikan di media sosial sehingga membentuk perspektif yang memandu interpretasi pengguna. Misalnya, frame keagamaan memberikan makna suci dan kewajiban moral untuk solidaritas, frame nasionalisme menekankan patriotisme dan sejarah perjuangan bangsa sebagai alasan dukungan, sedangkan frame kemanusiaan menggarisbawahi universalitas penderitaan dan hak asasi. Ketiga frame ini secara bersamaan berkompetisi dan berkolaborasi dalam membentuk persepsi dan respon pengguna.

Dalam perspektif Teori Identitas Digital oleh Hilmi (2016), media sosial sebagai platform digital memungkinkan individu untuk menampilkan dan mengelola identitas yang diinginkan. Dalam hal ini, pengguna memanfaatkan fitur-fitur seperti unggahan gambar, video, tagar, dan interaksi publik untuk membangun citra solidaritas mereka yang berakar pada nilai-nilai agama, bangsa, dan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa identitas politik digital tidak hanya bersifat naratif, tapi juga performatif dan visual.

Teori Konstruksi Sosial Realitas oleh Romdani (2021), menjelaskan bagaimana makna-makna yang muncul di media sosial tidak sekadar refleksi realitas, tapi juga diproduksi secara sosial melalui interaksi berkelanjutan antara pengguna. Proses negosiasi makna ini terlihat jelas dalam dialog komentar, repost, dan konten yang saling menanggapi. Identitas keagamaan, nasionalisme, dan kemanusiaan dalam solidaritas digital bukan hal yang statis, melainkan terus dibentuk dan dipertajam melalui praktek komunikasi kolektif di platform X.

Ketiga identitas ini saling memperkuat dan membentuk kohesi kelompok pendukung, sekaligus membatasi ruang identitas lawan. Pemahaman mendalam tentang konstruksi ini penting untuk mengkaji bagaimana solidaritas digital berfungsi tidak hanya sebagai ekspresi empati, tetapi juga sebagai arena politik identitas yang memiliki implikasi sosial dan kultural yang luas di masyarakat Indonesia.

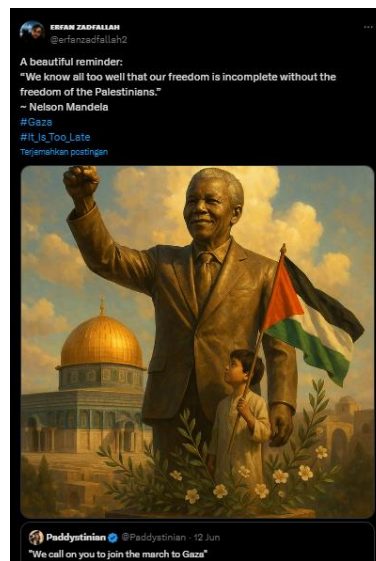
2. Proyeksi Nilai-Nilai Ideologis Dalam Wacana

Proyeksi nilai-nilai ideologis menjadi fondasi utama dalam pembentukan identitas politik digital di media sosial X, khususnya dalam konteks solidaritas *#FreePalestine*. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk kerangka normatif yang mengarahkan sikap dan tindakan para pengguna, tetapi juga menjadi bahan bakar bagi mobilisasi sosial dan politisasi wacana di ranah digital. Dalam wacana yang berkembang, nilai-nilai ideologis tersebut sering kali mengandung unsur keagamaan, kemanusiaan universal, anti-kolonialisme, serta nasionalisme yang bercampur menjadi narasi yang berlapis dan dinamis. Nilai-nilai ini kemudian diproyeksikan secara aktif melalui teks, gambar, video, dan interaksi sosial digital yang menghidupkan narasi solidaritas, sekaligus mengukuhkan identitas kelompok dalam pertarungan simbolik di ruang maya.

Dalam pengamatan terhadap konten yang diproduksi dan disebarakan oleh pengguna media sosial X selama periode konflik Hamas-Israel 2023-2024, ditemukan bahwa proyeksi nilai-nilai ideologis sangat dominan dalam bentuk narasi dan simbol digital. Pengguna secara aktif mengunggah

kutipan, meme, poster, dan video yang sarat dengan pesan ideologis yang berkaitan dengan konsep keadilan, pembebasan, dan anti-penindasan.

Salah satu nilai yang paling menonjol adalah nilai keadilan sosial dan pembebasan dari penjajahan. Banyak cuitan yang secara eksplisit mengutip pernyataan tokoh pembebasan dunia, seperti Nelson Mandela, atau para ulama dan aktivis Palestina, sebagai legitimasi ideologis untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.



Gambar 4. 24 Sumber: Akun X @efranzadfallah2

“Seperti kata Mandela, ‘Ketidakadilan di mana saja adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana.’ Palestina adalah simbol perlawanan terhadap penindasan global. *#FreePalestine*”

Selain itu, nilai anti-kolonialisme juga sering diangkat sebagai kerangka ideologis untuk mengkritik tindakan militer Israel dan dukungan negara-negara Barat terhadapnya. Dalam berbagai konten, narasi penjajahan modern digambarkan melalui analogi sejarah kolonialisme yang dialami Indonesia dan negara-negara lain, yang secara emosional menghubungkan pengalaman penderitaan tersebut dengan perjuangan Palestina. Narasi ini tidak hanya menguatkan identitas solidaritas sebagai “perlawanan bersama”, tetapi juga memproyeksikan cita-cita kebebasan dan kedaulatan bangsa sebagai nilai universal.

Nilai keagamaan melekat kuat dalam proyeksi ideologis ini. Banyak konten mengangkat konsep jihad, ukhuwah Islamiyah, dan tanggung jawab

moral umat Islam untuk membantu sesama. Misalnya, cuitan dengan kutipan hadis yang menegaskan kewajiban menolong kaum tertindas, atau unggahan doa bersama yang menguatkan solidaritas spiritual. Ini menandakan bahwa nilai-nilai keagamaan bukan hanya aspek ritual, melainkan juga ideologi yang menggerakkan solidaritas politik.

Beberapa pengguna mencoba melampaui sekat ideologi keagamaan dan politik dengan menonjolkan narasi kemanusiaan yang menekankan perlindungan terhadap warga sipil, anak-anak, dan perempuan yang menjadi korban konflik. Proyeksi nilai ini menyajikan wacana yang lebih inklusif dan menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk yang mungkin kurang terikat pada identitas keagamaan atau nasionalisme tertentu.

Menurut Entman, framing ideologis berfungsi untuk memilih dan menonjolkan beberapa aspek realitas, sekaligus mengecilkan aspek lain, dengan tujuan mengarahkan interpretasi dan respons publik sesuai dengan nilai dan kepentingan ideologis tertentu. Dalam konteks *#FreePalestine*, frame keadilan, anti-kolonialisme, keagamaan, dan kemanusiaan dipilih dan diperkuat untuk membentuk narasi yang memobilisasi solidaritas, sekaligus menegaskan identitas politik digital pendukung.

Konsep Politik Identitas dari Amsar A. Dulmanan (2020) menjelaskan bagaimana nilai-nilai ideologis ini menjadi bagian penting dari identitas kolektif di dunia digital. Nilai-nilai tersebut tidak sekadar dijadikan prinsip moral, tetapi juga sumber legitimasi politik yang memperkuat perasaan belonging dan perlawanan terhadap lawan. Identitas yang dibangun melalui nilai-nilai ini menjadi landasan penting bagi interaksi sosial dan solidaritas kelompok.

Dalam kerangka Teori Representasi Sosial oleh Giawa & Nurrachman (2018), nilai-nilai ideologis tersebut dipahami sebagai sistem makna yang diproduksi dan direproduksi dalam komunikasi sosial digital. Media sosial X menjadi arena di mana representasi nilai-nilai tersebut tersebar, dikonstruksi ulang, dan diterima oleh komunitas, sehingga

membentuk kesadaran kolektif yang mengarahkan sikap dan tindakan politis.

Pendekatan Analisis Wacana Kritis Fairclough (1995), menunjukkan bahwa nilai-nilai ideologis dalam solidaritas *#FreePalestine* tidak lepas dari relasi kekuasaan dan dominasi simbolik. Narasi yang menonjolkan keadilan dan anti-kolonialisme sekaligus mengkritik tindakan Israel dan negara-negara pendukungnya, menciptakan ruang perlawanan simbolik yang menantang hegemoni wacana dominan internasional. Ini menandakan bahwa solidaritas digital bukan hanya ekspresi empati, tapi juga strategi politik yang berperan dalam konflik simbolik global.

Proyeksi nilai-nilai ideologis dalam wacana solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X membentuk pondasi penting bagi pembentukan identitas politik digital. Nilai-nilai keadilan sosial, anti-kolonialisme, keagamaan, dan kemanusiaan universal saling berinteraksi secara dinamis dalam membentuk narasi yang menggerakkan solidaritas dan memobilisasi aksi kolektif.

3. Identifikasi Versus Diferensiasi

Pembentukan identitas politik digital dalam konteks solidaritas *#FreePalestine* sangat bergantung pada proses identifikasi dan diferensiasi sosial yang terjadi di ruang media sosial X. Proses ini melibatkan konstruk simbolik mengenai siapa yang dianggap sebagai bagian dari "kita" komunitas solidaritas, pendukung Palestina, serta mereka yang berbagi nilai dan tujuan perjuangan dan siapa yang dipersepsikan sebagai "mereka" pihak lawan, penentang, atau bahkan netral yang dianggap tidak sejalan atau bahkan menghalangi solidaritas. Konsep identifikasi dan diferensiasi ini penting dalam teori komunikasi politik dan sosiologi identitas, karena membentuk batas sosial dan psikologis yang menentukan inklusi dan eksklusi dalam ruang wacana digital.

Analisis data dari ribuan cuitan, retweet, serta komentar pada akun-akun yang berpartisipasi dalam wacana *#FreePalestine* memperlihatkan pola yang jelas dalam konstruksi identitas “kita” versus “mereka”. Di satu

sisi, kelompok yang mendukung Palestina secara konsisten menggunakan kata ganti “kami” dan “kita” untuk membangun rasa persatuan dan solidaritas bersama, baik secara agama, kemanusiaan, maupun nasionalisme. Misalnya, banyak cuitan yang menyebut “Kita berdiri bersama rakyat Palestina”, “Solidaritas kita adalah kekuatan mereka”, atau “Sebagai umat yang peduli, kita harus bersatu.” Pilihan kata ini memperkuat rasa belonging dan identifikasi kolektif.

Sebaliknya, “mereka” dirumuskan dalam berbagai narasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penderitaan Palestina, mulai dari pemerintah Israel, pendukungnya, hingga kelompok yang dianggap menghalangi atau melemahkan solidaritas. Narasi ini terkadang menyertakan label negatif, seperti “penjajah”, “musuh kemanusiaan”, “zionis”, atau bahkan “pengkhianat” bagi warganet yang memilih netral atau mengkritik solidaritas.



Gambar 4. 25 Sumber: Akun X @Hilmi28

“penjajah itu harus diusir, bukan diajak kompromi.” *#FreePalestine*



Gambar 4. 26 Sumber: Akun X @neohistoria_id

“Bersikap netral terhadap kejahatan adalah keberpihakan terhadap kejahatan.”

Selain itu, diferensiasi juga terjadi dalam bentuk kritik terhadap kelompok tertentu yang dianggap kurang serius atau dangkal dalam solidaritasnya, seperti influencer yang hanya sekedar “ikut tren” tanpa aksi nyata. Wacana ini menegaskan adanya hierarki keanggotaan dalam kelompok “kita”, di mana loyalitas dan komitmen diuji.

Proses identifikasi dan diferensiasi ini tidak hanya muncul secara verbal tetapi juga dalam simbol dan praktik digital, misalnya melalui penggunaan hashtag seperti *#FreePalestine*, *#BoikotIsrael*, yang menjadi tanda pengenal kelompok, sedangkan mereka yang menggunakan hashtag pro-Israel atau tidak menggunakan hashtag sama sekali sering dipersepsikan sebagai “mereka”.

Proses pembentukan identitas “kita” dan “mereka” dalam wacana digital dijelaskan oleh teori Social Identity Theory Dewi et al. (2020), bahwa individu cenderung mengkategorikan diri dan orang lain ke dalam kelompok sosial yang berbeda, membentuk identitas sosial yang berkontribusi pada rasa belonging. Dalam konteks *#FreePalestine* di media sosial X, proses kategorisasi ini sangat jelas, di mana kelompok pendukung mengonstruksi identitas kolektif sebagai “in-group” yang solid, sementara yang lain diklasifikasikan sebagai “out-group” yang berseberangan atau antagonis. Identifikasi kelompok ini tidak hanya meningkatkan solidaritas internal tetapi juga memperkuat pembeda sosial yang memunculkan konflik simbolik.

Othering adalah proses di mana kelompok tertentu secara konstruktif dibedakan dan diperlakukan sebagai “yang lain”, seringkali dengan konotasi negatif, untuk memperkuat identitas kelompok sendiri. Dalam wacana *#FreePalestine*, Othering tampak jelas pada bagaimana “mereka” baik pemerintah Israel, pendukungnya, maupun netral dijadikan sasaran kritik keras, diposisikan sebagai antagonis moral dan politik yang harus dilawan. Proses Othering ini membentuk batas-batas identitas politik

digital yang tajam, sekaligus memperkuat polarisasi wacana di ranah sosial media.

Dari perspektif Teori Framing (Entman 2002), pembedaan (framing) identitas “kita” versus “mereka” berfungsi sebagai alat strategis untuk mengarahkan persepsi dan sikap pengguna. Frame solidaritas menonjolkan nilai-nilai moral dan emosional yang menguatkan identifikasi dengan “kita”, sementara frame delegitimasi lawan membangun perbedaan yang memperkuat konflik simbolik. Hal ini juga berimplikasi pada cara pengguna memproses informasi dan memilih untuk ikut dalam aksi solidaritas atau menolak narasi yang berlawanan.

Proses identifikasi versus diferensiasi dalam wacana solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X adalah mekanisme fundamental dalam pembentukan identitas politik digital. Melalui proses ini, kelompok pendukung membangun batas sosial yang jelas antara “kita” dan “mereka”, yang mengokohkan solidaritas internal sekaligus mempertegas oposisi terhadap lawan politik.

C. Polarisasi dan Fragmentasi Opini Publik

1. Kontestasi Wacana

Dalam media sosial X, wacana solidaritas *#FreePalestine* memperlihatkan kontestasi yang dinamis dan kompleks antara ekspresi empati yang meluap-luap dengan suara pragmatisme yang kritis. Empati terhadap penderitaan rakyat Palestina direpresentasikan melalui ujaran dukungan moral, kemarahan atas ketidakadilan, dan seruan aksi kolektif. Namun, di sisi lain, terdapat narasi pragmatiss yang mempertanyakan dampak nyata dari kampanye digital seperti boikot produk Israel, viralnya hashtag, dan retorika kemarahan yang lebih banyak berujung pada sensasi daripada perubahan substansial. Kontestasi ini menimbulkan fragmentasi opini publik di antara pendukung solidaritas yang pada dasarnya satu visi, namun berbeda dalam pendekatan dan harapan terhadap efektivitas aksi digital.

Data dari ribuan cuitan, balasan, dan thread diskusi pada topik *#FreePalestine* memperlihatkan dualitas wacana yang sangat jelas. Di satu sisi, mayoritas pengguna mengekspresikan empati mendalam melalui narasi emosional dan solidaritas moral.



Gambar 4. 27 Sumber: Akun X @lilaccountz

“Teman teman komun yang baik, aku minta tolong banget untuk bantu doain Palestina ya....”

“Bener2 nangis liat berita hari ini, Israel nyerang Palestina lagi.. gencatan senjata berakhir... bayi dan anak2 meninggal.... sudah 300+ yang wafat...”

“Tolong bantu doa ya teman teman...”



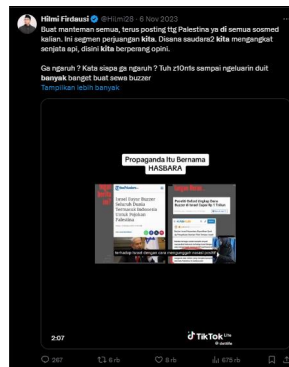
Gambar 4. 28 Sumber: Akun X @ARIBPalestina

“Ini tugas kita, kalau kita menutup mata, siapa yang menyerukan kemerdekaan palestina?”

“Pemerintah harus lebih keras di dalam hal ini menyampaikan bukan hanya protes tapi bagaimana mendukung bangsa”

Narasi ini menegaskan bahwa solidaritas digital adalah bentuk empati kolektif yang kuat, di mana tindakan simbolis seperti menyebarkan hashtag, mengunggah poster digital, dan mengikuti kampanye donasi adalah wujud nyata keprihatinan dan aksi sosial. Namun, di sisi lain, muncul suara-

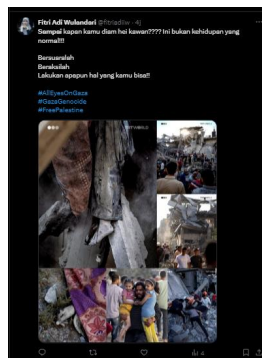
suara pragmatis yang skeptis terhadap efektivitas kampanye ini. Beberapa pengguna mengkritik bahwa boikot produk Israel di ranah digital seringkali bersifat simbolik tanpa dampak ekonomi yang signifikan, dan retorika kemarahan di media sosial hanya menciptakan sensasi sesaat tanpa perubahan nyata di lapangan.



Gambar 4. 29 Sumber: Akun X @Hilmi28

“Buat menteman semua, terus posting ttg palestina ya di semua sosmed kalian. Ini segmen perjuangan kita. Disana saudara2 kita mengangkat senjata api, disini kita berperang opini”

“Ga ngaruh? Kata siapa ga ngaruh ? Itu zlonis sampai ngeluarin duit banyak banget buat sewa buzzer”



Gambar 4. 30 Sumber: Akun X @fitriadiiw

“Sampai kapan kamu diam hei kawan??? Ini bukan kehidupan yang normal???”

“Bersuaralah”

“Beraksilah, Lakukan apapun hal yang kamu bisa!?”

Debat antara ekspresi empati dan pragmatisme ini seringkali terjadi dalam bentuk diskusi yang sengit di kolom komentar, di mana pengguna saling menguji batas antara perasaan moral dan strategi efektif. Hal ini juga

menimbulkan polarisasi dalam kelompok pendukung, memecah dukungan menjadi aliran yang lebih emosional dan aliran yang lebih rasional-kritis.

Fenomena kontestasi wacana antara empati dan pragmatisme ini dapat dianalisis menggunakan kerangka teori Public Sphere dari Habermas (2010), yang menekankan pentingnya ruang diskusi publik untuk membentuk opini yang rasional dan kritis. Dalam konteks media sosial X, ruang publik digital ini menjadi arena perdebatan antara narasi emosional dan wacana rasional. Ekspresi empati mewakili dimensi afektif dan solidaritas moral, sedangkan suara pragmatisme menuntut refleksi kritis atas efektivitas dan tujuan aksi politik digital. Kontestasi ini mencerminkan kualitas ruang publik yang terbuka sekaligus penuh ketegangan.

Teori Emotional Publics Fay (1967), relevan dalam memahami bagaimana emosi, terutama empati dan kemarahan, menjadi bahan bakar utama dalam pembentukan opini dan aksi kolektif di media sosial. Solidaritas digital *#FreePalestine* membangkitkan resonansi emosional yang kuat, memobilisasi dukungan melalui narasi penderitaan dan ketidakadilan yang intens. Namun, konsekuensi dari dominasi emosi ini juga berpotensi menimbulkan tindakan impulsif dan kurangnya evaluasi kritis, sehingga muncul kebutuhan suara pragmatisme sebagai penyeimbang agar aksi tidak hanya berujung pada performansi semata.

2. Dinamika Perdebatan

Fenomena digital yang terjadi dalam perdebatan *#FreePalestine* di platform X menunjukkan intensitas konflik yang tidak hanya terbatas pada perbedaan pendapat, tetapi juga meluas ke praktik-praktik agresif seperti cancel culture, persaingan tagar (trending wars), dan dugaan shadow banning terhadap akun-akun tertentu. Cancel culture, sebagai praktik memboikot atau melaporkan akun yang dianggap menyebarkan narasi kontra, menjadi senjata strategis dalam persaingan ideologis digital. Sementara itu, trending wars antar tagar memperlihatkan usaha para aktor digital untuk mendominasi ruang publik dengan agenda mereka masing-masing. Di sisi lain, keluhan pengguna tentang penurunan jangkauan akun-

akun pro-Palestina yang diduga shadow banned menunjukkan adanya kontrol algoritmik yang kompleks dan kontroversial yang menambah lapisan baru dalam konflik wacana digital.

Dari analisis ribuan cuitan dan balasan di X, ditemukan pola berulang terkait praktik cancel culture yang memengaruhi kelompok pro-Palestina maupun pro-Israel. Beberapa akun pro-Palestina melaporkan mengalami penutupan sementara (suspensi) atau pengurangan fitur interaksi setelah mendapat serangan laporan massal oleh kelompok lawan. Misalnya, sejumlah pengguna mengunggah tangkapan layar (screenshot) notifikasi pemblokiran akun atau pengurangan visibilitas postingan yang mereka keluhkan sebagai bentuk censor algoritmik.



Gambar 4. 31 Sumber: Akun X @AnggiCartwheel

“Beneran sudah jadi negara gila deh kalo X ini kedepan bakal diblokir kominfo, dari semua platform cuman disini yang termasuk bisa bebas bersuara buat Palestine walaupun kadang2 ada postingan yang dibatasi jangkauannya.”

Di sisi lain, terjadi fenomena trending wars antara tagar *#FreePalestine* dengan tagar tandingan seperti *#SupportIsrael* atau *#IsraelUnderAttack* yang saling berebut posisi trending topics. Perang tagar ini tidak hanya soal popularitas, tapi juga soal narasi dominan yang ingin disebarluaskan ke khalayak luas. Strategi penggunaan tagar yang masif dan terkoordinasi dari kedua kubu memperlihatkan persaingan sengit dalam membentuk opini publik.

Keluhan mengenai shadow banning juga banyak beredar. Shadow banning merujuk pada praktik tersembunyi dimana akun atau postingan tertentu tidak dihapus secara langsung, tetapi visibilitasnya sangat dibatasi sehingga sulit dijangkau oleh pengguna lain. Beberapa pengguna pro-

Palestina menyatakan bahwa jangkauan cuitan mereka menurun drastis tanpa ada pemberitahuan resmi. Dalam diskusi, mereka menyebut ini sebagai bentuk sensor algoritmik yang tidak transparan dan merugikan.



Gambar 4. 32 Sumber: Akun X @jek__

“udah tahu kan konsekuensi kalau kita nulis soal palestine itu negatif untuk akun kita. Ini:”
“-shadowban”
“-diputus ads revenue sharing untuk yang verified”
“-jangkauan akun dipersempit”
“-akun gak muncul di kolom pencarian”
“-akun gak direkomendasikan untuk user yang baru bikin akun X”

Fenomena cancel culture dalam konteks solidaritas digital *#FreePalestine* dapat dianalisis dengan teori Social Control Gloria et al. (2022), yang menyatakan bahwa tindakan pelaporan dan pemblokiran akun adalah mekanisme sosial untuk mengontrol dan menegakkan norma dalam komunitas digital. Cancel culture menjadi alat untuk menegaskan batas-batas wacana yang diterima, sekaligus membungkam suara-suara yang dianggap mengancam dominasi narasi tertentu. Dalam konteks ini, cancel culture mencerminkan bentuk kontrol sosial yang dipraktikkan secara kolektif oleh kelompok pendukung narasi mayoritas maupun minoritas, yang berujung pada konflik eskalatif di ranah digital.

Trending wars yang muncul memperlihatkan dinamika Agenda Setting Ritonga (2018) dan Framing Theory Entman (2002), Dalam persaingan tagar berfungsi sebagai strategi untuk menempatkan isu atau narasi tertentu di puncak perhatian publik (agenda setting), sekaligus mengatur bagaimana isu tersebut dipahami dan dipersepsikan (framing). Melalui tagar yang dipromosikan secara massif, kelompok-kelompok tersebut berusaha menciptakan realitas sosial yang mendukung kepentingan

mereka. Trending wars bukan hanya soal popularitas digital, tetapi juga perebutan hegemoni narasi di ruang publik.

Keluhan tentang shadow banning dianalisis dengan konsep Algorithmic Gatekeeping Sukandar (2023), yang menjelaskan bagaimana algoritma platform media sosial bertindak sebagai penjaga gerbang yang menentukan konten mana yang layak tampil atau disembunyikan. Shadow banning sebagai bentuk gatekeeping algoritmik mengandung unsur ketidaktransparanan yang menimbulkan ketidakadilan persepsi di antara pengguna. Hal ini mengundang kritik dari perspektif Digital Rights dan kebebasan berpendapat, di mana praktik-praktik tersebut berpotensi melemahkan demokrasi digital dengan membatasi pluralitas suara.

Dari perspektif Teori Konflik Sosial Ummah (2019), ketiga fenomena tersebut adalah manifestasi konflik struktural yang terjadi dalam masyarakat digital yang plural dan terfragmentasi. Cancel culture, trending wars, dan shadow banning bukan hanya peristiwa acak, tetapi bagian dari mekanisme perebutan kekuasaan simbolik dalam ranah digital yang mengatur siapa yang layak didengar dan siapa yang harus dibungkam. Konflik ini memperkuat polarisasi dan memperlebar jurang fragmentasi di antara kelompok dengan identitas dan ideologi berbeda.

Dinamika perdebatan dalam solidaritas digital *#FreePalestine* di media sosial X dipenuhi dengan praktik cancel culture, trending wars, dan dugaan shadow banning yang mempertegas polarisasi dan fragmentasi opini publik. Cancel culture menjadi alat kontrol sosial untuk membatasi narasi yang bertentangan, trending wars merupakan perebutan hegemoni agenda dan framing isu, sementara shadow banning menghadirkan kontroversi atas transparansi algoritma dan kebebasan berpendapat. Bersama-sama, ketiga fenomena ini menciptakan medan konflik digital yang semakin kompleks dan sulit dijembatani, sekaligus menantang konsep ruang publik demokratis dalam era media sosial.

3. Implikasi Sosial Dan Politik Dari Polarisasi Digital

Polarisasi digital yang terjadi dalam perdebatan *#FreePalestine* di media sosial X tidak hanya sekadar fenomena komunikasi daring yang bersifat temporer dan lokal, tetapi memiliki implikasi sosial dan politik yang sangat luas dan mendalam. Polarisasi ini menjadi cermin bagaimana isu global khususnya konflik yang sangat sensitif seperti antara Hamas dan Israel, secara langsung memengaruhi dinamika politik domestik di Indonesia. Pengaruh ini tampak pada ranah opini publik yang semakin terpecah, pada diskursus keagamaan yang terkadang meluas menjadi sentimen sektarian, serta pada sikap masyarakat terhadap kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia.

Analisis data cuitan, balasan, dan diskusi panjang di X memperlihatkan berbagai dimensi implikasi polarisasi digital ini. Banyak pengguna yang secara eksplisit mengaitkan konflik Palestina-Israel dengan agenda politik domestik Indonesia. Misalnya, ditemukan cuitan yang menuntut pemerintah agar mengambil sikap tegas dan pro-Palestina dalam kebijakan luar negeri, serta kritik terhadap pejabat atau partai politik yang dianggap terlalu netral atau bahkan cenderung mendukung Israel.

Diskursus keagamaan juga muncul sebagai salah satu ranah yang terdampak, dengan sebagian pengguna memanfaatkan narasi solidaritas untuk menguatkan identitas keagamaan mereka dan membangun solidaritas komunitas. Namun, di sisi lain, ada juga diskusi yang mulai memperlihatkan garis sektarian, misalnya retorika yang menggeneralisasi kelompok tertentu atau menggunakan bahasa yang mengandung unsur konfrontasi agama.



Gambar 4. 33 Sumber: Akun X @neohistoria_id

“Ah, kalian mendukung Palestina hanya karena kesamaan agama, bukan?”

“Faktanya perjuangan kemerdekaan Palestina juga mengikutsertakan elemen agama lain, seperti kristen, druze, bahkan yudaisme”

Selain itu, sikap masyarakat terhadap kebijakan luar negeri Indonesia semakin menjadi isu yang diperdebatkan secara terbuka di X. Beberapa pengguna menilai bahwa sikap pemerintah selama ini sudah cukup proaktif dan tegas dalam mendukung Palestina, sementara kelompok lain mengkritik kurangnya aksi nyata, dan ada pula yang mempertanyakan relevansi konflik global terhadap kepentingan nasional Indonesia.



Gambar 4. 34 Sumber: Akun X @salimafillah

“Indonesia berdiri bersama rakyat palestina, kita catat apa yang diulang dan ditekankan oleh Menlu. Hentikan penjajahan ilegal Israel”



Gambar 4. 35 Sumber: Akun X @neohistoria_id

“Iya, benar, dukung Israeli agar mengembalikan wilayah Palestina seperti sebelum tahun 1967”

“Kebijakan luar negeri Indonesia mengenai konflik di Palestina sudah jelas. Palestina harus merdeka tapi Israel tidak harus hilang dari peta. Solusi dua negara. Syaratnya Israel harus angkat kaki dari wilayah yang dicaplok mereka.”

Polarisasi di ranah opini publik ini mencerminkan fragmentasi sosial yang lebih luas, dimana warga net Indonesia terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang sangat berbeda pandangan, keyakinan, dan afiliasi politik, yang tercermin dalam wacana digital sehari-hari.

Fenomena polarisasi digital yang memengaruhi ranah sosial dan politik nasional ini dapat dianalisis menggunakan kerangka Politik Identitas Ali (2019), yang menjelaskan bagaimana identitas agama, etnis, dan ideologi menjadi faktor utama dalam pembentukan solidaritas dan konflik. Dalam konteks *#FreePalestine*, identitas keagamaan Islam sangat kuat sebagai landasan solidaritas, tetapi juga berpotensi menimbulkan eksklusivitas dan garis sektarian yang memperuncing polarisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa solidaritas digital bukan sekadar dukungan politis, tetapi juga ekspresi politik identitas yang dapat memperkuat ikatan kelompok sekaligus menimbulkan konflik horizontal.

Dari perspektif Teori Agenda Setting Ritonga (2018), media sosial X berperan penting dalam mengangkat isu konflik Palestina-Israel sebagai isu utama yang harus mendapat perhatian publik Indonesia. Melalui tagar *#FreePalestine* dan diskursus yang intens, pengguna platform mengarahkan perhatian publik kepada isu ini, yang kemudian berpengaruh pada cara masyarakat memandang kebijakan luar negeri Indonesia. Interaksi ini juga memperlihatkan fungsi Second Level Agenda Setting atau framing, dimana tidak hanya isu yang diangkat, tetapi bagaimana isu tersebut dibingkai sebagai isu kemanusiaan, agama, atau politik yang membentuk persepsi masyarakat.

Berdasarkan teori Social Cleavage oleh Sobari (2023) menjelaskan bahwa konflik global memperkuat garis pemisah dalam masyarakat Indonesia, baik berdasarkan agama, ideologi politik, maupun sikap terhadap kebijakan pemerintah. Polarisasi tersebut tidak hanya terjadi dalam ranah

online, tetapi juga berpotensi meluas ke ranah sosial nyata, menimbulkan fragmentasi komunitas dan konflik horizontal yang lebih nyata.

Konsep Digital Public Sphere oleh Habermas (2010) sebagaimana menjelaskan bagaimana media sosial X menjadi ruang perdebatan publik yang mempertemukan beragam suara dan perspektif, namun sekaligus memperlihatkan keterbatasan ruang tersebut dalam menjembatani perbedaan. Polarisasi di digital public sphere ini memunculkan “echo chambers” dan “filter bubbles”. Pariser (2011) yang menguatkan sikap dan pandangan yang homogen dalam kelompok, mempersempit dialog lintas kelompok, dan memperdalam fragmentasi sosial.

Implikasi politis dari polarisasi ini dipahami dengan menggunakan teori Politik Demokrasi Partisipatif Noor (2016) yang menunjukkan bahwa meskipun media sosial membuka ruang partisipasi publik, polarisasi dan konflik digital dapat menghambat fungsi demokrasi deliberatif dengan menciptakan konflik identitas dan perpecahan yang sulit didamaikan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia yang pluralistik, terutama dalam mengelola isu-isu global yang beresonansi kuat di tingkat domestik.

Polarisasi digital yang muncul dari wacana *#FreePalestine* di media sosial X menunjukkan dampak signifikan terhadap dinamika sosial dan politik domestik Indonesia. Polarisasi tersebut memperkuat politik identitas berbasis agama dan ideologi, mempengaruhi ranah opini publik, dan menimbulkan fragmentasi sosial yang meluas. Selain itu, polarisasi juga membentuk tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, memperlihatkan bahwa isu global tidak bisa dipisahkan dari konteks politik nasional. Media sosial sebagai digital public sphere memfasilitasi partisipasi publik, tetapi sekaligus memperuncing perpecahan yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi deliberatif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis bagaimana masyarakat menggunakan platform Media Sosial X untuk mengekspresikan solidaritas digital melalui wacana *#FreePalestine*, serta bagaimana wacana tersebut membentuk narasi, identitas politik, dan mempengaruhi dinamika sosial yang terjadi di ranah publik. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wacana solidaritas yang muncul di Media Sosial X sangat kental dengan penggunaan bahasa dan simbol yang berfungsi membangun narasi perlawanan terhadap penindasan dalam konflik Hamas dan Israel. Ungkapan-ungkapan, tagar, gambar, dan meme yang digunakan tidak hanya sekadar komunikasi, tetapi juga menjadi alat representasi emosional dan politik yang menguatkan rasa kebersamaan dan dukungan moral bagi Palestina.
2. Terdapat polarisasi yang kuat pada ranah publik Media Sosial X. Struktur diskursif yang digunakan dalam wacana tersebut memperdalam perbedaan pandangan, terutama antara kelompok yang mendukung Palestina dan yang memiliki pandangan berbeda terkait konflik. Polarisasi ini tercermin dalam penggunaan narasi yang saling bertentangan, menimbulkan ketegangan, dan memperkuat fragmentasi opini di masyarakat digital.
3. Solidaritas digital yang terbentuk melalui wacana *#FreePalestine* tidak hanya menjadi bentuk dukungan individual, tetapi telah berkembang menjadi ekspresi identitas politik kolektif masyarakat Indonesia. Melalui partisipasi aktif dalam penyebaran konten dan diskusi di Media Sosial X, masyarakat menegaskan kesadaran bersama tentang pentingnya keadilan dan kemanusiaan, sekaligus menandai posisi politik mereka dalam konteks geopolitik global.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami temuan dan kesimpulannya. Pertama, fokus penelitian hanya pada satu platform media sosial, yaitu X (sebelumnya Twitter). Meski X merupakan platform populer dan sangat aktif digunakan untuk diskursus politik dan sosial di Indonesia, pola interaksi, karakteristik pengguna, dan mekanisme penyebaran informasi di platform ini tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan dinamika media sosial di Indonesia. Platform lain seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau WhatsApp memiliki karakteristik, format komunikasi, dan audiens yang berbeda, sehingga wacana dan pola solidaritas digital di sana dapat berbeda secara signifikan.

Kedua, keterbatasan representasi aktor dalam data penelitian juga menjadi catatan penting. Penelitian ini cenderung lebih banyak merekam suara pengguna umum dan beberapa tokoh populer, sementara aktor-aktor penting lain seperti pejabat pemerintah, diplomat, organisasi masyarakat sipil secara formal, dan aktor luar negeri tidak terwakili secara mendalam. Akibatnya, analisis terhadap dinamika kebijakan dan diplomasi atau keterlibatan aktor struktural dalam pembentukan wacana solidaritas digital menjadi kurang optimal.

Ketiga, penggunaan data teks dan wacana di X sangat bergantung pada algoritma platform yang menampilkan konten tertentu kepada pengguna. Fenomena “filter bubble” dan “echo chamber” juga berpotensi membatasi cakupan dan keberagaman wacana yang dianalisis, sehingga hasil penelitian mungkin lebih mencerminkan kelompok pengguna tertentu yang sudah terpolarisasi, dan bukan representasi pluralitas suara masyarakat Indonesia secara luas.

C. Usulan Penelitian Lanjutan

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa usulan penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Studi Multi Platform

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan memasukkan berbagai platform media sosial lain yang juga signifikan dalam percaturan wacana politik dan sosial. Pendekatan multi-platform ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana solidaritas digital *#FreePalestine* terbentuk dan berkembang dalam berbagai format komunikasi digital, serta bagaimana karakteristik tiap platform memengaruhi framing dan partisipasi pengguna.

2. Pendekatan Multi Aktor dengan Fokus pada Aktor Struktural

Studi lanjutan dapat mengintegrasikan analisis aktor formal seperti pejabat pemerintah, diplomat, organisasi internasional, dan NGO yang berperan dalam dinamika solidaritas dan kebijakan luar negeri.

3. Analisis Dampak Sosial Politik Jangka Panjang

Penelitian berikutnya bisa menelusuri dampak jangka panjang polarisasi dan fragmentasi wacana *#FreePalestine* terhadap kohesi sosial dan politik domestik di Indonesia. Kajian longitudinal dengan menggabungkan data digital dan survei lapangan akan memperkaya pemahaman tentang konsekuensi nyata dari polarisasi digital terhadap kehidupan sosial, hubungan antar kelompok, dan dinamika kebijakan publik.

4. Studi Komparatif Kasus Konflik Internasional Lainnya

Selain konflik Palestina-Israel, penelitian dapat dikembangkan untuk menganalisis solidaritas digital dan polarisasi yang muncul dalam konteks konflik global lainnya, seperti di Ukraina, Suriah, atau Myanmar. Pendekatan komparatif ini akan membuka wawasan tentang pola universal dan konteks spesifik yang memengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia memaknai dan merespons konflik global melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sukri. 2019. "Politik Identitas Agama (Studi Kasus Politisasi Agama Pada Pemilihan Bupati Morotai 2011)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 6(1):22–34.
- Alviani, Sisi Renia, and Chazizah Gusnita. 2018. "Analisis Media Sosial Sebagai Pembentuk Konflik Sosial Di Masyarakat." in *Open Society Conference*. Vol. 238.
- Amsar A. Dulmanan. 2020. "Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Catatan Reflektif Atas Gagasan Politik Will Kymlicka." *MUQODDIMA: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 1(1):31–43.
- Annur, Cindy Mutia. 2024. "Ada 27 Juta Pengguna Twitter Di Indonesia, Terbanyak Ke-4 Global." *Databoks*.
- Arifin, M. M. 2019. "Persepsi Orangtua Terhadap Pentingnya Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Islam* 8(2):123–40.
- Azizah, Sinta Nur, Masnia Ningsih, Moch Ichdah, and Asyarin Hayau. 2024. "Mobilisasi Dukungan Dan Simpati Publik Terhadap Palestina Pada Akun @Erlanishere Di Twitter." (4).
- Bayertz, Kurt. 2022. "Four Uses of 'Solidarity.'" Pp. 3–28 in *Solidarity*. Springer.
- Cervi, Laura, and Tom Divon. 2023. "Playful Activism: Memetic Performances of Palestinian Resistance in TikTok #Challenges." *Social Media and Society* 9(1).
- Dewi, Ardila Sari, Silvi Harum Indah, Azka Nadzira, and Cholichul Hadi. 2020. "SOCIAL IDENTITY THEORY : Literature Review Pendekatan Social Identity Theory Dalam Kelompok." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7(2):809–20.
- Entman. 2002. "News Framing as a Multiparadigmatic Research Program: A Response to Entman." *Journal of Communication* 52(4):870–88. doi: 10.1093/joc/52.4.870.
- Esa Perdana, Kiki. 2018. "Sepakbola Sebagai Media Solidaritas Politik Bagi Supporter Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VIII(2).
- Eugene Alexander Donnini. 2024. "What a 'Free' Palestine Would Mean Eugene Alexander Donnini." *Quadrant* 68.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*(1st

- Ed.). Longman New York.
- Fairclough, Norman. 2010. *Critical Discourse Analysis The Critical Study of Language*. 2nd ed. London: Routledge Taylor and Francis Group.
- Fairclough, Norman. 2013. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Routledge.
- Fay, Daniel Lenox. 1967. "PENGARUH IDEAL-SELF TERHADAP EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT, MELALUI PRODUCT INVOLVEMENT, PUBLIC SELF-CONSCIOUSNESS, DAN SELF-ESTEEM DI ARTOTEL SURABAYA." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2(1):269–77.
- Fink, Rachel. 2023. "Australian-Israeli Former Diplomat Mark Regev Under Trial for Genocide Advocacy." *Haaretz*.
- Giawa, E. Constant, and Nani Nurrachman. 2018. "REPRESENTASI SOSIAL TENTANG MAKNA MALU PADA GENERASI MUDA DI JAKARTA." 17(1):77–86.
- Gloria, Intan, Mawar Silangit, Universitas Maritim, Raja Ali, Oksep Adhayanto, Universitas Maritim, and Raja Ali. 2022. "Review Materi Hukum Administrasi Negara." (October).
- Habermas, Jürgen. 2010. *Ruang Publik: Sebuah Kajian, Tentang Kategori, Masyarakat Borjuis*. Balesastra Pustaka.
- Haryatmoko, Dr. 2016. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis): Landasan Teori, Metodologi Dan Penerapan*.
- Hasan, Hasan. 2022. "Relasi Temporal Antarklausa Dalam Kalimat Majemuk Bertingkat Pada Koran Kompas." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 3(1):17–22.
- Hilmi, Ahmad. 2016. "Analisis Kualitas Self-Service Perpanjangan Online Di Perpustakaan Universitas Surabaya (Ubya)." *Journal Unair* 5(3):39–55.
- Kementrian Luar Negeri RI. 2023. "Kemlu-Kemkeu Berkolaborasi Perkuat Diplomasi Ekonomi. Kementerian Luar Negeri RI."

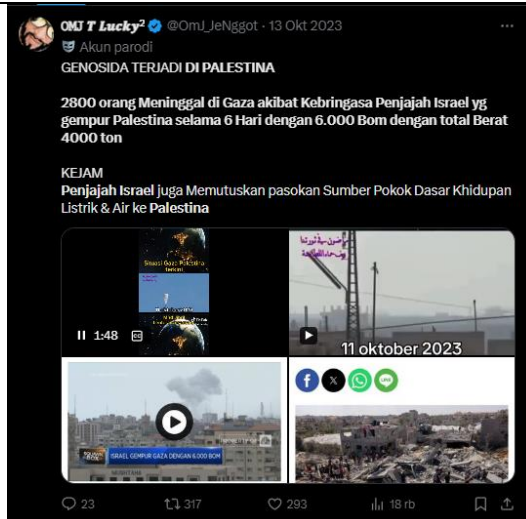
- Khoirun Nisa. 2022. "Peran Keluarga Dalam Mendukung Pendidikan Agama Islam Anak SD: Suatu Analisis Kualitatif." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan* 1(1):194–200.
- Kominfo. 2023. "Indeks Literasi Digital Tahun 2022 Meningkat, Kominfo Tetap Perhatikan Indeks Keamanan." *KOMDIGI*.
- Kristianto, Kristianto, Abdul Basith Ramadhan, and Fernandito Dikky Marsetyo. 2021. "Media Sosial Dan Connective Action: Studi Kasus Penggunaan Twitter Sebagai Ruang Solidaritas Selama Pandemi COVID-19." *Journal of Social Development Studies* 2(1):1–13.
- Lim, M. 2017. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and The Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49(3):411–427.
- Michele Zappavigna. 2018. *Searchable Talk: Hashtags and Social Media Metadiscourse*. London: Bloomsbury Academic.
- Morgan Sung. 2023. "The Watermelon Emoji Isn't Just TikTok Speak for Palestine." *TechCrunch*. Retrieved (<https://techcrunch.com/2023/11/09/watermelon-emoji-palestine-tiktok-filter-political-statement/>).
- Ni'am, Mohammad Fattahun. 2024. "JULID FI SABILILLAH: GERAKAN VIRTUAL SOLIDARITAS PALESTINA DI INDONESIA."
- Noor, Firman. 2016. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 46(1):1–17.
- Nugroho, Wahyu Budi. 2021. *Sosiologi Kehidupan Sehari-Hari*. Pustaka Egaliter.
- Pariser, Eli. 2011. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Pokhrel, Sakinah. 2024. "BENTUK DAN ISI PESAN KAMPANYE SOLIDARITAS PALESTINA DI INSTAGRAM (Analisis Isi Pada Akun Instagram @bdsnationalcommittee)." *Ayan* 15(1):37–48.
- Pratiwi, Ana Yunita, Siti Patimah, and Rumadani Sagala. 2021. "Analisis Wacana Kritis

- Van Dijk Pada Pemberitaan Media Online Lampung ‘Manajemen Konflik Kasus Kekerasan Di UIN Raden Intan Lampung.’” *JISE : Journal of Interdisciplinary Science and Education* 1(1).
- Ritonga, Elfi Yanti. 2018. “Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi.” *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4(1):32.
- Romdani, Lisda Nurul. 2021. “Teori Konstruksi Sosial: Sebuah Teori Bagaimana Warga Negara Memaknai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemic.” *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10(2):116–23.
- Sampson, Tony, Stephen Maddison, and Darren Ellis. 2018. *Affect and Social Media: Emotion, Mediation, Anxiety and Contagion*. Rowman & Littlefield.
- Sarah, Lulu Saidah. 2024. “ANALISIS RESEPSI KHALAYAK TERHADAP PESAN AKUN INSTAGRAM @ARESDIMAHDIDALAM AKSI #BUYCUT SOLIDARITAS PALESTINA.”
- Siahaan, Andika Parlindungan, Muhammad Aldy Pradana, Dwi Citra Chairani, Azizah Heriyani Erizal, and Yuyun Margareta Lase. 2024. “Pengaruh Era Digital Terhadap Pemakaian Bahasa Indonesia Di Kalangan Remaja Melalui Media Sosial.” *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2(1):879–85.
- Siapera, E. 2022. “Moderasi Konten AI, Rasisme, Dan (de) Kolonialitas.” *Jurnal Pencegahan Bullying Internasional* 4(1):55–65.
- Sobari, Wawan. 2023. “Non-Religious and Ethnic Orientations in the Voting Process: A Recent Study of Javanese Voters.” *International Journal of Asia-Pacific Studies* 19(2):131–61.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandar, Rindari Oktaria. 2023. “Analisis Gatekeeping Produksi Serial Reportase Project Multatuli Dalam Perspektif Jurnalisme Publik.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Susilawati, Lusi, and Maylanny Christin. 2024. “Analisis Tema Fantasi Komentar Donasi Palestina Pada Akun Youtube Nusantara Palestina Center.” 8(4):2–7.

- Tessler, M. 2020. *A History of the Israeli-Palestinian Conflict*. Bloomington: Indiana University Press.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Konflik Sosial Dalam Novel O Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser)." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.
- Wurst, Anna Katharina, Katharina Pohl, Jörg Hassler, and Daniel Jackson. 2023. "Emojis in Parties' Online Communication During the 2019 European Election Campaign: Toward a Typology of Political Emoji Use." *International Journal of Communication* 17:4686–4706.

LAMPIRAN

 Gambar 4. 1 Sumber: Akun X @marjinkiri	 Gambar 4. 2 Sumber: Akun X @MariaAlKaff
 Gambar 4.3 Sumber: Akun @InsiderWorld_1	 Gambar 4.4 Sumber: Akun @akuntwitter968
 Gambar 4.5 Sumber: Akun X @FreePalestine	 Gambar 4.6 Sumber: Akun X @Paihaly_5



Gambar 4.7 Sumber: Akun X @OmJeNggot



Gambar 4.8 Sumber: Akun X @anfarizzat



Gambar 4.9 Sumber: Akun X @kleponklepon



Gambar 4.11 Sumber: Akun X @Basheera_Putry



Gambar 4.12 Sumber: Akun X @Muhammad_Saewad



Gambar 4.13 Sumber: Akun X @PPQSI_



Assalaamu'alaikum, X-verse...

Seberapa peduli kita terhadap kemanusiaan?
Seberapa peduli kita terhadap terjadinya pembantaian warga sipil, anak-anak, bayi dan perempuan?
Seberapa peduli kita terhadap terjadinya genosida atas sebuah bangsa?
Seberapa peduli kita untuk "menghidupkan hati" kita dan memanusiakan saudara2 kita di Palestina?
Cukup lah jadi manusia untuk saudara2 kita di Palestina.
Hasbunallah wani'mal wakil...

Gambar 4.14 Sumber: Akun X @MariaAlkaff_



Gambar 4.9 Sumber: Akun X @kleponklepon



Gambar 4.16 Sumber: Akun X @DebryChrisW



Gambar 4.17 Sumber: Akun X @tech4palestine



Gambar 4.18 Sumber: Akun X @IndonesiaGelap



Gambar 4.19 Sumber: Akun X @DFighter_



Gambar 4.20 Sumber: Akun X @UusRsd



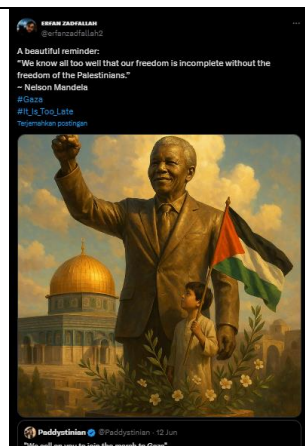
Gambar 4.21 Sumber: Akun X @numanmazlan



Gambar 4.22 Sumber: Akun X @bonnietriyana



Gambar 4.23 Sumber: Akun X @jasukegf5



Gambar 4.24 Sumber: Akun X @efranzadfallah2



Gambar 4.25 Sumber: Akun X @Hilmi28



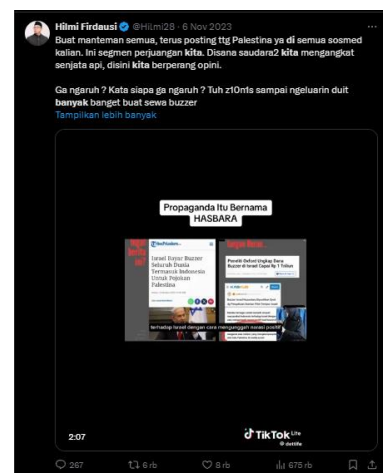
Gambar 4.26 Sumber: Akun X @neohistoria_id



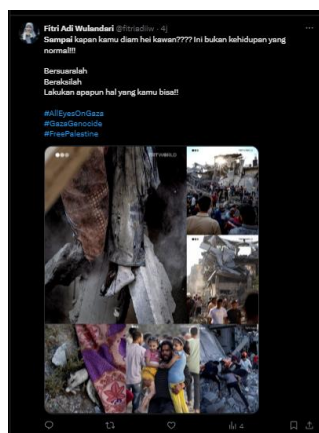
Gambar 4.27 Sumber: Akun X @lilaccountz



Gambar 4.28 Sumber: Akun X @ARIBPalestina



Gambar 4.29 Sumber: Akun X @Hilmi28



Gambar 4.30 Sumber: Akun X @fitriadiiw



Gambar 4.31 Sumber: Akun X @AnggiCartwheel



Gambar 4.32 Sumber: Akun X @jek__



Gambar 4.33 Sumber: Akun X @neohistoria_id



Gambar 4.34 Sumber: Akun X @salimafillah



Gambar 4.35 Sumber: Akun X @neohistoria_id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ahad Faisal Nazim
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Letjend Suprpto 1B No. 07
Ploso Nganjuk, Jawa Timur
No. Whatsapp : 082139086808
Email : ahadfaisal696@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Khadijah 2 Nganjuk : Tahun 2008-2009
2. SD 'Aisyiyah 1 Nganjuk : Tahun 2009-2015
3. SMP Muhammadiyah 1 Nganjuk : Tahun 2015-2018
4. SMAN 2 Nganjuk : Tahun 2018-2021

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Ahli DEMA UIN WALISONGO Tahun 2022
2. Koordinator Kementerian PSDM DEMA FISIP Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan semestinya

Semarang, 26 Mei 2025

Ahad Faisal Nazim

NIM: 2106016035